



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI LAMPUNG

AGUSTUS 2026





LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Lampung

AGUSTUS
2026



VISI **Bank Indonesia**

Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia Maju.



MISI **Bank Indonesia**

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

VISI **Kantor Perwakilan Bank Indonesia**

Menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang kredibel dalam mendukung Kebijakan Bank Indonesia dan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

MISI **Kantor Perwakilan Bank Indonesia**

Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) dan keandalan Sistem Pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan buku “Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Periode Agustus 2026” akhirnya dapat diselesaikan. Sesuai dengan UU P2SK, tujuan Bank Indonesia mencakup 3 area, yakni mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan, yang ketiganya ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia secara periodik melakukan asesmen terhadap perkembangan ekonomi di daerah, sumber-sumber tekanan inflasi, risiko dan prospeknya serta rekomendasi kebijakan yang perlu ditempuh Pemerintah.

Seiring dengan penerapan otonomi daerah sejak 1999, asesmen ekonomi regional semakin berperan dalam konteks pembangunan ekonomi nasional dan upaya untuk menstabilkan harga. Perhatian terhadap perkembangan ekonomi daerah semakin kuat di era pemerintahan saat ini yang menghendaki aktivitas ekonomi tidak lagi terpusat pada daerah tertentu, melainkan tersebar di berbagai daerah, sehingga disparitas ekonomi antar daerah berkurang. Terkait dengan hal tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung melakukan kajian serta memberikan asesmen terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan regional Lampung secara menyeluruh dan dituangkan dalam publikasi “Laporan Perekonomian Provinsi Lampung”. Analisis dalam buku ini mencakup pertumbuhan ekonomi daerah, perkembangan inflasi, perbankan dan sistem pembayaran.

Dalam kesempatan ini kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, PLN Wilayah Lampung, Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Ditjen Bea Cukai, Bapenda Provinsi Lampung, dan semua penyedia data yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Kami menyadari bahwa hasil kajian ekonomi yang disajikan dalam buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran serta masukan dari semua pihak yang berkepentingan dengan buku ini. Kami juga mengharapkan kiranya kerjasama yang baik selama ini dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan ridho-Nya kepada kita semua.

Bandar Lampung, Agustus 2026

**KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI LAMPUNG**

Bimo Epyanto

Direktur

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Grafik	vi
Daftar Tabel	xix
Ringkasan Eksekutif	x
Tabel Indikator	xvi

01

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

1.1. Analisis PDRB Sisi Pengeluaran	2
1.2. Analisis PDRB Sisi Lapangan Usaha	8

02

Perkembangan Inflasi

2.1. Inflasi Umum Gabungan Dua Kota dan Dua Kabupaten di Provinsi Lampung	18
2.2. Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	26
2.3. Inflasi Sumatera	29
2.4. Arah Perkembangan Inflasi Triwulan III 2026	30
2.5. Pengendalian Inflasi	31
Boks 1 Implementasi <i>Early Warning System</i> Harga Pangan Komoditas Utama dalam Rangka Pengendalian Inflasi Di Lampung	34
Boks 2 Bandar Lampung dan Metro Perkuat Pasokan Bawang Merah Melalui Kerja Sama Antardaerah Dengan Solok Untuk Kendalikan Inflasi Pangan	38
Boks 3 Penguatan Resiliensi Usaha Tani Cabai Untuk Mendukung Stabilitas Pasokan dan Inflasi Lampung	40

03

Pembiayaan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan, serta UMKM

3.1. Pembiayaan Daerah	46
3.2. Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	50

04

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

4.1. Perkembangan Transaksi Sistem Pembayaran Tunai	54
4.2. Perkembangan Sistem Pembayaran Bank Indonesia	56
4.3. Perkembangan Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	56
4.4. Perkembangan <i>Merchant</i> & Pengguna QRIS (<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>)	58
4.5. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (Kupva BB)	59
Boks 4 Peluncuran QRIS Tap Pada Smart BRT Itera dan <i>Kick-Off Siger Fest 2026: Bijak Bertransaksi, Siap Digitalisasi</i>	61

05

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

5.1. Ketenagakerjaan	66
5.2. Nilai Tukar Petani	69
5.3. Kemiskinan	71

06

Prospek Perekonomian

6.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi	80
6.2. Prospek Inflasi	83
6.3. Rekomendasi	85

Daftar Grafik

01

Grafik 1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Sumatera dan Provinsi Lampung	2
Grafik 1.2.	Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung	2
Grafik 1.3.	Distribusi PDRB Sisi Pengeluaran Provinsi Lampung	2
Grafik 1.4.	Indeks Keyakinan Konsumen	3
Grafik 1.5.	Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung	3
Grafik 1.6.	Perkembangan Konsumsi Listrik Rumah Tangga	4
Grafik 1.7.	Pertumbuhan Penyaluran Kredit Konsumsi	4
Grafik 1.8.	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung	4
Grafik 1.9.	Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Lampung	4
Grafik 1.10.	DPK Pemerintah Daerah	5
Grafik 1.11.	Penanaman Modal Asing di Provinsi Lampung	5
Grafik 1.12.	Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Lampung	5
Grafik 1.13.	Perkembangan Likert Scale Investasi	6
Grafik 1.14.	Kredit Investasi	6
Grafik 1.15.	Perkembangan Ekspor Luar Negeri Non Migas Provinsi Lampung	6
Grafik 1.16.	Perkembangan Nominal dan Volume Ekspor Kopi, Teh, dan Rempah-rempah	7
Grafik 1.17.	Perkembangan Nominal dan Volume Ekspor Bahan Bakar Mineral	7
Grafik 1.18.	Perkembangan Harga Komoditas Kopi	7
Grafik 1.19.	Perkembangan Ekspor Lemak Dan Minyak Hewan/Nabati	7
Grafik 1.20.	Perkembangan Harga CPO Dunia	7
Grafik 1.21.	Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri Non Migas Provinsi Lampung	8
Grafik 1.22.	Perkembangan Volume Impor Luar Negeri Non Migas Provinsi Lampung	8
Grafik 1.23.	Perkembangan Nominal Impor	8
Grafik 1.24.	Perkembangan Volume Impor	8
Grafik 1.25.	Pangsa PDRB Lapangan Usaha	8
Grafik 1.26.	Produksi Gabah Kering Giling	9
Grafik 1.27.	Produksi Bawang Merah	10
Grafik 1.28.	Produksi Cabai Besar	10
Grafik 1.29.	Produksi Cabai Rawit	10
Grafik 1.30.	Nilai Tukar Usaha Pertanian	10
Grafik 1.31.	Southern Oscillation Index	10
Grafik 1.32.	Kredit LU Pertanian	10
Grafik 1.33.	Pertumbuhan Volume Impor Bahan Baku Industri	11
Grafik 1.34.	Pertumbuhan Konsumsi Listrik Industri	11
Grafik 1.35.	Pertumbuhan Kredit LU Industri Pengolahan	11
Grafik 1.36.	Perkembangan Indeks Penjualan Riil Lampung	12
Grafik 1.37.	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Lampung	12
Grafik 1.38.	Perkembangan Penjualan Kendaraan	12
Grafik 1.39.	Kredit LUPBE	12

Grafik 1.40.	Perkembangan Pengadaan Semen Provinsi Lampung	13
Grafik 1.41.	Perkembangan Penumpang Angkutan Udara, Laut dan Kereta Api	13
Grafik 1.42.	Perkembangan Penyaluran Kredit Konstruksi	13
Grafik 1.43.	Perkembangan Barang Angkutan Udara, Laut dan Kereta Api	13
Grafik 1.44.	Kredit LU Transportasi, Pergudangan dan Infokom	13

02

Grafik 2.1.	Inflasi Lampung dan Nasional	18
Grafik 2.2.	Sumbangan Inflasi Bulanan April, Mei dan Juni 2026	18
Grafik 2.3.	Sumbangan Inflasi Bulanan April 2026 Menurut Kelompok Pengeluaran	18
Grafik 2.4.	Sumbangan Inflasi Bulanan Mei 2026 Menurut Kelompok Pengeluaran	19
Grafik 2.5.	Sumbangan Inflasi Bulanan Juni 2026 Menurut Kelompok Pengeluaran	20
Grafik 2.6.	Inflasi Tahunan Lampung dan Nasional	21
Grafik 2.7.	Perkembangan Harga Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras	22
Grafik 2.8.	Perkembangan Harga Cabai Merah dan Bawang Merah	22
Grafik 2.9.	Perkembangan Harga Rokok	22
Grafik 2.10.	Perkembangan Harga Emas Perhiasan	23
Grafik 2.11.	Perkembangan Harga Bensin	24
Grafik 2.12.	Perkembangan Tarif Angkutan Antar Kota	24
Grafik 2.13.	Inflasi Bulanan Kota Bandar Lampung	26
Grafik 2.14.	Inflasi Tahunan Kota Bandar Lampung	26
Grafik 2.15.	Inflasi Bulanan Kota Metro	27
Grafik 2.16.	Inflasi Tahunan Kota Metro	27
Grafik 2.17.	Inflasi Bulanan Kabupaten Mesuji	28
Grafik 2.18.	Inflasi Tahunan Kabupaten Mesuji	28
Grafik 2.19.	Inflasi Bulanan Kabupaten Lampung Timur	28
Grafik 2.20.	Inflasi Tahunan Kabupaten Lampung Timur	28
Grafik 2.21.	Inflasi Tahunan Kabupaten Kota di Wilayah Sumatera	30
Grafik 2.22.	Ekspektasi Perubahan Harga 3 & 6 Bulan Ke Depan	30

03

Grafik 3.1.	Perkembangan Kredit dan NPL Prov. Lampung	46
Grafik 3.2.	Kredit Konsumsi Prov. Lampung	46
Grafik 3.3.	Kredit Prov. Lampung berdasarkan Jenis Penggunaan	46
Grafik 3.4.	Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Usaha (Konvensional dan Syariah)	46

Grafik 3.5.	Perkembangan Kredit UMKM Provinsi Lampung	47
Grafik 3.6.	Perkembangan Kredit Konsumsi Rumah Tangga	47
Grafik 3.7.	Indeks Keyakinan Konsumen	48
Grafik 3.8.	Perkembangan Kredit Konsumsi Rumah Tangga	48
Grafik 3.9.	NPL Kredit Konsumsi Rumah Tangga	48
Grafik 3.10.	DPK Berdasarkan Jenis Nasabah	48
Grafik 3.11.	Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Berdasarkan Jenis Penggunaan	49
Grafik 3.12.	Pertumbuhan Kredit Korporasi	49
Grafik 3.13.	SBT Perkembangan Kegiatan Usaha	49
Grafik 3.14.	DPK Kredit Korporasi	50
Grafik 3.15.	Pertumbuhan Kredit UMKM	50
Grafik 3.16.	Pertumbuhan Kredit UMKM Mikro, Kecil, dan Menengah	50
Grafik 3.17.	Pangsa Kredit UMKM	50
Grafik 3.18.	Kredit UMKM berdasarkan Jenis Penggunaan	51
Grafik 3.19.	Kredit UMKM berdasarkan Penggunaan	51

04

Grafik 4.1.	Perkembangan Aliran Uang Kartal Triwulanan	54
Grafik 4.2.	Aliran Uang Kartal Inflow	54
Grafik 4.3.	Aliran Uang Kartal Outflow	54
Grafik 4.4.	Penukaran Uang Melalui BI	55
Grafik 4.5.	Kas Keliling	55
Grafik 4.6.	Kas Titipan	55
Grafik 4.7.	Perkembangan Pemusnahan UTLE	55
Grafik 4.8.	Temuan Uang Palsu	55
Grafik 4.9.	Pecahan Uang Palsu Tw II 2026	56
Grafik 4.10.	Perkembangan Transaksi Kliring	56
Grafik 4.11.	Perkembangan Transaksi RTGS	56
Grafik 4.12.	Perkembangan Transaksi Kartu ATM/D	57
Grafik 4.13.	Indeks Pengeluaran Konsumsi Barang Tahan Lama	57
Grafik 4.14.	Perkembangan Transaksi Kartu Kredit	57
Grafik 4.15.	Pertumbuhan Kartu Kredit Per Jenis Transaksi (% yoy)	57
Grafik 4.16.	Pangsa Penghasilan untuk Pembayaran Cicilan	57
Grafik 4.17.	Perkembangan Dana Float UE	58
Grafik 4.18.	Perkembangan Transaksi UE Per Jenis Transaksi	58
Grafik 4.19.	Pangsa Transaksi UE Triwulanan	58
Grafik 4.20.	Perkembangan Jumlah Merchant QRIS	58
Grafik 4.21.	Pertumbuhan Merchant QRIS Triwulanan	58
Grafik 4.22.	Pangsa Merchant QRIS di Sumatera	59
Grafik 4.23.	Perkembangan Pengguna QRIS	59
Grafik 4.24.	Transaksi KUPVA BB di Provinsi Lampung	59
Grafik 4.25.	Pangsa Transaksi KUPVA Per Jenis Mata Uang	59
Grafik 4.26.	Pergerakan Nilai Tukar USD-IDR	60

05

Grafik 5.1.	Jumlah Penduduk Bekerja di Provinsi Lampung	66
Grafik 5.2.	Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung	66
Grafik 5.3.	TPAK Provinsi Lampung	66
Grafik 5.4.	Share Tenaga Kerja Provinsi Lampung	66
Grafik 5.5.	TPAK Provinsi Lampung Berdasarkan Gender	67
Grafik 5.6.	IKG Provinsi Lampung	67
Grafik 5.7.	TPT Sumatera	68
Grafik 5.8.	TPT Provinsi Lampung berdasarkan Wilayah Tempat Tinggal	68
Grafik 5.9.	Penggunaan Tenaga Kerja dan Perkembangan Investasi pada Dunia Usaha di Provinsi Lampung	68
Grafik 5.10.	Perkembangan Upah Minimum Provinsi Lampung	68
Grafik 5.11.	Proporsi Pekerja Formal dan Informal di Provinsi Lampung	68
Grafik 5.12.	Pekerja di Provinsi Lampung berdasarkan Jam Kerja	68
Grafik 5.13.	TPAK Menurut Tingkat Pendidikan (ribu orang)	69
Grafik 5.14.	TPAK Menurut Tingkat Pendidikan (%)	69
Grafik 5.15.	NTP Provinsi Lampung dan Komponen Penyusunnya	70
Grafik 5.16.	NTP Per Sub Sektor	70
Grafik 5.17.	Indeks yang Diterima per Sub Sektor	70
Grafik 5.18.	Indeks yang Dibayar per Sub Sektor	70
Grafik 5.19.	Pertumbuhan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) per Subsektor	71
Grafik 5.20.	NTP Provinsi-Provinsi di Sumatera	71
Grafik 5.21.	Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Lampung	71
Grafik 5.22.	Persentase Penduduk Miskin di Sumatera dibandingkan Nasional	71
Grafik 5.23.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	73
Grafik 5.24.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	73
Grafik 5.25.	Koefisien Gini Provinsi Lampung	73

06

Grafik 6.1.	Perkembangan Upah Minimum Provinsi Lampung 2020 s.d. 2026	81
Grafik 6.2.	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Provinsi Lampung	81
Grafik 6.3.	Perkembangan Hasil Liaison BI Lampung	82

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung - Sisi Pengeluaran	3
Tabel 1.2.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung - Sisi Lapangan Usaha	9
Tabel 2.1.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi & Deflasi Bulanan April 2026	18
Tabel 2.2.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi & Deflasi Bulanan Mei 2026	19
Tabel 2.3.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi & Deflasi Bulanan Juni 2026	20
Tabel 2.4.	Andil Inflasi Month to Month Menurut Kelompok Pengeluaran (%)	20
Tabel 2.5.	Andil Inflasi Year on Year Menurut Kelompok (%)	21
Tabel 2.6.	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau (% yoy)	22
Tabel 2.7.	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (% yoy)	23
Tabel 2.8.	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Transportasi (% yoy)	24
Tabel 2.9.	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Perumahan, Air, Listrik, Gas Dan Bahan Bakar Lainnya (% yoy)	25
Tabel 2.10.	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran (% yoy)	25
Tabel 2.11.	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Pendidikan (% yoy)	26
Tabel 5.1.	Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Lampung	67
Tabel 5.2.	Dekomposisi Penduduk Usia Kerja dan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Lampung	69
Tabel 5.3.	Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya	72
Tabel 5.4.	Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Triwulan II 2026	74
Tabel 5.5.	Penyaluran Program Sembako Posisi Triwulan II 2026	75
Tabel 6.1.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia	80
Tabel 6.2.	Proyeksi Indikator Makroekonomi Provinsi Lampung	81
Tabel 6.3.	Harga Komoditas Ekspor dan Impor Utama Provinsi Lampung	82

Ringkasan Eksekutif

Agustus 2026



Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

➤ **Kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29% (yoy), sedikit melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,58% (yoy).**

Secara umum, perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29% (yoy), sedikit melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,58% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera yang sebesar 5,06% (yoy), dan sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang juga sebesar 5,29% (yoy) (Grafik 1.1). Secara nominal, perekonomian Lampung pada triwulan II 2026 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing tercatat sebesar Rp147,91T dan Rp80,07T.

Pertumbuhan ekonomi Lampung triwulan II 2026 tetap ditopang oleh kuatnya permintaan domestik dan kinerja eksternal. Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 4,86% (yoy) dengan andil terbesar 2,91% terhadap PDRB, didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat selama HBKN Iduladha 2026. Investasi tumbuh 3,08% (yoy) sejalan dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, dan proyek swasta, sementara Konsumsi Pemerintah tetap tumbuh tinggi 12,80% (yoy) didorong oleh realisasi belanja dan keberlanjutan berbagai program strategis di daerah. Dari sisi eksternal, ekspor tumbuh 4,12% (yoy) dengan kontribusi 2,17%, terutama berasal dari peningkatan ekspor hasil penggilingan dan bahan bakar mineral, serta didukung oleh peningkatan impor bahan baku yang mencerminkan aktivitas industri yang tetap kuat.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan II 2026 terutama didukung oleh kinerja sektor sekunder dan tersier. Sektor sekunder didorong oleh LU Industri Pengolahan yang tumbuh 6,99% (yoy) serta LU Konstruksi yang tumbuh 6,57% (yoy), didukung oleh meningkatnya aktivitas industri pengolahan dan berlanjutnya pembangunan proyek pemerintah dan swasta. Sementara itu, sektor tersier turut menopang pertumbuhan melalui LU Perdagangan Besar dan Eceran yang tumbuh 7,98% (yoy). Di sisi lain, sektor primer

mengalami perlambatan seiring moderasi LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh 2,97% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 9,89% (yoy), sejalan dengan berakhirnya periode panen raya pada triwulan sebelumnya.

Inflasi

Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 2,46% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,16% (yoy), namun masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34% (yoy). Perkembangan inflasi tahunan terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok transportasi serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Sementara itu, deflasi pada kelompok pendidikan turut menahan peningkatan inflasi pada periode laporan.

Secara spasial, tekanan inflasi kabupaten/kota di Provinsi Lampung relatif lebih terkendali dibandingkan wilayah lain di Sumatera. Seluruh kabupaten/kota sampel IHK di Lampung mencatat inflasi tahunan di bawah tingkat inflasi nasional dan termasuk dalam 10 kabupaten/kota dengan inflasi terendah di Sumatera. Perkembangan tersebut mencerminkan stabilitas harga di Provinsi Lampung yang relatif terjaga pada triwulan laporan.

Inflasi Provinsi Lampung pada Triwulan III 2026 diperkirakan tetap berada dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1\%$ (yoy), dengan kecenderungan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi diperkirakan terutama bersumber dari kelompok pendidikan, perawatan pribadi dan jasa lainnya, makanan, minuman, dan tembakau, serta transportasi. Hal ini sejalan dengan berakhirnya efek basis rendah tarif pendidikan, masih tingginya harga emas global, serta potensi kenaikan harga rokok, BBM nonsubsidi, dan tarif angkutan. Di sisi lain, perbaikan pasokan beras, bawang merah, dan kopi robusta diperkirakan menahan tekanan inflasi, meski risiko cuaca ekstrim perlu menjadi perhatian.

Inflasi Provinsi Lampung pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 2,46% (yoy), meningkat dari 1,16% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Pembiayaan Daerah

Pada triwulan II 2026, penyaluran kredit tercatat tumbuh sebesar 9,34% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,82% (yoy).

Penyaluran kredit di Provinsi Lampung berdasarkan lokasi proyek tumbuh menguat dengan risiko yang tetap terjaga. Pada triwulan II 2026, penyaluran kredit tercatat tumbuh sebesar 9,34% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,82% (yoy).

Pada triwulan II 2026, kredit konsumsi rumah tangga tercatat sebesar Rp30,76 triliun atau tumbuh 10,65% (yoy). Pertumbuhan kredit rumah tangga ditopang oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang masing-masing tumbuh sebesar 10,84% (yoy) dan 25,04% (yoy).

Kinerja kredit rumah tangga sejalan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perseorangan pada triwulan II 2026 di Provinsi Lampung yang mencapai Rp50,38 triliun atau 74,64% dari total DPK. Pertumbuhan DPK perseorangan pada triwulan laporan tercatat sebesar 4,97% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,32% (yoy).

Kinerja penyaluran kredit perbankan kepada sektor korporasi pada triwulan II 2026 meningkat signifikan. Kredit korporasi tercatat mencapai Rp74,48 triliun atau tumbuh 8,80% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,55% (yoy).

Kredit UMKM tumbuh positif pada triwulan II 2026. Kredit yang disalurkan pada periode laporan tercatat sebesar Rp32,99 triliun atau tumbuh 1,91% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,87% (yoy).

Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Aliran uang kartal di Provinsi Lampung pada triwulan II 2026 tercatat mengalami *net outflow* sebesar Rp1,01 triliun.

Aliran uang kartal di Provinsi Lampung pada triwulan II 2026 tercatat mengalami *net outflow* sebesar Rp1,01 triliun. Kondisi aliran uang kartal *outflow* juga mengalami kenaikan sebesar 2,28% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya dengan *outflow* sebesar negatif 4,29% (yoy).

Transaksi pembayaran melalui sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (RTGS) tumbuh positif jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp29,20 triliun menjadi sebesar Rp38,55 triliun.

Transaksi pembayaran melalui sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (RTGS) tumbuh positif jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp29,20 triliun menjadi sebesar Rp38,55 triliun. Transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) mengalami kontraksi sebesar 5,98% (yoy). Secara nominal, transaksi kartu ATM/Debit juga tercatat menurun sebesar 2,99% (yoy), mengikuti tren triwulan sebelumnya yang juga mengalami penurunan sebesar 4,46% (yoy).

Sampai dengan Juni 2026, *merchant* QRIS yang tersebar di Provinsi Lampung mencapai 894.797 *merchant*. Jumlah tersebut terus meningkat sejalan dengan tren peningkatan *merchant* QRIS di wilayah Sumatra. Sementara, jumlah pengguna QRIS di Provinsi Lampung adalah sebesar 1.567.685. Jumlah ini mengalami pertumbuhan 6,26% (qtq) dari triwulan sebelumnya.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Triwulan II 2026 menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal tersebut tecermin dari peningkatan jumlah penduduk yang bekerja menjadi 4,95 juta jiwa, bertambah 95,7 ribu jiwa atau tumbuh 1,97% dibandingkan Agustus 2025.

Berdasarkan status pekerjaan utama pada Triwulan II 2026, jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal tercatat sebanyak 3.423,3 ribu orang (69,17%), sementara penduduk yang bekerja di sektor formal sebanyak 1.525,7 ribu orang (30,83%). Persentase pekerja formal meningkat sebesar 4,45 persen poin dibandingkan dengan periode Triwulan II 2025.

Berdasarkan hasil Sakernas Triwulan II 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 3,97%, yang menunjukkan bahwa sekitar empat dari setiap seratus angkatan kerja berada dalam kondisi menganggur. Angka tersebut menurun 5,70% (yoy) dibandingkan dengan Triwulan II 2025.

Rata-rata NTP Provinsi Lampung pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 127,28, menunjukkan peningkatan secara triwulanan, meskipun masih mengalami tekanan secara tahunan. Rata-rata NTP pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar 126,63, sementara pada Triwulan II 2025 sebesar 128,95.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung pada Triwulan II 2026 tercatat menurun sebesar 6,22% (yoy), menjadi 831,89 ribu jiwa dibandingkan dengan Triwulan II 2025 yang mencapai 887,02 ribu jiwa. Dari sisi komposisinya, penduduk miskin di Provinsi Lampung utamanya berada di daerah pedesaan di mana sebagian besar berprofesi sebagai petani.

Merchant QRIS yang tersebar di Provinsi Lampung mencapai 894.797 merchant.

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Triwulan II 2026 tercatat membaik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya

Rata-rata NTP Provinsi Lampung pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 127,28 meningkat secara tahunan.

Prospek Perekonomian dan Inflasi

Secara keseluruhan tahun 2026, perekonomian Lampung diperkirakan tumbuh dalam kisaran 5,0%–5,6% dengan inflasi yang terkendali dalam kisaran 2,5+1%.

Prospek perekonomian dunia pada tahun 2026–2027 kini diperkirakan menghadapi tantangan yang lebih berat di tengah ketidakpastian global yang semakin tinggi. Berdasarkan perkembangan terkini, kondisi dan prospek ekonomi dunia diperkirakan lebih rendah jika dibandingkan dengan prospek awal tahun, dipicu oleh tingginya gejala geopolitik akibat perang di Timur Tengah. Gejala ini tidak hanya memengaruhi rantai pasok global tetapi juga memicu volatilitas harga komoditas energi, terutama minyak mentah, serta menunda normalisasi kebijakan moneter global.

Kinerja perekonomian Provinsi Lampung diperkirakan tumbuh dalam kisaran 5,0–5,6% pada tahun 2026, cenderung lebih moderat dari prakiraan sebelumnya seiring eskalasi risiko geopolitik global, namun tetap didukung prospek penguatan permintaan domestik serta kinerja lapangan usaha utama. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga dan investasi diperkirakan tetap menjadi penopang pertumbuhan seiring terjaganya daya beli masyarakat, kenaikan upah minimum, serta berlanjutnya pembangunan infrastruktur dan proyek strategis daerah. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha (LU), sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diperkirakan tetap menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, didukung keberlanjutan program swasembada pangan dan penguatan produktivitas.

Inflasi gabungan empat kabupaten kota di Provinsi Lampung pada tahun 2026 diperkirakan tetap terjaga dalam sasaran 2,5+1%. Laju inflasi gabungan di Provinsi Lampung yang semakin terkendali tersebut sejalan dengan penguatan program TPIP-TPID dan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) dalam kerangka 4K.

INFOGRAFIS PEREKONOMIAN PROVINSI LAMPUNG

Agustus 2026

PERTUMBUHAN EKONOMI



PERTUMBUHAN EKONOMI

Tw I 2026 **5,58** ▼ Tw II 2026 **5,29**
% (yoy) % (yoy)

KONSUMSI RUMAH TANGGA

Tw I 2025 **5,10** ▼ Tw II 2026 **4,86**
% (yoy) % (yoy)

PERKEMBANGAN INFLASI



PERKEMBANGAN INFLASI

Tw IV 2026 **1,16** ▲ Tw I 2026 **2,46**
% (yoy) % (yoy)

INFLASI TAHUNAN KELOMPOK BAHAN MAKANAN

Tw IV 2025 **1,12** ▲ Tw I 2026 **1,75**
% (yoy) % (yoy)

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

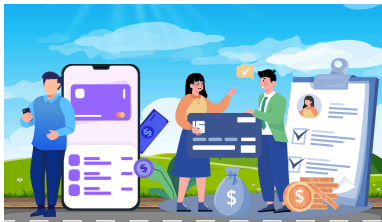


TUNAI	Inflow	Outflow	Nett Flow
Tw I 2026	4,76	3,64	1,11
Tw II 2026	2,19 ▼	3,21 ▼	-1,01 ▼

Satuan dalam Triliun Rupiah

NON TUNAI	Nominal Kliring (Debit + Kredit)	Volume Kliring (Debit + Kredit)	Nominal RTGS	Volume RTGS
Tw I 2026	3,03 Rp Triliun	56,92 Ribu Lembar	29,20 Rp Triliun	13,73 Ribu Lembar
Tw II 2026	3,72 ▲ Rp Triliun	65,03 ▲ Ribu Lembar	38,55 ▲ Rp Triliun	18,46 ▲ Ribu Lembar

KEUANGAN PEMERINTAH



% REALISASI PENDAPATAN

APBD SEMUA PEMDA DI PROVINSI LAMPUNG

Tw I 2026 **14,28%** ▲ Tw II 2026 **39,94%**

*Data per 24 Agustus 2026



% REALISASI BELANJA

APBD SEMUA PEMDA DI PROVINSI LAMPUNG

Tw I 2026 **18,89%** ▼ Tw II 2026 **42,17%**

*Data per 24 Agustus 2026

KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN



TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

4,19% Agustus 2024 | 4,07% Februari 2025 | ▲ 4,21% Agustus 2025

ANGKATAN KERJA (JUTA ORANG)

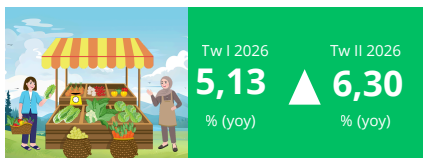
5,00 Februari 2023 | 5,04 Februari 2024 | ▲ 5,08 Februari 2025

KEMISKINAN

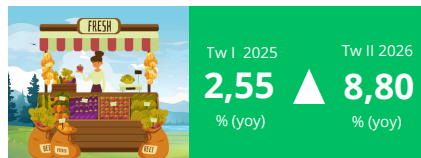
10,62% September 2024 | 10% Maret 2025 | ▼ 9,66% September 2025

STABILITAS KEUANGAN DAERAH

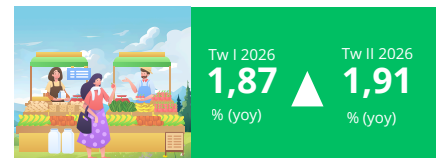
PERTUMBUHAN KREDIT PERSEORANGAN



PERTUMBUHAN KREDIT KORPORASI



PERTUMBUHAN KREDIT UMKM



Berdasarkan Lokasi Bank

Pertumbuhan Kredit	Tw I 2026 6,14 ▲ Tw II 2026 6,48 % (yoy) % (yoy)
Pertumbuhan Kredit Modal Kerja	Tw I 2026 0,08 ▲ Tw II 2026 3,03 % (yoy) % (yoy)
Pertumbuhan Kredit Investasi	Tw I 2026 21 ▼ Tw II 2026 9,5 % (yoy) % (yoy)
Pertumbuhan Kredit Konsumsi	Tw I 2026 10,08 ▲ Tw II 2026 10,74 % (yoy) % (yoy)

Berdasarkan Lokasi Proyek

Pertumbuhan DPK	Tw I 2026 6,64 ▲ Tw II 2026 7,98 % (yoy) % (yoy)
Pertumbuhan Aset (Aset Bersih)	Tw I 2026 6,91 ► Tw II 2026 6,91 % (yoy) % (yoy)
NPL (Gross)	Tw I 2026 3,02 ▼ Tw II 2026 2,94 % (yoy) % (yoy)
LDR	Tw I 2026 115,11 ▼ Tw II 2026 113,19 % (yoy) % (yoy)

Pertumbuhan Kredit	Tw I 2026 4,82 ▲ Tw II 2026 9,34 % (yoy) % (yoy)
Pertumbuhan Kredit Modal Kerja	Tw I 2026 1,13 ▲ Tw II 2026 5,17 % (yoy) % (yoy)
Pertumbuhan Kredit Investasi	Tw I 2026 6,98 ▲ Tw II 2026 20,42 % (yoy) % (yoy)
Pertumbuhan Kredit Konsumsi	Tw I 2026 10,43 ▲ Tw II 2026 10,65 % (yoy) % (yoy)



Tabel Indikator Makro

Inflasi dan PDRB

Indikator	2025				2025	2026	
	I	II	III	IV		I	II
Indeks Harga Konsumen (IHK)							
Bandar Lampung	107,54	108,45	106,97	107,87		108,76	110,71
Metro	107,25	107,43	107,48	108,65		108,99	110,73
Mesuji	113,13	113,54	112,75	114,13		114,83	117,23
Lampung Timur	111,86	112,29	111,18	113,26		113,03	115,58
Gabungan	109,05	109,75	108,51	109,79		110,32	112,45
Laju Inflasi (yoy)							
Bandar Lampung	1,45	2,21	0,37	0,44		1,13	2,08
Metro	1,39	1,81	1,99	2,09		1,62	3,07
Mesuji	2,54	2,52	2,35	2,69		1,50	3,25
Lampung Timur	1,71	2,48	2,44	2,45		1,05	2,93
Gabungan	1,58	2,27	1,17	1,25		1,16	2,46
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)							
Pertumbuhan PDRB (% YoY)	5,47	5,09	5,04	5,54	5,54	5,58	5,29
PDRB ADHK (Miliar Rp)	69.560,58	76.047,84	76.575,42	74.236,81	296.420,65	73.439,55	80.071,34
Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	15.379,25	19.882,59	19.856,80	17.262,81	72.381,45	16.990,72	20.757,28
Pertambangan & Penggalian	3.263,58	3.311,13	3.293,64	3.276,48	13.144,83	3.201,29	3.394,59
Industri Pengolahan	13.105,82	13.686,58	14.384,66	13.573,23	54.750,29	13.454,05	14.364,68
Pengadaan Listrik, Gas	96,29	96,21	99,79	101,99	394,28	98,09	106,12
Pengadaan Air	72,14	73,13	71,82	73,71	290,80	69,36	75,05
Konstruksi	7.110,00	7.634,94	7.707,13	8.070,09	30.522,16	7.460,72	8.127,19
Perdagangan Besar & Eceran dan Reparasi Mobil & Sepeda	10.669,37	11.047,24	10.967,59	11.093,06	43.777,26	11.405,45	11.929,28
Transportasi & Pergudangan	4.990,67	5.339,96	5.046,08	5.230,00	20.606,71	5.293,56	5.610,46
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.167,93	1.240,63	1.269,19	1.300,51	4.978,26	1.313,15	1.314,62
Informasi & Komunikasi	4.236,59	4.153,13	4.268,47	4.287,49	16.945,68	4.373,49	4.357,26
Jasa Keuangan	1.381,29	1.402,27	1.435,20	1.535,14	5.753,90	1.525,82	1.488,25
Real Estate	2.147,09	2.092,96	2.115,14	2.241,54	8.596,73	2.169,12	2.225,97
Jasa Perusahaan	113,44	118,42	116,65	122,14	470,65	118,22	124,42
Administrasi Pemerintahan,Pertahanan, dan Jaminan Sosial	2.185,96	2.245,68	2.169,44	2.237,13	8.838,21	2.229,97	2.353,56
Jasa Pendidikan	2.021,05	2.016,79	2.043,00	2.032,28	8.113,12	2.025,72	2.047,83
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	768,46	768,76	816,04	798,29	3.151,55	787,69	819,30
Jasa Lainnya	851,65	936,40	914,76	1.001,96	3.704,77	923,12	975,47
Nilai Ekspor Non Migas (Juta USD)	1.573,74	1.474,10	1.777,99	1.810,77	6.636,59	1.380,08	1.628,15
Volume Ekspor Non Migas (Ribu Ton)	4.307,22	3.862,00	4.178,00	4.888,49	17.235,71	4.092,58	4.962,40
Nilai Impor Non Migas (Juta USD)	228,00	285,71	328,51	393,31	1.235,53	286,92	501,38
Volume Impor Non Migas (Ribu Ton)	460,53	559,65	409,31	506,63	1.936,12	192,40	-

Sistem Pembayaran

Indikator Mikro	2024		2025				2026	
	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Inflow (Triliun Rp)	2,92	2,31	3,72	3,75	2,13	1,26	4,76	2,19
Outflow (Triliun Rp)	3,05	2,81	3,8	3,14	2,97	2,19	3,64	-41,56
Pemusnahan Uang (Triliun Rp)	-							
Nominal Transaksi RTGS (Triliun Rp)	43,95	32,73	28,31	28,81	39,66	31,37	29,2	38,5
Volume Transaksi RTGS (Transaksi)	22.683,00	18.125,00	14.142,00	15.402,00	19.120,00	17.280	13.730	18.460
Rata-Rata Harian Nominal Transaksi RTGS (Triliun Rp)	720,44	536,58	464,10	472,30	650,16	514,26	478,69	631,15
Rata-Rata Harian Volume Transaksi RTGS (Transaksi)	371,85	297,13	231,84	252,49	313,44	283,28	225,08	302,62
Volume Kliring Kredit (Transaksi)	46.930,00	51.483,00	39.455	40.455	47.314	53.807	36.039	41.276
Nominal Kliring Kredit (Triliun Rp)	2,70	2,77	2,38	2,54	3,004	3,116	1,983	2,48
Rata-Rata Harian Volume Kliring Kredit (Transaksi)	769,34	843,98	646,80	663,20	775,64	882,08	590,80	676,66
Rata-Rata Harian Nominal Kliring Kredit (Miliar Rp)	44,30	45,36	39,02	41,64	49,25	51,08	32,51	40,66
Volume Kliring Debet (Transaksi)	35.166,00	33.680,00	28.201	27.719	29.775	18.450	20.882	23.756
Nominal Kliring Debet (Triliun Rp)	1,69	1,64	1,35	1,42	1,41	0,884	1,05	1,24
Rata-Rata Harian Volume Kliring Debet (Transaksi)	576,49	552,13	462,31	454,41	488,11	302,46	342,33	389,44
Rata-Rata Harian Nominal Kliring Debet (Miliar Rp)	27,70	26,94	22,13	23,28	23,11	14,49	17,21	20,33

Perbankan

Indikator Perbankan	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Bank Umum										
Total Aset (Triliun Rp)	80,22	83,11	84,06	83,52	82,90	85,38	87,18	88,30	88,63	92,29
Pertumbuhan Total Aset (%yoy)	7,16	6,34	6,47	3,34	2,73	3,72	5,72	6,91	8,09	
DPK (Triliun Rp)	55,88	58,29	60,13	58,86	61,07	62,50	62,13	61,90	64,27	66,83
Giro	10,76	11,40	11,78	9,22	10,75	10,99	10,82	9,05	11,11	11,59
Tabungan	32,47	34,59	36,03	37,54	38,05	38,94	38,44	40,08	41,17	43,09
Deposito	12,63	12,29	12,32	12,11	12,27	12,57	12,87	12,76	11,99	12,14
Pertumbuhan DPK (%yoy)	3,41	9,08	9,19	6,92	9,29	7,23	3,33	5,16	5,24	6,93
Kredit (Triliun Rp)	65,94	68,26	69,84	70,23	69,71	71,05	72,47	73,75	73,94	75,64
Modal Kerja (Triliun Rp)	37,24	38,78	39,11	38,54	37,62	37,56	38,27	38,22	37,65	38,69
Investasi (Triliun Rp)	8,07	8,52	8,91	9,28	9,30	10,38	10,48	11,06	11,26	11,36
Konsumsi (Triliun Rp)	20,62	20,96	21,81	22,41	22,77	23,10	23,71	24,45	25,07	25,58
Pertumbuhan Kredit (%yoy)	3,38	1,19	9,64	8,04	5,72	4,08	3,77	5,01	6,07	6,47
LDR	119,96	118,99	118,81	120,61	115,28	114,74	116,70	119,14	115,11	113,19
Kredit UMKM (Triliun Rp)	29,91	30,98	31,51	31,06	25,46	31,01	31,17	31,09	31,40	31,65
Pertumbuhan Kredit UMKM (%yoy)	14,28	14,95	13,96	6,05	-14,88	0,10	-1,06	0,10	23,34	2,06
Total Kredit MKM (Triliun Rp)	48,12	48,50	49,49	50,03	50,43	50,78	51,18	51,18	51,18	51,18
Pertumbuhan Kredit MKM (%yoy)	8,79	7,35	7,40	5,87	4,80	4,70	3,41	2,29	1,49	0,79
NPL (%) gross	2,52	2,39	2,43	2,57	2,67	2,58	2,74	2,63	3,02	3,02



Perkembangan Ekonomi Makro Daerah



Secara umum, perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29% (yoy), sedikit melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,58% (yoy). capaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera yang sebesar 5,06% (yoy), dan sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang juga sebesar 5,29% (yoy) (Grafik 1.1). Secara nominal, perekonomian Lampung pada triwulan I 2026 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing tercatat sebesar Rp147,91T dan Rp80,07T.

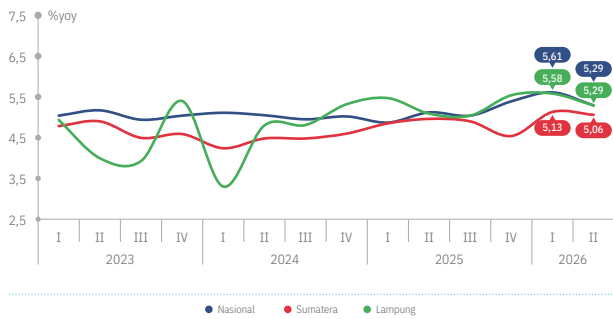


Pertumbuhan ekonomi Lampung triwulan II 2026 tetap ditopang oleh kuatnya permintaan domestik dan kinerja eksternal. Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 4,86% (yoy) dengan andil terbesar 2,91% terhadap PDRB, didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat selama HBKN Iduladha 2026. Investasi tumbuh 3,08% (yoy) sejalan dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, dan proyek swasta, sementara Konsumsi Pemerintah tetap tumbuh tinggi 12,80% (yoy) didorong oleh realisasi belanja dan keberlanjutan berbagai program strategis di daerah. Dari sisi eksternal, ekspor tumbuh 4,12% (yoy) dengan kontribusi 2,17%, terutama berasal dari peningkatan ekspor hasil penggilingan dan bahan bakar mineral, serta didukung oleh peningkatan impor bahan baku yang mencerminkan aktivitas industri yang tetap kuat.



Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan II 2026 terutama didukung oleh kinerja sektor sekunder dan tersier. Sektor sekunder didorong oleh LU Industri Pengolahan yang tumbuh 6,99% (yoy) serta LU Konstruksi yang tumbuh 6,57% (yoy), didukung oleh meningkatnya aktivitas industri pengolahan dan berlanjutnya pembangunan proyek pemerintah dan swasta. Sementara itu, sektor tersier turut menopang pertumbuhan melalui LU Perdagangan Besar dan Eceran yang tumbuh 7,98% (yoy). Di sisi lain, sektor primer mengalami perlambatan seiring moderasi LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh 2,97% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 9,89% (yoy), sejalan dengan berakhirnya periode panen raya pada triwulan sebelumnya.

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Sumatera dan Provinsi Lampung



Sumber: BPS, diolah

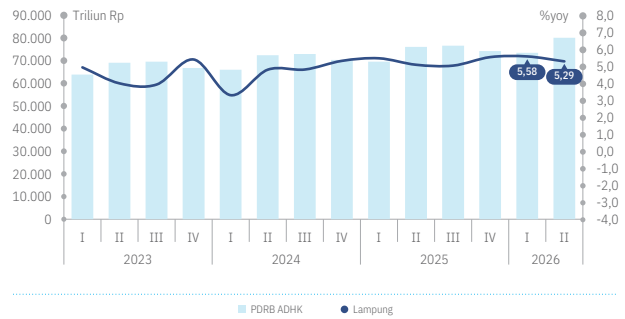
Secara umum, perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29% (yoy), sedikit melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,58% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera yang sebesar 5,06% (yoy), dan sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang juga sebesar 5,29% (yoy) (Grafik 1.1). Secara nominal, perekonomian Lampung pada triwulan I 2026 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing tercatat sebesar Rp147,91T dan Rp80,07T (Grafik 1.2).

1.1. Analisis PDRB Sisi Pengeluaran

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Lampung tetap ditopang oleh kuatnya permintaan domestik. Konsumsi Rumah Tangga (RT) dengan andil sebesar 2,91% (yoy) terhadap total PDRB Lampung pada triwulan II 2026 mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,86% (yoy), didorong oleh konsumsi makanan dan minuman, perumahan, rekreasi, dan barang pribadi, serta meningkatnya aktivitas masyarakat pada periode HBKN Iduladha 2026. Selanjutnya, Investasi dengan andil 0,95% (yoy) mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,08% (yoy) pada triwulan II 2026 didorong oleh kinerja investasi bangunan seiring keberlanjutan pembangunan jalan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), hingga berbagai proyek swasta. Konsumsi Pemerintah juga turut memberikan andil 0,72% (yoy) pada pertumbuhan ekonomi Lampung triwulan II 2026 dan mencatatkan pertumbuhan tinggi sebesar 12,80% (yoy) yang didukung oleh realisasi belanja operasional pemerintah, serta pelaksanaan berbagai program strategis di Provinsi Lampung.

Dari sisi eksternal, pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh kinerja ekspor yang memberikan andil sebesar 2,17% (yoy) dan mencatatkan pertumbuhan 4,12% (yoy) pada triwulan II 2026 terhadap perekonomian Lampung, didorong oleh peningkatan ekspor hasil penggilingan dan

Grafik 1.2. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung



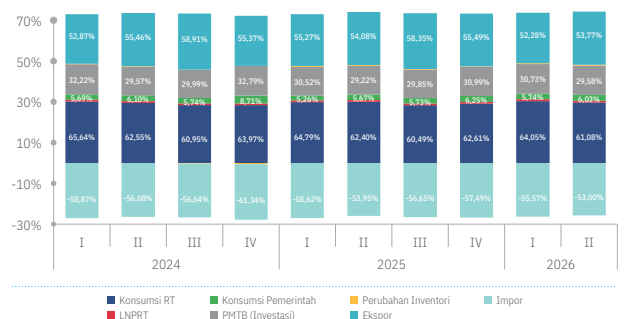
Sumber: BPS, diolah

bahan bakar mineral. Kinerja impor bahan baku penolong industri juga turut mencatatkan peningkatan, mengindikasikan kinerja industri yang baik di Provinsi Lampung.

Struktur PDRB Provinsi Lampung dari sisi permintaan pada triwulan II 2026 masih bertumpu pada komponen domestik, terutama Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi sebagai penopang utama perekonomian. Konsumsi Rumah Tangga menjadi komponen dengan distribusi terbesar sebesar 61,08% terhadap PDRB dan mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,86% (yoy), sehingga memberikan kontribusi pertumbuhan dengan andil sebesar 2,91% (yoy). Selanjutnya, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki pangsa sebesar 29,58% dengan pertumbuhan 3,08% (yoy) dan menyumbang 0,95% (yoy) terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung. Lebih lanjut, Konsumsi Pemerintah dengan share 6,03% tumbuh 12,80% (yoy), serta Konsumsi LNPR dengan share sebesar 1,75% tumbuh 7,89% (yoy).

Dari sisi kinerja eksternal, Ekspor dengan share sebesar 53,77% terhadap PDRB mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,12% (yoy), dengan andil terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 2,17% (yoy). Kinerja

Grafik 1.3. Distribusi PDRB Sisi Pengeluaran Provinsi Lampung



Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung - Sisi Pengeluaran

Komponen Pengeluaran (%year on year)	2024			2025				2026		Sumber Pertumbuhan Ekonomi Tw II 2026 (%)
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,69	4,95	5,05	5,06	4,67	4,94	5,10	5,54	4,86	2,91
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	13,55	9,32	6,58	2,30	4,67	5,59	6,31	9,11	7,89	0,13
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,39	2,81	2,16	-1,58	-2,13	4,00	-0,62	13,84	12,80	0,72
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,33	1,30	0,34	1,26	5,31	6,05	5,41	4,55	3,08	0,95
Ekspor	14,16	15,48	12,31	12,96	7,50	5,33	3,28	0,75	4,12	2,17
Impor	13,43	13,28	5,96	9,26	6,73	7,52	2,80	1,15	3,18	1,63
PDRB	4,80	4,81	5,32	5,47	5,09	5,04	5,54	5,58	5,29	5,29

Sumber: Badan Pusat Statistik

ekspor didorong oleh peningkatan ekspor hasil penggilingan dan bahan bakar mineral. Sementara itu, Impor dengan distribusi -53,00% terhadap PDRB, mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,18% (yoy) dan memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 1,63% (yoy).

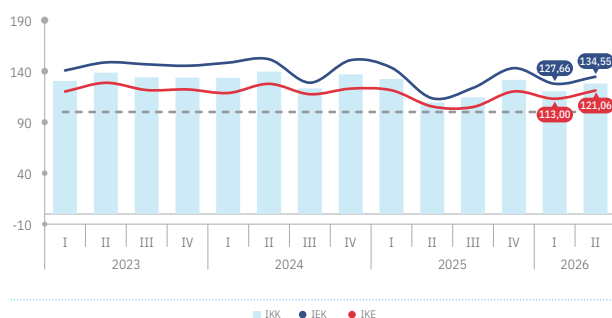
1.1.1. Konsumsi Rumah Tangga (RT)

Kinerja Konsumsi Rumah Tangga (RT) Provinsi Lampung pada Triwulan II 2026 tetap tumbuh positif, didukung oleh meningkatnya optimisme masyarakat, daya beli yang terjaga, serta aktivitas konsumsi rumah tangga yang tetap kuat utamanya pada momen HBKN Iduladha 2026. Pada triwulan II 2026, Konsumsi RT mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,86% (yoy) dan menjadi komponen dengan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung, yakni sebesar 2,91% (yoy). Perkembangan tersebut sejalan dengan meningkatnya keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada pada zona optimis sebesar 127,80 pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 120,33. Peningkatan optimisme tersebut didukung oleh membaiknya persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi ekonomi ke depan, tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) sebesar

121,06 dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) sebesar 134,55.

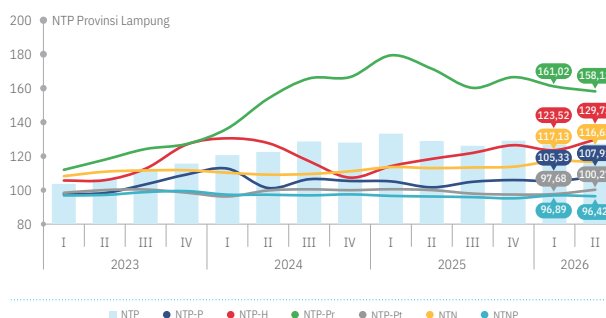
Lebih lanjut, daya beli masyarakat pada sektor utama Provinsi Lampung, khususnya lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, tetap terjaga. Hal tersebut tercermin dari perkembangan Indeks Harga yang Diterima Petani Tanaman Pangan (NTP-P (It)) yang meningkat menjadi 138,69 pada triwulan II 2026 dari 133,36 pada triwulan sebelumnya. Pada periode yang sama, NTP-P (It) juga tercatat lebih tinggi dibandingkan Indeks Harga yang Dibayar Petani Tanaman Pangan (NTP-P (Ib)) sebesar 128,51. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan harga yang harus dibayarkan, sehingga mengindikasikan membaiknya daya beli petani tanaman pangan. Peningkatan aktivitas konsumsi rumah tangga juga tercermin dari konsumsi energi masyarakat yang mengalami penguatan. Konsumsi listrik rumah tangga pada triwulan II 2026 yang tercatat tumbuh 14,57% (yoy) menjadi 941 juta kWh dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 878 juta kWh (Grafik 1.6). Perkembangan tersebut mengindikasikan meningkatnya aktivitas rumah tangga serta penggunaan energi untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Grafik 1.4. Indeks Keyakinan Konsumen



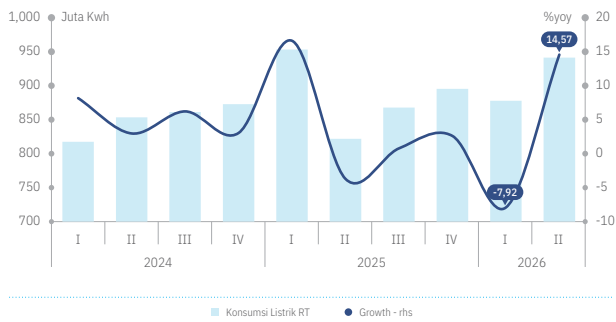
Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.5. Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung



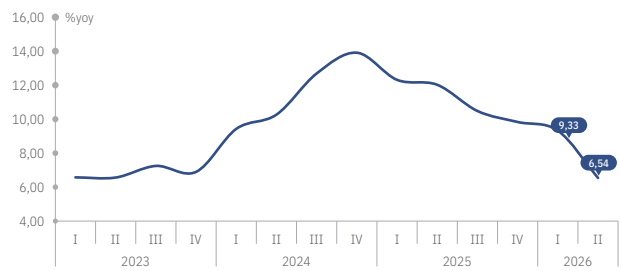
Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.6. Perkembangan Konsumsi Listrik Rumah Tangga



Sumber: PLN, diolah

Grafik 1.7. Pertumbuhan Penyaluran Kredit Konsumsi



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit konsumsi tetap berada pada level tinggi. Kredit konsumsi perorangan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp29,61 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 6,54% (yoy), sehingga tetap mendukung aktivitas konsumsi masyarakat. Sementara itu, struktur pengeluaran rumah tangga menunjukkan porsi konsumsi sebesar 65,20%, sedangkan porsi tabungan tercatat sebesar 22,97%.

1.1.2. Konsumsi Pemerintah

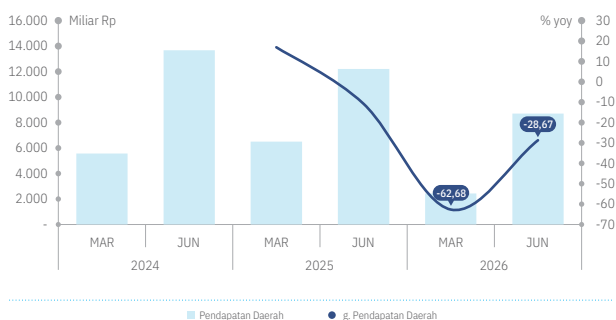
Kinerja konsumsi pemerintah di Provinsi Lampung pada Triwulan II 2026 tetap tumbuh tinggi sebesar 12,80% (yoy), meskipun sedikit melambat dibandingkan Triwulan I 2026 yang tumbuh 13,84% (yoy). Pertumbuhan tersebut menunjukkan masih kuatnya peran pemerintah dalam menopang aktivitas ekonomi daerah, serta akselerasi pelaksanaan berbagai program strategis Pemerintah Pusat di wilayah Lampung. Dari sisi fiskal, dukungan terhadap aktivitas konsumsi pemerintah tercermin dari kinerja APBN Regional Lampung pada Triwulan II 2026 yang menunjukkan penguatan pada sisi penerimaan dan relatif stabil dari sisi belanja.

Hingga Juni 2026, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp6.198,71 miliar atau mencapai 46,21% dari

target, tumbuh 19,52% (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kinerja penerimaan perpajakan yang mencapai Rp5.462,16 miliar atau tumbuh 22,38% (yoy), serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp736,55 miliar. Dari sisi belanja, realisasi Belanja Negara mencapai Rp14.594,09 miliar atau 52,18% dari pagu. **Kinerja Belanja Pemerintah Pusat** tercatat tumbuh 37,68% (yoy), didukung oleh peningkatan pada seluruh komponen utama belanja, yaitu Belanja Pegawai yang tumbuh 29,16% (yoy), Belanja Barang sebesar 27,23% (yoy), serta Belanja Modal yang meningkat signifikan sebesar 365,35% (yoy), sejalan dengan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah di daerah.

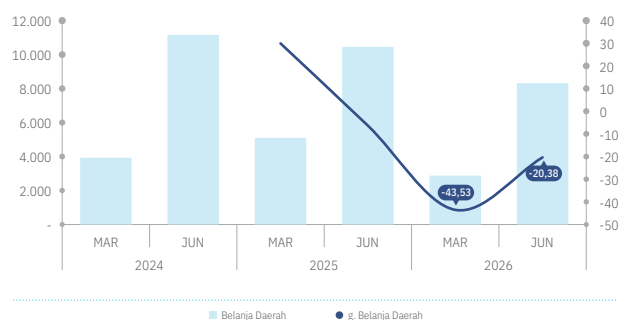
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp9.673,82 miliar atau 54,12% dari pagu, meskipun masih mengalami kontraksi 13,84% (yoy) akibat penyesuaian penyaluran beberapa komponen transfer, terutama Dana Bagi Hasil dan Dana Desa. Secara keseluruhan, kinerja APBN Regional Lampung hingga Semester I 2026 menunjukkan dukungan fiskal yang tetap kuat terhadap perekonomian daerah, tercermin dari pertumbuhan konsumsi pemerintah yang masih berada pada level tinggi di tengah dinamika ekonomi global dan proses konsolidasi fiskal.

Grafik 1.8. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung

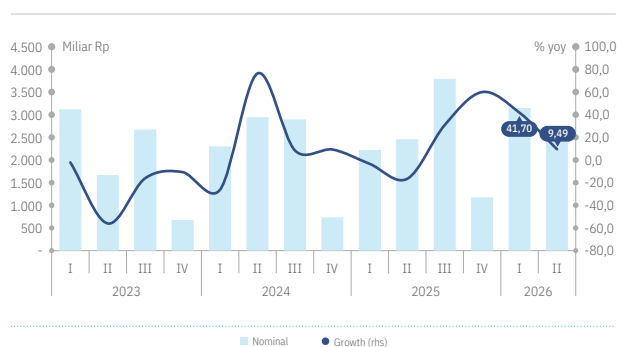


Sumber: Kementerian Keuangan – DJPK, diolah

Grafik 1.9. Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Lampung



Sumber: DJPK dan Kanwil DJPb Provinsi Lampung, diolah

Grafik 1.10. DPK Pemerintah Daerah


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Hingga Juni 2026, Pendapatan Daerah masih terkontraksi 28,67% (yoy), membaik bila dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi 62,68% (yoy). Perbaikan tersebut terutama didorong oleh peningkatan penerimaan pajak daerah yang tumbuh 11,49% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 70,60% (yoy), serta lebih tinggi dibandingkan sama tahun sebelumnya yang tumbuh 2,29% (yoy).

Dari sisi belanja, kinerja Belanja Daerah pada triwulan II 2026 juga mengalami perbaikan meskipun masih tercatat kontraksi sebesar 20,38% (yoy), membaik bila dibandingkan triwulan I 2026 yang terkontraksi 43,53% (yoy). Perbaikan tersebut utamanya didorong oleh pertumbuhan belanja bagi hasil.

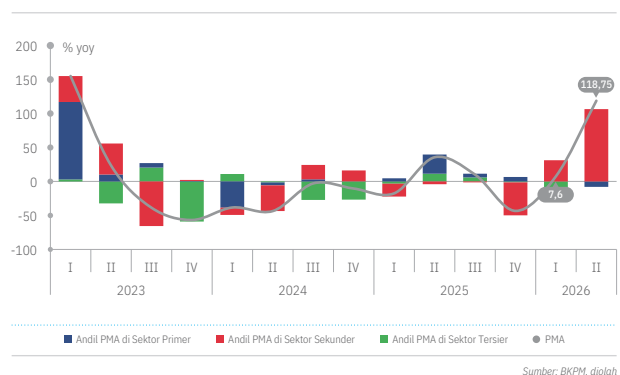
Sejalan dengan penguatan pendapatan dan belanja daerah, Dana Pemerintah ke Daerah (DPK) di Provinsi Lampung juga menunjukkan peningkatan pada triwulan II 2026. Realisasi DPK tercatat tumbuh 38,75% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh 21,39% (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh percepatan realisasi transfer dari Pemerintah Pusat yang mencapai Rp5.671,18 miliar pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perkembangan ini mencerminkan semakin kuatnya dukungan transfer fiskal dalam menopang kapasitas belanja pemerintah daerah dan pelaksanaan berbagai program pembangunan di Provinsi Lampung.

1.1.3. Investasi

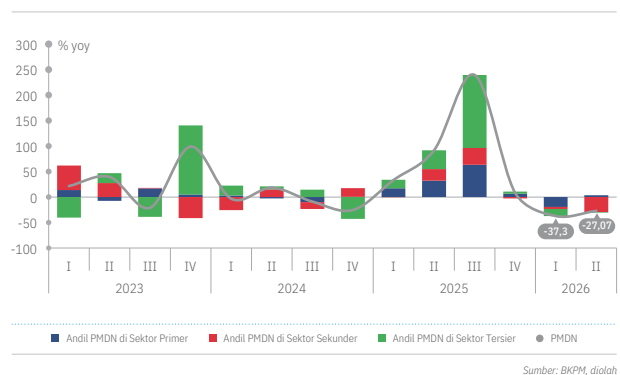
Kinerja investasi Provinsi Lampung pada triwulan II 2026 tetap tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan. Pertumbuhan Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) Provinsi Lampung tercatat sebesar 3,08% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,39% (yoy). Perlambatan tersebut terjadi di tengah penguatan investasi baik dari sisi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam

Negeri (PMDN). Kinerja PMA tumbuh signifikan sebesar 118,75% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh 7,60% (yoy), sementara PMDN menunjukkan perbaikan meski masih terkontraksi sebesar 27,07% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi 37,28% (yoy).

Secara sektoral, kinerja PMA didorong oleh akselerasi pertumbuhan sektor sekunder yang mencapai 230,62% (yoy). Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh realisasi investasi pada industri makanan dan industri kayu, yang mencerminkan semakin kuatnya minat investor asing terhadap pengembangan industri pengolahan serta hilirisasi komoditas unggulan Lampung. Selain itu, sektor sekunder secara keseluruhan mencatatkan pertumbuhan tinggi sebesar 103,06% (yoy), didukung oleh peningkatan investasi yang signifikan pada sektor transportasi, perdagangan, dan telekomunikasi, sejalan dengan penguatan kebutuhan terhadap infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi. Di sisi lain, meskipun masih mengalami kontraksi sebesar 23,05% (yoy), kinerja sektor primer menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Perbaikan tersebut didorong oleh tingginya pertumbuhan investasi pada sektor perikanan, serta membaiknya kinerja investasi pada sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan.

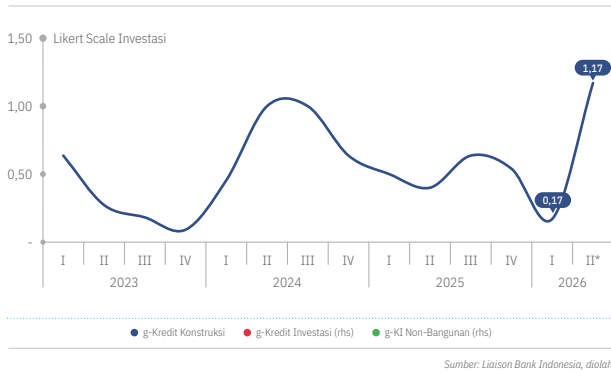
Grafik 1.11. Penanaman Modal Asing di Provinsi Lampung


Sumber: BKPM, diolah

Grafik 1.12. Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Lampung


Sumber: BKPM, diolah

Grafik 1.13. Perkembangan Likert Scale Investasi



Lebih lanjut, kinerja Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Lampung pada triwulan II 2026 menunjukkan perbaikan, meskipun masih berada dalam fase kontraksi sebesar 27,07% (yoy). Perbaikan tersebut ditopang oleh meningkatnya kinerja investasi pada sektor primer dan tersier, di tengah masih terkontraksinya investasi pada sektor sekunder. Sektor primer mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 17,13% (yoy) setelah mengalami kontraksi yang cukup dalam pada triwulan sebelumnya. Peningkatan kinerja sektor primer didukung oleh tetap kuatnya investasi pada sektor perikanan, serta membaiknya kinerja investasi pada sektor pertambangan. Sementara itu, kinerja sektor tersier didorong oleh pertumbuhan investasi pada sektor jasa lainnya dan sektor konstruksi.

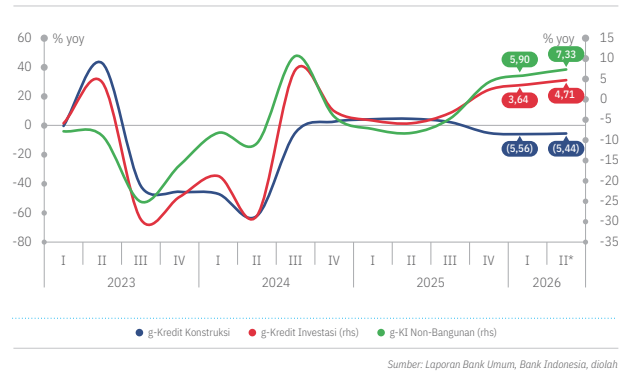
Lebih lanjut, tetap kuatnya kinerja investasi Lampung pada triwulan II 2026 tercermin dari hasil liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung. *Likert scale* investasi mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,17 dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,17 (Grafik 1.13).

Kredit investasi pada triwulan II 2026 juga menunjukkan peningkatan. Kredit investasi mencatatkan pertumbuhan 4,71% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,64% (yoy). **Kinerja kredit konstruksi juga kembali menunjukkan perbaikan.** Meski masih terkontraksi 5,44% (yoy), namun kinerja penyaluran kredit konstruksi tersebut membaik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 5,86% (yoy) (Grafik 1.14).

1.1.4. Ekspor dan Impor

Kinerja ekspor Provinsi Lampung pada triwulan II 2026 menunjukkan penguatan setelah mengalami tekanan pada triwulan sebelumnya. Nilai ekspor luar negeri Provinsi Lampung pada triwulan II 2026 tercatat sebesar

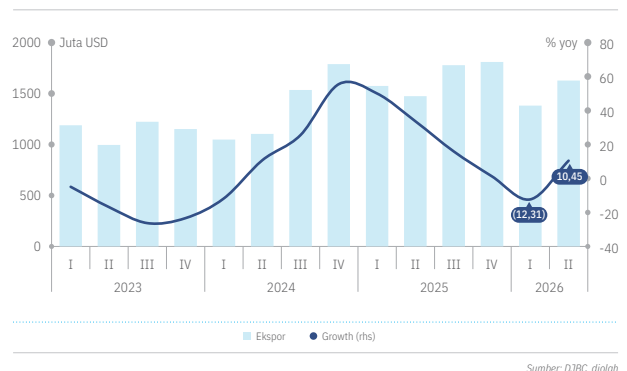
Grafik 1.14. Kredit Investasi



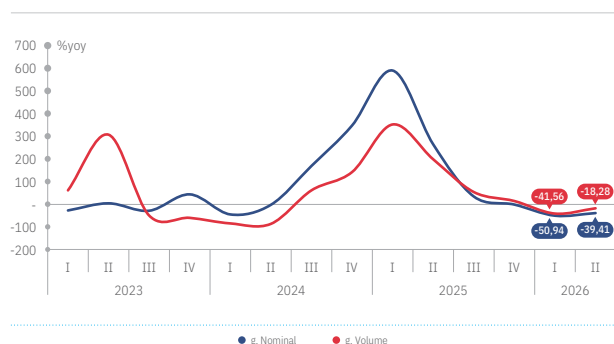
USD1.628,15 juta, tumbuh 10,45% (yoy), berbalik arah dari triwulan I 2026 yang terkontraksi 12,31% (yoy). Peningkatan kinerja ekspor terutama didorong oleh penguatan beberapa komoditas utama Lampung, yaitu lemak dan minyak hewan/nabati, bahan bakar mineral, serta kopi, teh, dan rempah-rempah. Perbaikan tersebut turut didukung oleh peningkatan harga komoditas global, terutama harga CPO dunia yang mencapai USD1.130,05/mt pada triwulan II 2026 atau tumbuh 19,70% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang masih terkontraksi 0,79% (yoy).

Komoditas lemak dan minyak hewan/nabati menjadi salah satu pendorong utama peningkatan ekspor Lampung pada triwulan II 2026. Nilai ekspor kelompok komoditas tersebut mencapai USD695,03 juta, meningkat dengan pertumbuhan sebesar 15,77% (yoy) setelah pada triwulan I 2026 mengalami kontraksi 1,67% (yoy). Penguatan tersebut didukung oleh peningkatan volume ekspor yang mencapai 97,22 ribu ton, tumbuh 13,41% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 2,35% (yoy). Perbaikan ekspor CPO juga sejalan dengan meningkatnya harga CPO global, sehingga memberikan dukungan terhadap peningkatan nilai ekspor komoditas CPO. **Selanjutnya, kinerja ekspor bahan bakar mineral mengalami akselerasi pada triwulan II 2026.**

Grafik 1.15. Perkembangan Ekspor Luar Negeri Non Migas Provinsi Lampung



Grafik 1.16. Perkembangan Nominal dan Volume Ekspor Kopi, Teh, dan Rempah-rempah

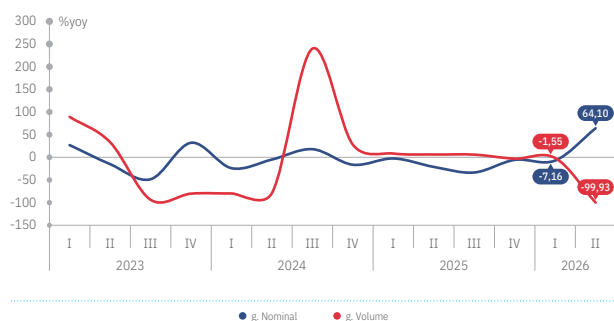


Sumber: DJBC, diolah

Nilai ekspor bahan bakar mineral tercatat sebesar USD277,09 juta, tumbuh 64,10% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2026 yang berkontraksi 7,16% (yoy). Di sisi harga, harga batu bara global menunjukkan perbaikan dibandingkan periode sebelumnya.

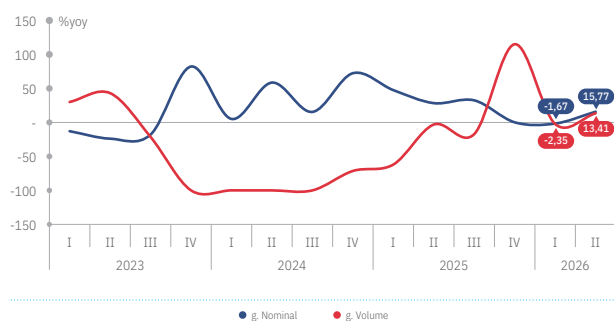
Kinerja ekspor kelompok kopi, teh, dan rempah-rempah juga menunjukkan pemulihan setelah mengalami kontraksi cukup dalam pada triwulan sebelumnya. Nilai ekspor kelompok komoditas tersebut meningkat menjadi USD228,19 juta pada triwulan II 2026 meskipun masih berkontraksi 39,41% (yoy), setelah sebelumnya berkontraksi 50,94% (yoy) pada triwulan I 2026.

Grafik 1.17. Perkembangan Nominal dan Volume Ekspor Bahan Bakar Mineral



Sumber: DJBC, diolah

Grafik 1.19. Perkembangan Ekspor Lemak Dan Minyak Hewan/Nabati



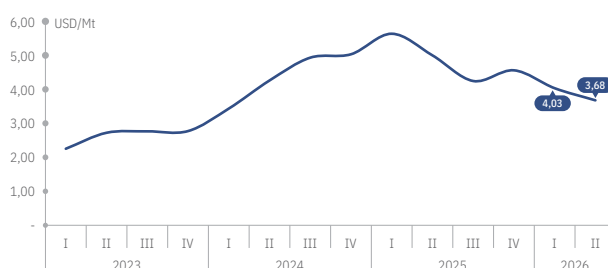
Sumber: DJBC, diolah

Pemulihan tersebut juga tercermin dari volume ekspor dari yang sebelumnya berkontraksi -41,56% (yoy) menjadi -18,28% (yoy). Namun demikian, tekanan harga masih terjadi pada komoditas kopi robusta, tercermin dari harga kopi robusta global yang masih berkontraksi 26,47% (yoy). Dengan demikian, peningkatan nilai ekspor kelompok komoditas ini lebih banyak didorong oleh pemulihan volume pengiriman dibandingkan peningkatan harga.

Dari sisi impor, realisasi impor luar negeri Provinsi Lampung pada triwulan II 2026 mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi dan aktivitas produksi domestik. Nilai impor tercatat sebesar USD501,38 juta, tumbuh 75,49% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh 25,84% (yoy). Dari sisi volume, total impor mencapai 590,77 ribu ton, tumbuh 5,56% (yoy) setelah sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 3,39% (yoy).

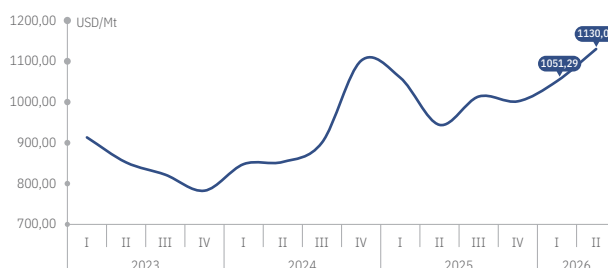
Peningkatan impor terutama didorong oleh kenaikan impor bahan baku penolong dan barang konsumsi. Impor bahan baku penolong mencatatkan nilai sebesar USD310,43 juta dengan pertumbuhan 13,33% (yoy), serta peningkatan volume menjadi 577,20 ribu ton atau tumbuh 4,17% (yoy). Perkembangan tersebut mencerminkan meningkatnya kebutuhan input produksi

Grafik 1.18. Perkembangan Harga Komoditas Kopi



Sumber: World Bank, diolah

Grafik 1.20. Perkembangan Harga CPO Dunia



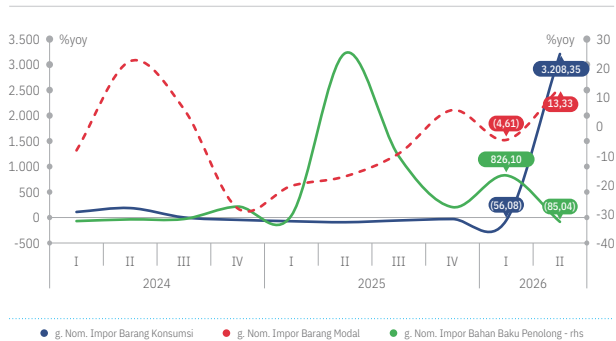
Sumber: Bank Dunia, diolah

Grafik 1.21. Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri Non Migas Provinsi Lampung



Sumber: DJBC, diolah

Grafik 1.23. Perkembangan Nominal Impor



Sumber: DJBC, diolah

untuk mendukung aktivitas industri dan kegiatan ekonomi domestik. Beberapa komoditas bahan baku strategis yang mengalami peningkatan antara lain residu industri makanan dan produk kimia tertentu yang mendukung kebutuhan sektor industri pengolahan. **Sementara itu, impor barang konsumsi mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada triwulan II 2026.** Nilai impor barang konsumsi tercatat sebesar USD163,63 juta, dengan volume mencapai 8,44 ribu ton atau tumbuh 112,22% (yoy). Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya penguatan kebutuhan pasokan barang konsumsi masyarakat pada periode berjalan.

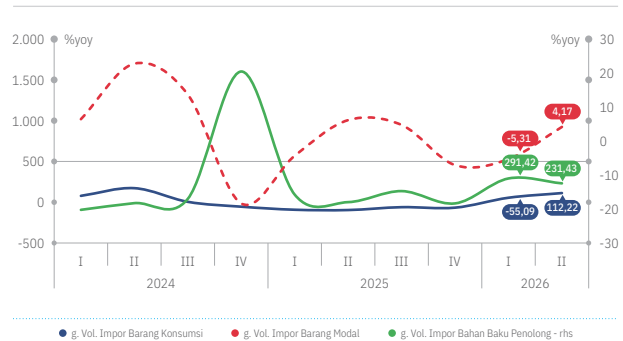
Di sisi lain, impor barang modal masih mengalami kontraksi pada triwulan II 2026. Nilai impor barang modal tercatat sebesar USD40,98 juta, terkontraksi 85,04% (yoy), dengan volume sebesar 5,12 ribu ton. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan impor pada triwulan II 2026 lebih banyak berasal dari kebutuhan konsumsi dan bahan baku produksi dibandingkan pengadaan barang modal untuk ekspansi kapasitas usaha.

Grafik 1.22. Perkembangan Volume Impor Luar Negeri Non Migas Provinsi Lampung



Sumber: DJBC, diolah

Grafik 1.24. Perkembangan Volume Impor

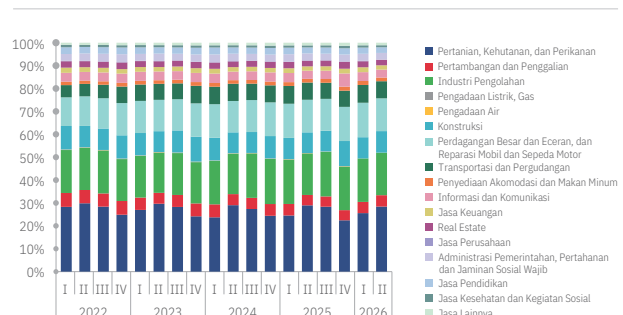


Sumber: DJBC, diolah

1.2. Analisis PDRB Sisi Lapangan Usaha

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan II 2026 terutama didukung oleh kinerja sektor sekunder dan tersier. Pada sektor sekunder, penguatan terutama didorong oleh LU Industri Pengolahan yang tumbuh sebesar 6,99% (yoy), sejalan dengan meningkatnya aktivitas industri pengolahan, khususnya industri makanan yang didukung oleh pengolahan komoditas unggulan Lampung. Selain itu, LU Konstruksi juga tumbuh sebesar 6,57% (yoy), didukung oleh berlanjutnya aktivitas pembangunan proyek pemerintah dan swasta. Sementara itu, sektor tersier turut menopang pertumbuhan ekonomi melalui

Grafik 1.25. Pangsa PDRB Lapangan Usaha



Sumber: BPS, diolah

Tabel 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung - Sisi Lapangan Usaha

Lapangan Usaha (%year on year)	2024			2025				2026		Sumber Pertumbuhan Tw II 26' (%)
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,21	-1,10	3,62	5,44	1,89	7,74	5,65	9,89	2,97	0,79
Pertambangan dan Penggalian	6,01	2,78	-0,04	-3,32	3,00	-1,71	-2,48	-1,91	2,52	0,11
Industri Pengolahan	4,78	10,67	14,16	8,75	9,97	4,74	6,54	3,28	6,99	1,23
Pengadaan Listrik, Gas	-9,98	-4,61	4,71	7,23	-4,71	-6,85	-5,58	1,83	10,30	0,01
Pengadaan Air	0,28	0,15	1,59	4,93	2,50	-0,13	2,98	-3,85	2,64	0,00
Konstruksi	8,22	0,64	-3,38	0,96	6,14	6,96	8,32	4,96	6,57	0,66
Perdagangan Besar & Eceran dan Reparasi Mobil & Sepeda Motor	5,36	7,87	7,02	6,46	7,33	3,98	3,97	6,91	7,98	1,16
Transportasi dan Pergudangan	14,87	10,29	4,06	8,20	7,52	4,62	8,41	6,11	5,16	0,36
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,77	5,57	6,22	7,29	8,06	7,35	8,58	12,43	5,96	0,10
Informasi dan Komunikasi	6,26	9,37	9,54	7,83	3,66	4,33	2,46	3,23	4,91	0,27
Jasa Keuangan	9,12	3,22	-0,35	3,43	1,14	3,23	16,46	10,46	6,13	0,11
Real Estate	6,29	7,19	4,01	6,76	2,83	0,38	5,95	1,03	6,36	0,17
Jasa Perusahaan	9,44	9,10	8,53	3,79	7,46	1,34	4,56	4,21	5,07	0,01
Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7,00	5,37	0,74	0,87	-1,18	3,23	6,39	2,01	4,80	0,14
Jasa Pendidikan	0,24	0,88	1,19	2,20	2,17	1,80	1,23	0,23	1,54	0,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,26	9,23	6,63	7,84	-0,03	2,51	-0,76	2,50	6,57	0,07
Jasa Lainnya	9,89	9,50	13,85	9,66	9,18	3,40	7,60	8,39	4,17	0,05
PDRB	4,80	4,81	5,32	5,47	5,09	5,04	5,54	5,58	5,29	5,29

Sumber: BPS, diolah

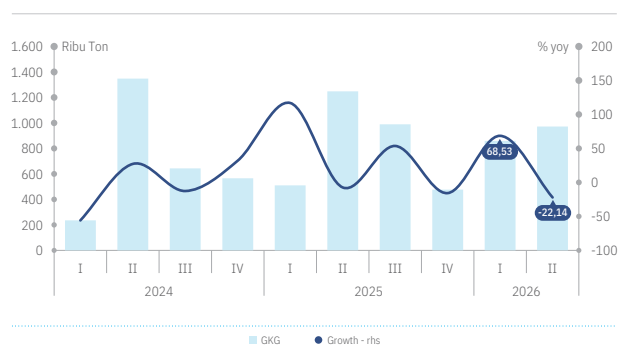
kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran yang tumbuh sebesar 7,98% (yoy). Di sisi lain, sektor primer mengalami perlambatan seiring moderasi kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 2,97% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,89% (yoy). Perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh berakhirnya periode panen raya yang berlangsung pada triwulan sebelumnya.

PDRB Provinsi Lampung pada triwulan II 2026 masih didominasi oleh tiga LU utama, yaitu LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; LU Industri Pengolahan; serta LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang masing-masing berkontribusi sebesar 28,35%; 18,56%; dan 14,27% terhadap PDRB. Ketiga LU tersebut memiliki peran dominan dalam perekonomian Provinsi Lampung dengan total kontribusi mencapai 61,18% terhadap PDRB.

1.2.1. LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kinerja Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Provinsi Lampung pada triwulan II 2026 tetap tumbuh positif, meskipun mengalami perlambatan sejalan dengan normalisasi produksi tanaman pangan pascapuncak panen raya pada

triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2026, LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 2,97% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,89% (yoy). Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh moderasi produksi tanaman pangan setelah periode panen raya. Produksi Gabah Kering Giling (GKG) Provinsi Lampung berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) BPS pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 971,13 ribu ton, dengan pertumbuhan sebesar -22,14% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 68,53% (yoy). Sementara itu, produksi ubi kayu tercatat

Grafik 1.26. Produksi Gabah Kering Giling

Sumber: BPS, diolah

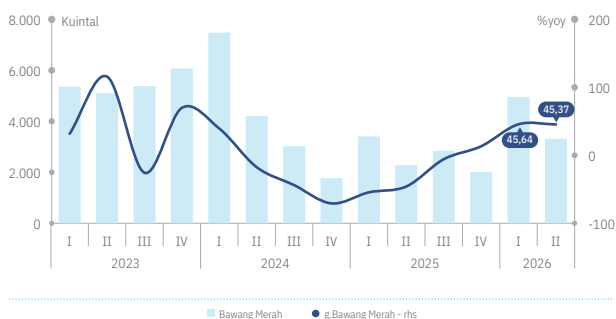
mengalami peningkatan secara level menjadi 1.058,77 ribu ton, meskipun pertumbuhannya masih berkontraksi sebesar -33,58% (yoy).

Lebih lanjut, kinerja komoditas hortikultura menunjukkan perkembangan yang beragam. Produksi bawang merah pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 3.315,90 kuintal atau tumbuh sebesar 45,37% (yoy), relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 45,64% (yoy). Produksi cabai besar juga mencatatkan peningkatan kinerja dengan produksi sebesar 72.580,48 kuintal dan tumbuh sebesar 28,98% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,01% (yoy). Sementara itu, produksi cabai rawit masih mengalami kontraksi dengan produksi sebesar 32.309,20 kuintal dan pertumbuhan sebesar

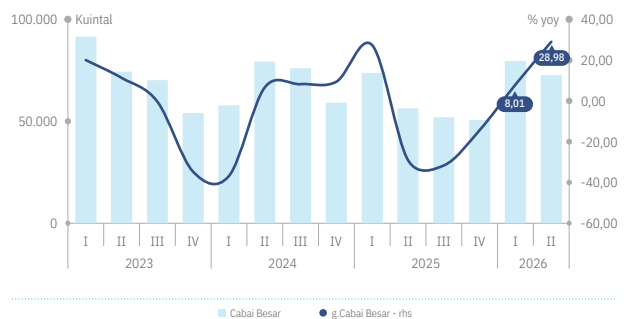
-10,67% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi -3,40% (yoy).

Dari sisi kondisi usaha tani, tingkat kesejahteraan petani relatif terjaga meskipun dibayangi risiko cuaca. Rata-rata Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 132,88, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 132,04. Di sisi lain, indikator *Southern Oscillation Index* (SOI) menurun dari 9,93 pada triwulan I 2026 menjadi -16,81 pada triwulan II 2026, yang mengindikasikan meningkatnya risiko kondisi cuaca yang lebih kering dan berpotensi memengaruhi ketersediaan air, pola tanam, serta biaya pengairan. Namun demikian, peningkatan NTUP mengindikasikan bahwa kondisi usaha tani petani masih relatif terjaga pada periode laporan.

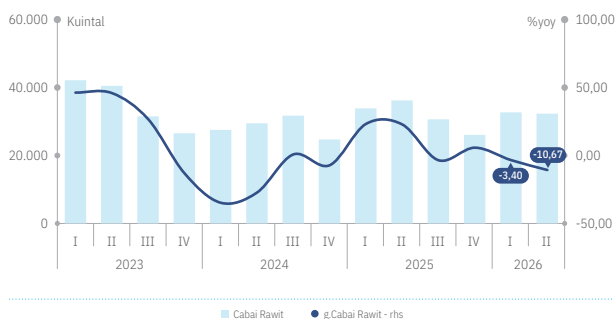
Grafik 1.27. Produksi Bawang Merah



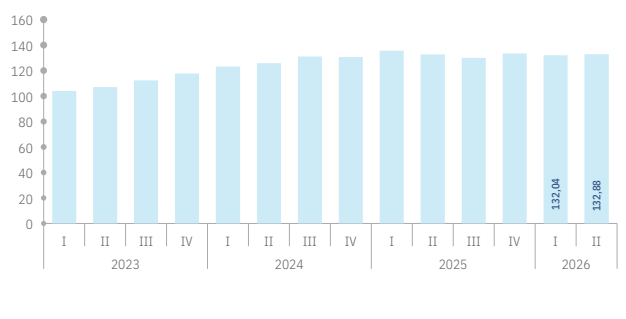
Grafik 1.28. Produksi Cabai Besar



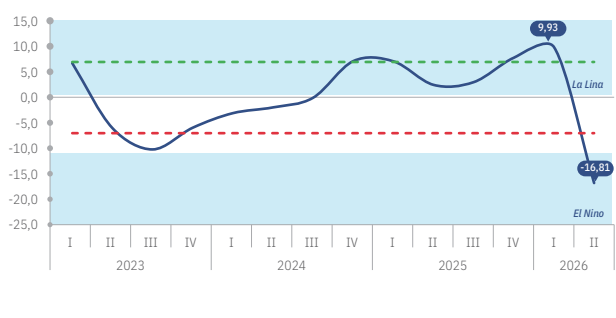
Grafik 1.29. Produksi Cabai Rawit



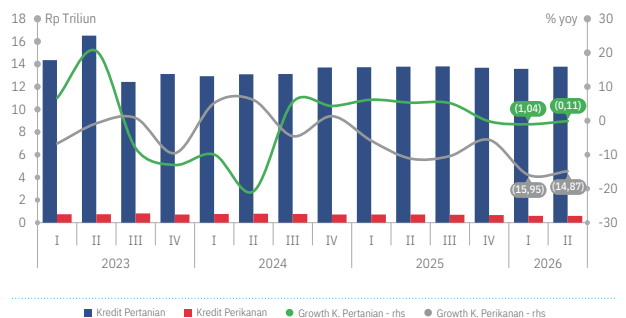
Grafik 1.30. Nilai Tukar Usaha Pertanian



Grafik 1.31. Southern Oscillation Index



Grafik 1.32. Kredit LU Pertanian

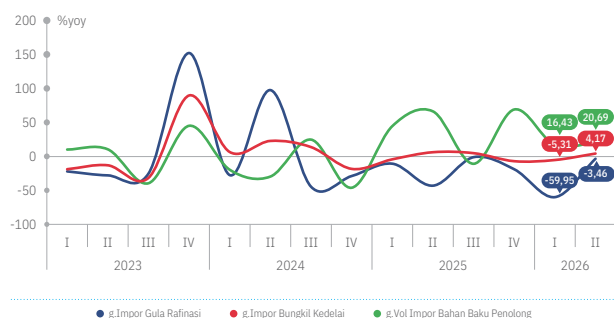


Dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit pada sektor pertanian relatif stabil. Pada triwulan II 2026, kredit LU Pertanian tercatat sebesar Rp13,77 triliun, dengan pertumbuhan sebesar -0,11% (yoy), sedikit membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi -1,04% (yoy). Lebih lanjut, penyaluran kredit pada sektor perikanan masih mengalami kontraksi, dengan posisi kredit sebesar Rp605,05 miliar dan pertumbuhan sebesar -14,87% (yoy), meskipun demikian, tekanan kontraksi pada triwulan II membaik dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -15,95% (yoy).

1.2.2. LU Industri Pengolahan

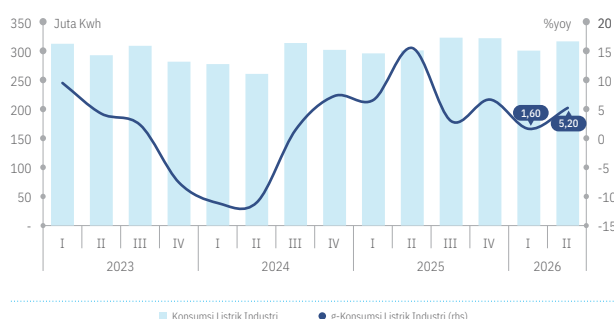
LU Industri Pengolahan Provinsi Lampung mencatatkan penguatan kinerja pada triwulan II 2026. Pada triwulan II 2026, LU Industri Pengolahan tumbuh sebesar 6,99% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,28% (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh penguatan aktivitas industri pengolahan, khususnya industri makanan yang didukung oleh meningkatnya pengolahan komoditas unggulan Lampung. Perbaikan kinerja industri juga tercermin dari peningkatan aktivitas bahan baku industri, tercermin dari volume impor bungkil kedelai yang tumbuh sebesar 20,69% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh

Grafik 1.33. Pertumbuhan Volume Impor Bahan Baku Industri



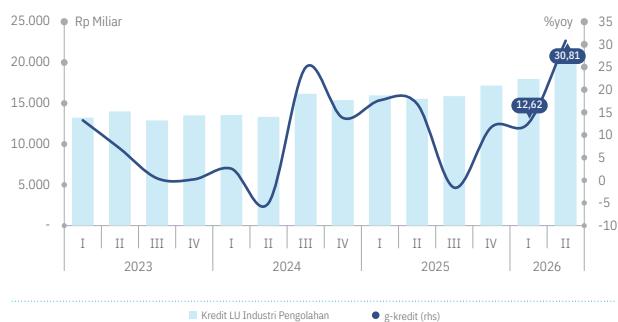
Sumber: DJBC, diolah

Grafik 1.34. Pertumbuhan Konsumsi Listrik Industri



Sumber: PT PLN, diolah

Grafik 1.35. Pertumbuhan Kredit LU Industri Pengolahan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

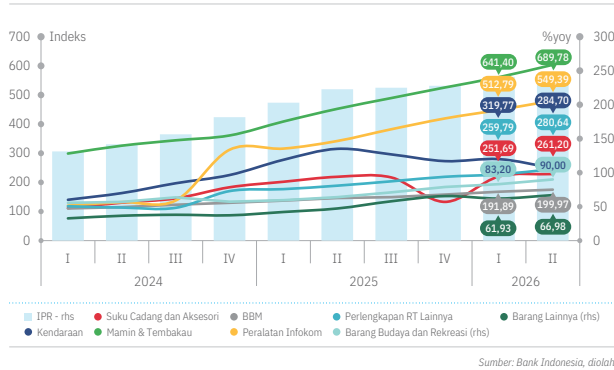
16,43% (yoy). Selain itu, volume impor bahan baku penolong membaik dengan tumbuh 4,17% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya berkontraksi 5,31% (yoy). Selanjutnya, volume impor gula rafinasi meski masih mengalami kontraksi sebesar -3,46% (yoy), namun membaik signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 59,95% (yoy).

Lebih lanjut, meningkatnya penyaluran kredit juga turut mencerminkan kuatnya aktivitas LU Industri Pengolahan di Lampung. Realisasi penyaluran kredit LU Industri Pengolahan mencatatkan pertumbuhan sebesar 30,81% (yoy) pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 12,62% (yoy). Di sisi lain, konsumsi listrik industri Provinsi Lampung juga tetap tumbuh positif 5,20% (yoy) meski melambat jika dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 6,92% (yoy).

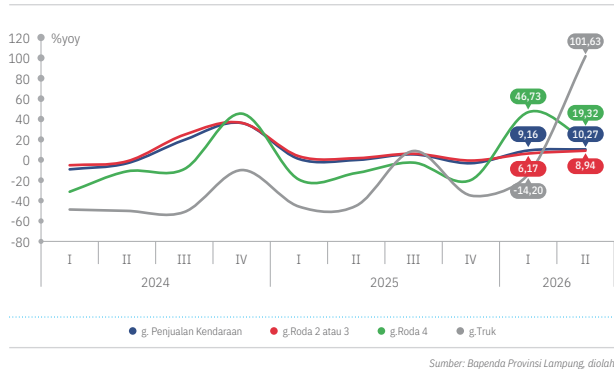
1.2.3. LU Perdagangan Besar dan Eceran

Tingginya aktivitas perdagangan dan permintaan masyarakat mendorong penguatan kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran (PBE) Provinsi Lampung pada triwulan II 2026. LU PBE mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,98% (yoy) pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,91% (yoy). Penguatan tersebut sejalan dengan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat, yang tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Provinsi Lampung yang meningkat menjadi 242,57 pada triwulan II 2026, dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 240,84. Peningkatan IPR terutama didukung oleh perbaikan pada beberapa kelompok barang, antara lain makanan dan tembakau, suku cadang dan aksesoris, bahan bakar kendaraan bermotor, peralatan informasi dan komunikasi, serta perlengkapan rumah tangga lainnya.

Grafik 1.36. Perkembangan Indeks Penjualan Riil Lampung



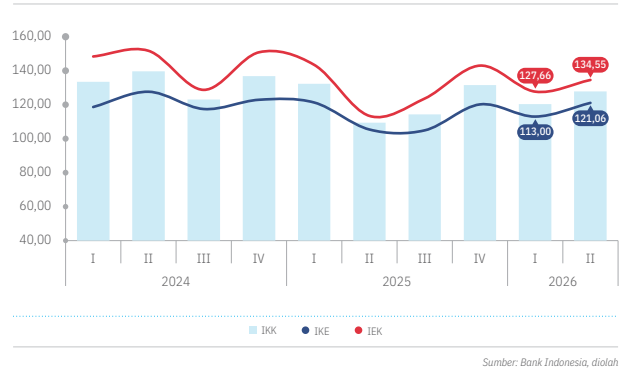
Grafik 1.38. Perkembangan Penjualan Kendaraan



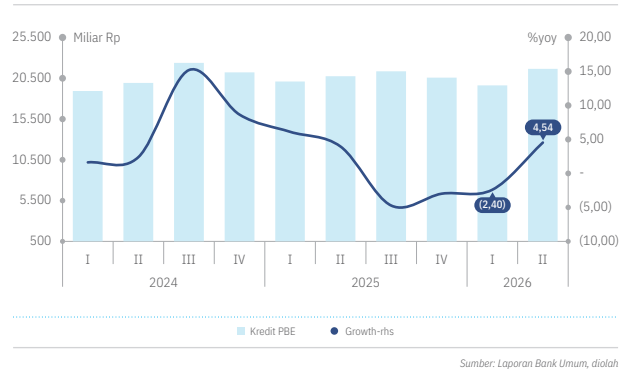
Penguatan kinerja LU PBE juga didukung oleh peningkatan optimisme konsumen. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Provinsi Lampung pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 127,80, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 120,33, dan tetap berada pada level optimis. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi ke depan, tercermin dari peningkatan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) menjadi 121,06 dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) menjadi 134,55.

Lebih lanjut, penjualan kendaraan bermotor tetap menunjukkan kinerja positif pada triwulan II 2026. Total penjualan kendaraan bermotor di Provinsi Lampung tumbuh sebesar 10,27% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,16% (yoy). Peningkatan tersebut terutama didukung oleh kinerja penjualan kendaraan roda dua/roda tiga yang menunjukkan peningkatan. **Perkembangan transaksi perdagangan digital juga tetap kuat.** Aktivitas *e-commerce* pada triwulan II 2026 tercermin dari pertumbuhan volume transaksi sebesar 13,61% (yoy) dan pertumbuhan nominal transaksi sebesar 20,25% (yoy), menunjukkan tetap kuatnya aktivitas konsumsi masyarakat melalui kanal digital.

Grafik 1.37. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Lampung



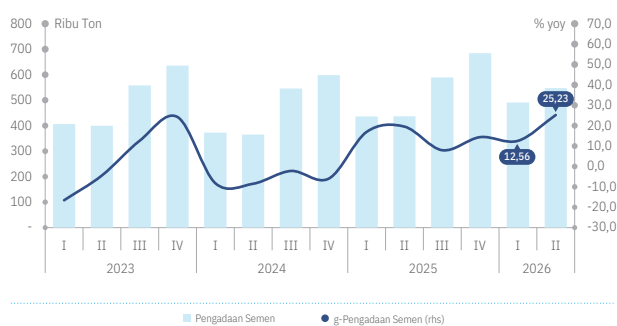
Grafik 1.39. Kredit LU PBE



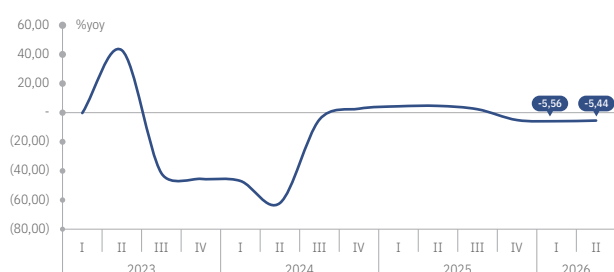
1.2.4. LU Konstruksi

Kinerja LU Konstruksi Provinsi Lampung mengalami akselerasi pada triwulan II 2026 sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan. Pada triwulan II 2026, LU Konstruksi tumbuh sebesar 6,57% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,96% (yoy). Penguatan tersebut tercermin dari peningkatan aktivitas penggunaan material konstruksi, di mana pengadaan semen di Provinsi Lampung tumbuh sebesar 25,23% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 12,56% (yoy). Dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit pada LU Konstruksi masih mengalami kontraksi sebesar 5,44% (yoy), namun membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 5,86% (yoy). Sementara itu, kredit investasi menunjukkan penguatan dengan tumbuh sebesar 4,71% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,64% (yoy).

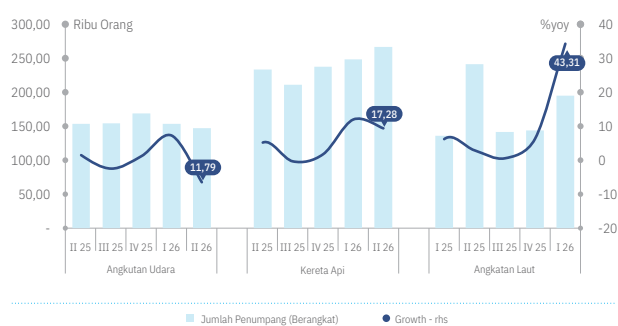
Kinerja konstruksi juga didukung oleh berlanjutnya pembangunan infrastruktur pemerintah, khususnya infrastruktur pendukung ketahanan pangan dan konektivitas wilayah. Pada 2026, Pemerintah terus melanjutkan penguatan infrastruktur irigasi strategis melalui program rehabilitasi jaringan irigasi Way Sekampung yang mencakup intervensi area seluas

Grafik 1.40. Perkembangan Pengadaan Semen Provinsi Lampung

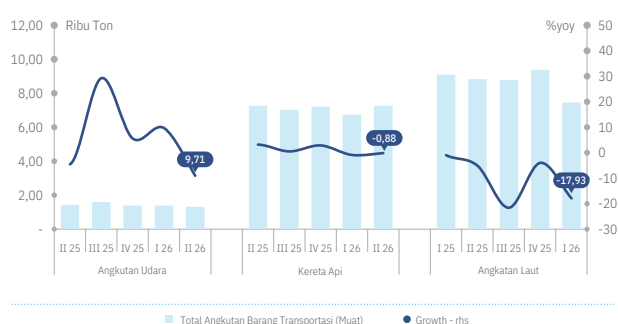
Sumber: SKDU, diolah

Grafik 1.41. Perkembangan Penyaluran Kredit Konstruksi

Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

Grafik 1.42. Perkembangan Penumpang Angkutan Udara, Laut dan Kereta Api

Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.43. Perkembangan Barang Angkutan Udara, Laut dan Kereta Api

Sumber: BPS, diolah

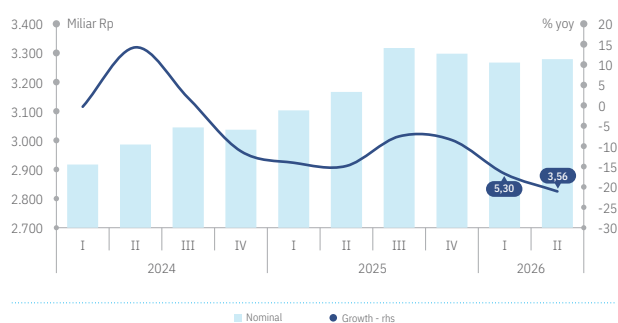
36.197 hektare, dengan perbaikan jaringan kanal primer dan sekunder sebagai bagian dari peningkatan layanan irigasi pertanian. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur jalan provinsi juga terus dilakukan melalui 62 paket pekerjaan yang mulai dilaksanakan lebih awal pada 2026 untuk mendukung konektivitas dan aktivitas ekonomi daerah. Program pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani juga terus berjalan melalui P3-TGAI yang mencakup 432 lokasi di 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

1.2.5. LU Transportasi dan Pergudangan

Kinerja LU Transportasi dan Pergudangan tetap tumbuh positif pada triwulan II 2026, meskipun mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. LU Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 5,16% (yoy) pada triwulan II 2026, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,11% (yoy). Perlambatan tersebut sejalan dengan kembali normalnya mobilitas masyarakat setelah berakhirnya periode *long festive season* dan momentum HBKN Ramadan-Idulfitri yang berlangsung pada triwulan sebelumnya.

Perkembangan aktivitas transportasi tercermin dari pertumbuhan jumlah penumpang yang menunjukkan kinerja beragam antar moda angkutan. Jumlah

penumpang moda angkutan kereta api pada triwulan II 2026 masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 14,26% (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 17,28% (yoy). Sementara itu, jumlah penumpang angkutan udara dan angkutan laut masing-masing mengalami kontraksi sebesar 4,23% (yoy) dan 29,68% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya masih tumbuh positif sebesar 11,79% (yoy) dan 43,31% (yoy). Di sisi lain, aktivitas angkutan barang menunjukkan perbaikan kinerja. Pada triwulan II 2026, total angkutan barang yang meski masih terkontraksi 0,89% (yoy), namun membaik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 9,13% (yoy).

Grafik 1.44. Kredit LU Transportasi, Pergudangan dan Infokom

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Dari sisi pembiayaan, dukungan intermediasi perbankan terhadap LU Transportasi dan Pergudangan masih tumbuh positif meskipun melambat. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan kredit LU Transportasi, Pergudangan, dan Infokom yang mencapai 3,56% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,30% (yoy).





Perkembangan Inflasi

- Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 2,46% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,16% (yoy), namun masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34% (yoy). Perkembangan inflasi tahunan terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok transportasi serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Sementara itu, deflasi pada kelompok pendidikan turut menahan peningkatan inflasi pada periode laporan.
- Secara spasial, tekanan inflasi kabupaten/kota di Provinsi Lampung relatif lebih terkendali dibandingkan wilayah lain di Sumatera. Seluruh kabupaten/kota sampel IHK di Lampung mencatat inflasi tahunan di bawah tingkat inflasi nasional dan termasuk dalam 10 kabupaten/kota dengan inflasi terendah di Sumatera. Perkembangan tersebut mencerminkan stabilitas harga di Provinsi Lampung yang relatif terjaga pada triwulan laporan.
- Inflasi Provinsi Lampung pada Triwulan III 2026 diperkirakan tetap berada dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1\%$ (yoy), dengan kecenderungan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi diperkirakan terutama bersumber dari kelompok pendidikan, perawatan pribadi dan jasa lainnya, makanan, minuman, dan tembakau, serta transportasi. Hal ini sejalan dengan berakhirnya efek basis rendah tarif pendidikan, masih tingginya harga emas global, serta potensi kenaikan harga rokok, BBM nonsubsidi, dan tarif angkutan. Di sisi lain, perbaikan pasokan beras, bawang merah, dan kopi robusta diperkirakan menahan tekanan inflasi, meski risiko cuaca ekstrim perlu menjadi perhatian.

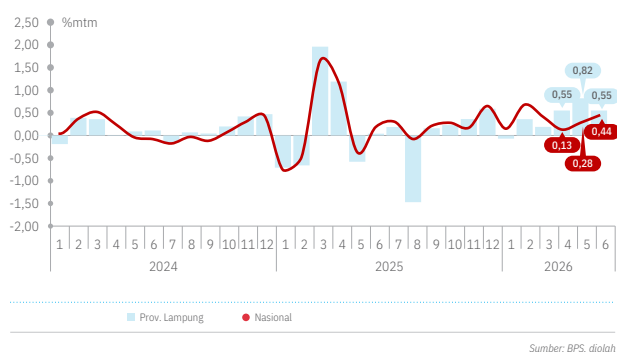
2.1. Inflasi Umum Gabungan Dua Kota dan Dua Kabupaten di Provinsi Lampung

2.1.1. Inflasi Bulanan

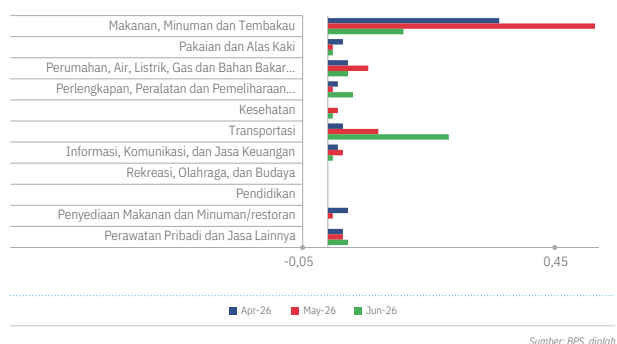
Sepanjang triwulan II 2026, inflasi Provinsi Lampung tercatat sebesar 0,55% (mtm) pada April 2026, kemudian meningkat menjadi 0,82% (mtm) pada Mei 2026, sebelum kembali tercatat sebesar 0,55% (mtm) pada Juni 2026 (Grafik 2.1). Tekanan inflasi pada akhir triwulan laporan terutama bersumber dari kelompok transportasi serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau (Grafik 2.2). Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi serta terbatasnya pasokan sejumlah komoditas hortikultura strategis, khususnya bawang merah dan tomat. Keterbatasan pasokan hortikultura terjadi seiring belum masuknya periode panen, disertai gangguan cuaca dan serangan hama yang menahan produksi.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung pada April 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,55% (mtm), meningkat dibandingkan Maret 2026 yang sebesar 0,19% (mtm) (Grafik 2.1). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,13% (mtm), serta rata-rata perkembangan IHK Provinsi Lampung pada bulan April 2023 – 2025 yang tercatat

Grafik 2.1. Inflasi Lampung dan Nasional



Grafik 2.2. Sumbangan Inflasi Bulanan April, Mei dan Juni 2026

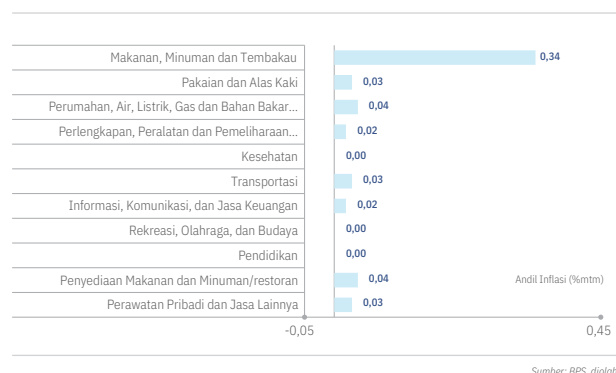


Tabel 2.1. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi & Deflasi Bulanan April 2026

Komoditas Inflasi	Andil (%)	Komoditas Deflasi	Andil (%)
Minyak Goreng	0,09%	Cabai Rawit	-0,06%
Ikan Nila	0,04%	Emas Perhiasan	-0,03%
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,03%	Daging Ayam Ras	-0,02%
Beras	0,03%	Angkutan Antar Kota	-0,01%
Cabai Merah	0,03%	Cumi-cumi	-0,01%

Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.3. Sumbangan Inflasi Bulanan April 2026 Menurut Kelompok Pengeluaran



mengalami inflasi sebesar 0,49% (mtm). Secara tahunan, inflasi IHK Provinsi Lampung pada April 2026 tercatat sebesar 0,53% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 1,16% (yoy) maupun inflasi nasional sebesar 2,42% (yoy).

Dilihat dari sumbernya, inflasi pada April 2026 terutama didorong oleh kenaikan harga komoditas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau (Grafik 2.3). Komoditas utama penyumbang inflasi pada April 2026 adalah minyak goreng, ikan nila dengan andil masing-masing sebesar 0,09% dan 0,04% (mtm), serta sigaret kretek mesin (SKM), beras, dan cabai merah dengan andil masing-masing sebesar 0,03% (mtm) (Tabel 2.1). Kenaikan harga minyak goreng utamanya dipengaruhi oleh peningkatan biaya input produksi kemasan seiring kenaikan harga plastik akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Sementara itu, kenaikan harga ikan nila didorong oleh peningkatan permintaan, serta penyesuaian harga input produksi budidaya seperti pakan dan bibit. Lebih lanjut, kenaikan harga SKM ditengarai sejalan dengan meningkatnya harga tembakau serta penyesuaian biaya distribusi. Adapun kenaikan harga beras dan cabai merah terutama dipengaruhi oleh berakhirnya puncak panen raya serta terbatasnya tambahan produksi akibat penundaan tanam seiring kondisi cuaca yang kurang kondusif.

Di sisi lain, tekanan inflasi pada April 2026 tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas, terutama cabai rawit, emas perhiasan, daging ayam ras dengan andil masing-masing sebesar -0,06%; -0,03%; dan -0,02%(mtm), serta angkutan antar kota dan cumi-cumi dengan andil masing-masing sebesar -0,01% (mtm) (Tabel 2.1). Penurunan harga cabai rawit didukung oleh produksi yang tetap terjaga di tengah permintaan pasar yang relatif stabil, sementara penurunan harga daging ayam ras sejalan dengan normalisasi permintaan pasca-HBKN. Adapun penurunan harga emas perhiasan sejalan dengan koreksi harga emas global di tengah penguatan dolar AS dan ekspektasi suku bunga global yang tetap tinggi. Lebih lanjut, penurunan tarif angkutan antarkota dipengaruhi oleh normalisasi mobilitas masyarakat pasca-HBKN Idulfitri.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung pada Mei 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,82% (mtm), meningkat dibandingkan April 2026 yang sebesar 0,55% (mtm) (Grafik 2.1). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,28% (mtm) serta rata-rata perkembangan IHK Provinsi Lampung pada bulan Mei dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,19% (mtm). Secara tahunan, perkembangan IHK Provinsi Lampung pada Mei 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 1,94% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,53% (yoy), namun masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,08% (yoy).

Dilihat dari sumbernya, inflasi pada Mei 2026 terutama didorong oleh kenaikan harga komoditas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau (Grafik 2.4). Komoditas utama penyumbang inflasi adalah cabai merah dan bawang merah dengan andil masing-masing sebesar 0,15% dan 0,10% (mtm), serta cabai rawit, tomat, dan minyak goreng yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,06% (mtm) (Tabel 2.2). Kenaikan harga aneka cabai dan bawang merah terutama dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan seiring curah hujan yang relatif tinggi dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang menahan produktivitas. Khusus aneka cabai, tekanan pasokan turut dipengaruhi oleh berakhirnya periode panen di sejumlah sentra produksi lokal. Adapun kenaikan harga tomat dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat menjelang puncak HBKN Iduladha. Sementara itu, kenaikan harga minyak goreng ditengarai dipengaruhi oleh tingginya permintaan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial, di tengah

berlanjutnya penyesuaian biaya produksi kemasan sejalan dengan kenaikan harga bahan baku plastik akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Di sisi lain, tekanan inflasi pada Mei 2026 tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas, terutama telur ayam ras dengan andil sebesar -0,07% (mtm), serta sampo, bawang putih, dan kangkung yang masing-masing memberikan andil sebesar -0,02% (mtm) (Tabel 2.2). Penurunan harga telur ayam ras sejalan dengan kondisi surplus produksi selama periode Januari–April 2026 di tengah permintaan yang relatif stabil. Sementara itu, penurunan harga kangkung didukung oleh meningkatnya produksi dan ketersediaan pasokan di tingkat hulu. Adapun penurunan harga bawang putih dipengaruhi oleh terjaganya pasokan seiring realisasi impor yang meningkat menjelang HBKN. Selain itu, emas perhiasan turut memberikan andil deflasi sebesar -0,01% (mtm), sejalan dengan koreksi harga emas global di tengah masih tingginya suku bunga kebijakan The Fed.

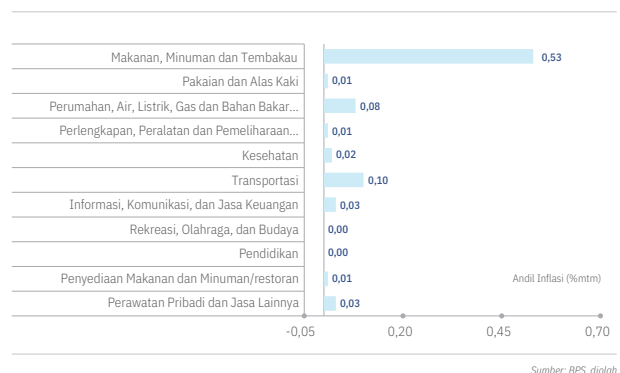
Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung pada Juni 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,55% (mtm), lebih rendah bila dibandingkan Mei 2026 yang sebesar 0,82% (mtm) (Grafik 2.1). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar

Tabel 2.2. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi & Deflasi Bulanan Mei 2026

Komoditas Inflasi	Andil (%)	Komoditas Deflasi	Andil (%)
Cabai Merah	0,15%	Telur Ayam Ras	-0,07%
Bawang Merah	0,10%	Sampo	-0,02%
Cabai Rawit	0,06%	Bawang Putih	-0,02%
Tomat	0,06%	Kangkung	-0,02%
Minyak Goreng	0,06%	Emas Perhiasan	-0,01%

Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.4. Sumbangan Inflasi Bulanan Mei 2026 Menurut Kelompok Pengeluaran



0,44% (mtm) maupun rata-rata perkembangan IHK Provinsi Lampung pada bulan Juni dalam tiga tahun terakhir yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,10% (mtm). Secara tahunan, inflasi IHK Provinsi Lampung pada Juni 2026 tercatat sebesar 2,46% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 1,94% (yoy), namun masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34% (yoy).

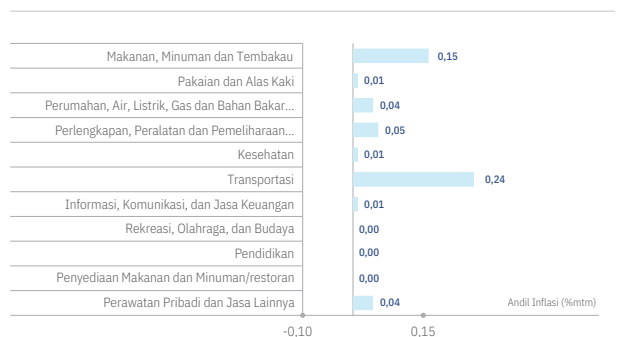
Dilihat dari sumbernya, inflasi pada Juni 2026 terutama didorong oleh kenaikan harga komoditas pada kelompok transportasi serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau (Grafik 2.5). Komoditas utama penyumbang inflasi pada periode laporan adalah bensin, bawang merah, tomat, bawang putih, dan minyak goreng dengan andil masing-masing sebesar 0,21%; 0,07%; 0,05%; 0,04%; dan 0,02% (mtm) (Tabel 2.3). Kenaikan harga bensin sejalan dengan penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026. Sementara itu, kenaikan harga bawang merah dipengaruhi oleh terbatasnya produksi pascaperiode panen di sentra produksi lokal. Kenaikan harga tomat didorong oleh berkurangnya pasokan seiring gangguan produksi akibat kondisi cuaca yang kurang kondusif. Adapun kenaikan harga bawang putih dipengaruhi oleh menurunnya pasokan di tingkat distributor serta meningkatnya biaya distribusi sejalan dengan penyesuaian harga BBM. Lebih lanjut, kenaikan harga

Tabel 2.3. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi & Deflasi Bulanan Juni 2026

Komoditas Inflasi	Andil (%)	Komoditas Deflasi	Andil (%)
Bensin	0,21%	Cabai Merah	-0,03%
Bawang Merah	0,07%	Telur Ayam Ras	-0,02%
Tomat	0,05%	Cabai Rawit	-0,02%
Bawang Putih	0,04%	Daging Ayam Ras	-0,02%
Minyak Goreng	0,02%	Nugget	-0,02%

Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.5. Sumbangan Inflasi Bulanan Juni 2026 Menurut Kelompok Pengeluaran



Sumber: BPS, diolah

minyak goreng ditengarai dipengaruhi oleh berlanjutnya penyesuaian biaya input produksi kemasan seiring kenaikan harga bahan baku plastik.

Di sisi lain, tekanan inflasi pada Juni 2026 tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas, terutama cabai merah dengan andil sebesar -0,03% (mtm), serta telur ayam ras, cabai rawit, dan daging ayam ras yang masing-masing memberikan andil sebesar -0,02% (mtm) (Tabel 2.3). Penurunan harga aneka cabai didorong oleh meningkatnya pasokan seiring berlangsungnya panen di sentra produksi lokal, terutama Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, dan Lampung Barat, serta tambahan pasokan dari luar daerah, antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, penurunan harga daging ayam ras dan telur ayam ras sejalan dengan normalisasi permintaan pasca-HBKN Iduladha serta berkurangnya serapan dari program strategis pemerintah selama periode libur sekolah.

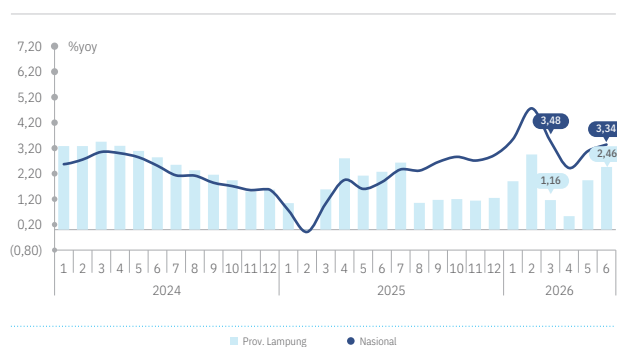
Tabel 2.4. Andil Inflasi Month to Month Menurut Kelompok Pengeluaran (%)

Kelompok Inflasi	Apr-26	Mei-26	Jun-26
Umum	0,55	0,82	0,55
Makanan, Minuman dan Tembakau	0,34	0,53	0,15
Pakaian dan Alas Kaki	0,03	0,01	0,01
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0,04	0,08	0,04
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan	0,02	0,01	0,05
Kesehatan	0,00	0,02	0,01
Transportasi	0,03	0,10	0,24
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,02	0,03	0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,00	0,00	0,00
Pendidikan	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran	0,04	0,01	0,00
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,03	0,03	0,04

Sumber: BPS, diolah

2.1.2. Inflasi Tahunan

Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 2,46% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,16% (yoy). Namun demikian, capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34% (yoy) (Grafik 2.6). Perkembangan inflasi tahunan pada periode laporan terutama dipengaruhi oleh komoditas emas perhiasan dan bensin yang termasuk ke dalam kelompok transportasi serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.

Grafik 2.6. Inflasi Tahunan Lampung dan Nasional

Sumber: BPS, diolah

Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan meningkatnya harga emas global, didorong oleh peningkatan permintaan aset *safe haven* dan ekspektasi penurunan suku bunga The Fed. Sementara itu, kenaikan harga bensin sejalan dengan penyesuaian harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamina, mengikuti perkembangan harga minyak dunia. Di sisi lain, tekanan inflasi yang lebih tinggi pada triwulan laporan tertahan oleh penurunan harga pada kelompok pendidikan, terutama tarif Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), seiring berlanjutnya *low base effect* dari kebijakan pembebasan biaya Komite Sekolah yang mulai diberlakukan pada Agustus 2025 (Tabel 2.5).

Tabel 2.5. Andil Inflasi Year on Year Menurut Kelompok (%)

Kelompok Inflasi	I-26	II-26
Umum	1,16	2,46
Makanan, Minuman dan Tembakau	0,38	1,75
Pakaian dan Alas Kaki	0,03	0,11
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	1,03	0,26
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan	0,03	0,11
Kesehatan	0,04	0,07
Transportasi	0,14	0,52
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,02	0,07
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,01	-0,02
Pendidikan	-1,19	-1,18
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran	0,11	0,14
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,60	0,63

Sumber: BPS, diolah

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

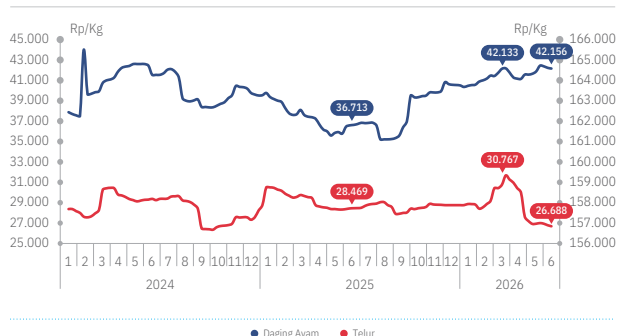
Pada Triwulan II 2026, kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mencatat inflasi sebesar 5,19% (yoy) dengan andil 1,75% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,12% (yoy).

Tekanan inflasi pada kelompok ini terutama bersumber dari subkelompok makanan, khususnya minyak goreng dan daging ayam ras yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,19% (yoy). Secara tahunan, kenaikan harga minyak goreng dipengaruhi oleh meningkatnya serapan CPO untuk kebutuhan biodiesel seiring transisi kebijakan mandatori B40 menuju B50, serta berlanjutnya transmisi kenaikan biaya produksi dan kemasan. Sementara itu, kenaikan harga daging ayam ras sejalan dengan meningkatnya permintaan untuk mendukung program strategis pemerintah, di tengah tekanan biaya pakan seiring berakhirnya puncak produksi jagung. Perkembangan tersebut tercermin dari hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank Indonesia yang menunjukkan kenaikan harga daging ayam ras dari Rp36.713/kg pada Juni 2025 menjadi Rp42.156/kg pada Juni 2026 (Grafik 2.7).

Selain kedua komoditas tersebut, bawang merah, cabai merah, dan beras turut memberikan tekanan inflasi dengan andil masing-masing sebesar 0,16%; 0,16%; dan 0,15% (yoy). Kenaikan harga bawang merah terutama dipengaruhi oleh terbatasnya produksi di sentra lokal, antara lain Pringsewu, Pesawaran, dan Lampung Barat, serta berkurangnya pasokan dari sentra produksi di luar Provinsi Lampung, khususnya Brebes dan Solok. Kondisi tersebut sejalan dengan pergeseran musim tanam dan belum optimalnya produksi akibat gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT) di tengah curah hujan yang relatif tinggi. Sejalan dengan itu, produksi aneka cabai turut mengalami penurunan akibat melemahnya produktivitas. Sementara itu, kenaikan harga beras terutama dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan pascaberakhirnya puncak panen raya, di tengah tambahan produksi lokal yang masih terbatas akibat kondisi lahan yang kurang optimal serta gangguan OPT yang menekan produktivitas. Hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank Indonesia mengonfirmasi perkembangan tersebut, dengan harga cabai merah dan bawang merah pada Juni 2026 masing-masing tercatat sebesar Rp81.278/kg dan Rp53.181/kg, meningkat dibandingkan Juni 2025 yang masing-masing sebesar Rp74.638/kg dan Rp52.619/kg (Grafik 2.8).

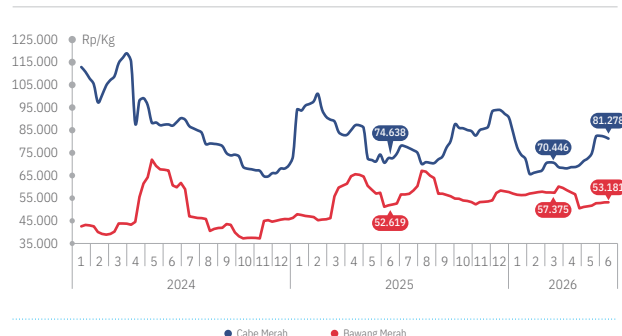
Selanjutnya, subkelompok rokok dan tembakau turut memberikan tekanan inflasi, terutama bersumber dari sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret kretek tangan (SKT) dengan andil masing-masing sebesar 0,14% dan 0,05% (yoy). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian biaya produksi dan logistik seiring

Grafik 2.7. Perkembangan Harga Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.8. Perkembangan Harga Cabai Merah dan Bawang Merah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Tabel 2.6. Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau (% yoy)

Penyumbang Inflasi (%yoy)		Penyumbang Deflasi (%yoy)	
Komoditas	Andil	Komoditas	Andil
Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau (Inflasi 5,19%)			
Makanan (Inflasi 5,61%)			
Minyak Goreng	0,19	Telur Ayam Ras	-0,03
Daging Ayam Ras	0,19	Santan Jadi	-0,02
Bawang Merah	0,16	Susu Bubuk untuk Balita	-0,02
Cabai Merah	0,16		
Rokok dan Tembakau (Inflasi 4,26%)			
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,14		
Sigaret Kretek Tangan (SKT)	0,05		
Minuman yang Tidak Beralkohol (Inflasi 1,70%)			
Air Kemasan	0,03		

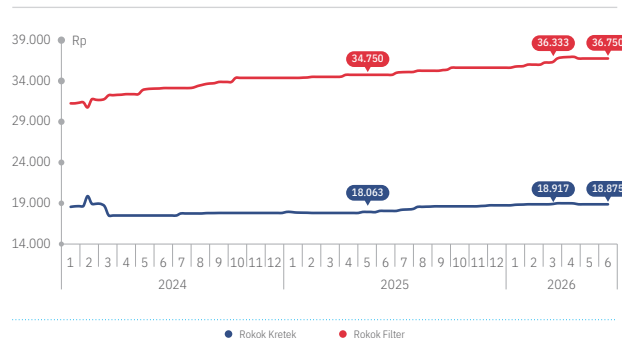
Sumber: BPS, diolah

meningkatnya harga energi, serta berlanjutnya transmisi penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) rokok yang berlaku sejak awal tahun. Sejalan dengan itu, hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank Indonesia menunjukkan bahwa harga rokok kretek dan rokok filter meningkat dari masing-masing Rp18.063 dan Rp34.750 per bungkus pada Juni 2025 menjadi Rp18.917 dan Rp36.333 per bungkus pada Juni 2026 (Grafik 2.9). Lebih lanjut, subkelompok minuman tidak beralkohol turut memberikan andil inflasi sebesar 0,03% (yoy), terutama bersumber dari kenaikan harga air kemasan dengan andil sebesar 0,03% dan 0,01% (yoy) (Tabel 2.6).

Di sisi lain, tekanan inflasi yang lebih tinggi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tertahan oleh deflasi pada sejumlah komoditas pangan strategis, terutama telur ayam ras, santan jadi, dan susu bubuk untuk balita dengan andil masing-masing sebesar -0,03%; -0,02%; dan -0,02% (yoy). Penurunan harga telur ayam ras terutama dipengaruhi oleh surplus pasokan seiring peningkatan produksi di berbagai sentra

peternakan, didorong oleh penambahan populasi ayam petelur dan masuknya investasi baru pada sektor peternakan yang dinilai prospektif pada periode sebelumnya. Di sisi permintaan, penyerapan yang relatif terbatas, termasuk pada periode libur sekolah, turut menahan permintaan sehingga mendorong penurunan harga di tingkat peternak dan pasar. Hal ini terkonfirmasi dari hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank Indonesia, yang menunjukkan penurunan harga

Grafik 2.9. Perkembangan Harga Rokok



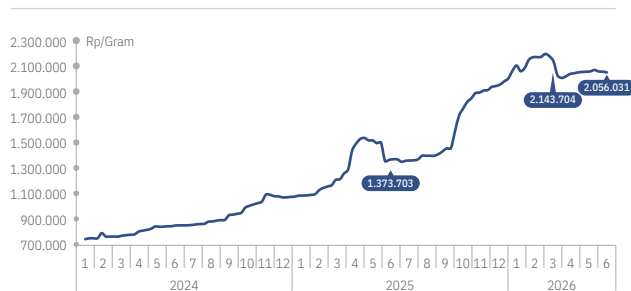
Sumber: Bank Indonesia, diolah

komoditas telur ayam ras dari Rp28.469 per kg pada Juni 2026 menjadi Rp26.668 per kg pada Juni 2026 (Grafik 2.7). Adapun penurunan harga santan jadi sejalan dengan normalisasi permintaan pasca-HBKN Iduladha di tengah pasokan kelapa yang relatif terjaga, serta pelemahan harga minyak nabati global. Sementara itu, penurunan harga susu bubuk untuk balita terutama dipengaruhi oleh melemahnya harga produk susu global seiring meningkatnya produksi negara eksportir utama, yang menurunkan biaya bahan baku impor industri susu domestik.

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Inflasi kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 9,91% (yoy) dengan andil 0,63% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatat inflasi sebesar 9,55% (yoy) dengan andil 0,60% (yoy) (Tabel 2.8). Tekanan inflasi pada kelompok ini terutama bersumber dari komoditas emas perhiasan dengan andil 0,43% (yoy). Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan penguatan harga emas global di tengah meningkatnya permintaan terhadap aset *safe haven* dan ekspektasi penurunan suku bunga The Fed. Perkembangan tersebut terkonfirmasi dari hasil Survei Pemantauan Harga (SPH)

Grafik 2.10. Perkembangan Harga Emas Perhiasan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Bank Indonesia yang menunjukkan kenaikan harga emas perhiasan dari Rp1.373.703 per gram pada Juni 2025 menjadi Rp2.056.031 per gram pada Juni 2026 (Grafik 2.10). Lebih lanjut, tekanan inflasi turut bersumber dari sejumlah komoditas perawatan pribadi, antara lain parfum, deodoran, sampo, dan krim wajah, yang ditengarai dipengaruhi oleh meningkatnya biaya produksi seiring kenaikan harga bahan baku dan kemasan, serta tekanan nilai tukar Rupiah yang meningkatkan biaya komponen impor.

Kelompok Transportasi

Kelompok transportasi pada Triwulan II 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 4,88% (yoy) dengan andil 0,52% (yoy), meningkat dibandingkan Triwulan I 2026 yang mencatat inflasi sebesar 1,28% (yoy) dengan andil 0,14% (yoy). Tekanan inflasi terutama bersumber dari subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi dan pembelian kendaraan, khususnya bensin dan mobil dengan andil masing-masing sebesar 0,23% dan 0,08% (yoy). Kenaikan harga bensin sejalan dengan penyesuaian harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamina, mengikuti perkembangan harga minyak dunia. Perkembangan tersebut terkonfirmasi dari hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank Indonesia yang menunjukkan kenaikan harga bensin di Provinsi Lampung dari Rp12.550/liter pada Juni 2025 menjadi Rp16.650/liter pada Juni 2026 (Grafik 2.11). Sementara itu, kenaikan harga mobil ditengarai dipengaruhi oleh meningkatnya biaya produksi dan komponen impor seiring tekanan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS. Lebih lanjut, tekanan inflasi pada kelompok transportasi turut bersumber dari subkelompok jasa angkutan penumpang, terutama kenaikan tarif angkutan udara yang memberikan andil sebesar 0,03% (yoy). Kenaikan tarif tersebut sejalan dengan meningkatnya permintaan selama periode libur

Tabel 2.7. Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (% yoy)

Penyumbang Inflasi (%yoy)		Penyumbang Deflasi (%yoy)	
Komoditas	Andil	Komoditas	Andil
Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (Inflasi 9,91%)			
Perawatan Pribadi Lainnya (Inflasi 23,61%)			
Emas Perhiasan	0,43		
Perawatan Pribadi (Inflasi 4,18%)			
Parfum	0,05		
Deodoran	0,03		
Sampo	0,03		
Krim Wajah	0,02		

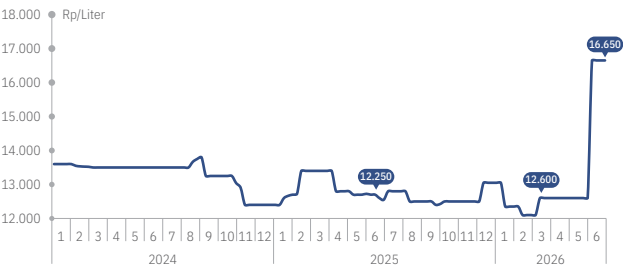
Sumber: BPS, diolah

Tabel 2.8. Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Transportasi (% yoy)

Penyumbang Inflasi (%yoy)		Penyumbang Deflasi (%yoy)	
Komoditas	Andil	Komoditas	Andil
Kelompok Transportasi (Inflasi 4,88%)			
Pengoperasian Peralatan Transportasi Pribadi (Inflasi 4,83%)			
Bensin	0,23		
Pelumas/oli Mesin	0,03		
Perbaikan Ringan Kendaraan	0,02		
Pembelian Kendaraan (Inflasi 4,18%)			
Mobil	0,08		
Sepeda Motor	0,02		
Jasa Angkutan Penumpang (Inflasi 7,45%)			
Angkutan Udara	0,03		

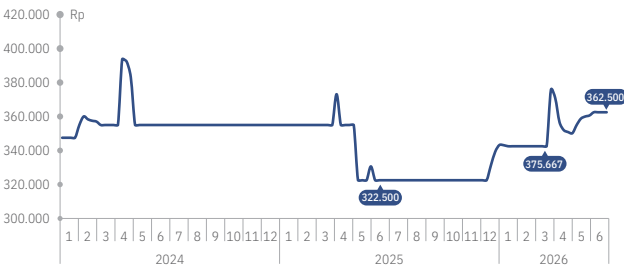
Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.11. Perkembangan Harga Bensin



Sumber: Bank Indonesia,

Grafik 2.12. Perkembangan Tarif Angkutan Antar Kota



Sumber: Bank Indonesia, diolah

sekolah. Selain itu, tarif angkutan antarkota turut mengalami kenaikan, dipengaruhi oleh penyesuaian harga bensin dan tingginya mobilitas masyarakat pada periode yang sama. Hasil SPH Bank Indonesia mengonfirmasi perkembangan tersebut, dengan rata-rata tarif angkutan antarkota meningkat dari Rp373.125 pada Maret 2025 menjadi Rp375.667 pada Maret 2026 (Grafik 2.12).

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas Dan Bahan Bakar Lainnya

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Lainnya pada Triwulan II 2026 mencatat inflasi sebesar 2,07% (yoy) dengan andil 0,26% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 8,78% (yoy) dengan andil 1,03% (yoy). Tekanan inflasi terutama bersumber dari subkelompok pemeliharaan, perbaikan, dan keamanan tempat tinggal/perumahan, khususnya pasir, gipsium, dan

semen yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,04%; 0,02%; dan 0,02% (yoy). Kenaikan harga sejumlah bahan bangunan ditengarai dipengaruhi oleh meningkatnya biaya operasional, logistik, dan produksi seiring kenaikan harga bahan bakar, sementara khusus gipsium, tekanan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS diperkirakan turut meningkatkan biaya bahan baku yang sebagian masih mengandung komponen impor. Tekanan inflasi juga bersumber dari subkelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga, yakni komoditas bahan bakar rumah tangga yang memberikan andil sebesar 0,07% (yoy), seiring penyesuaian harga LPG nonsubsidi, khususnya Bright Gas 12 kg, di tengah tekanan harga energi global dan nilai tukar Rupiah. Selain itu, subkelompok sewa dan kontrak rumah turut mencatat inflasi, bersumber dari kenaikan kontrak rumah dengan andil sebesar 0,03% (yoy), seiring penyesuaian tarif sewa pada pertengahan tahun (Tabel 2.9).

Tabel 2.9. Sumbangan Inflasi dan Deflasi Perumahan, Air, Listrik, Gas Dan Bahan Bakar Lainnya (% yoy)

Penyumbang Inflasi (%yoy)		Penyumbang Deflasi (%yoy)	
Komoditas	Andil	Komoditas	Andil
Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga (Inflasi 2,07%)			
Pemeliharaan, Perbaikan, dan Keamanan Tempat Tinggal/perumahan (Inflasi 6,00%)			
Pasir	0,04		
Gypsum	0,02		
Semen	0,02		
Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga (Inflasi 1,25%)			
Bahan Bakar Rumah Tangga	0,07		
Sewa dan Kontrak Rumah (Inflasi 0,95%)			
Kontrak Rumah	0,03		

Sumber: BPS, diolah

Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman /Restoran

Inflasi kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 1,70% (yoy) dengan andil 0,14% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatat inflasi sebesar 1,35% (yoy) dengan andil 0,11% (yoy) (Tabel 2.10). Tekanan inflasi pada kelompok ini terutama bersumber dari subkelompok jasa pelayanan makanan dan minuman, khususnya komoditas nasi dengan lauk dan mi yang masing-masing memberikan andil 0,05% dan 0,03% (yoy). Kenaikan harga nasi dengan lauk sejalan dengan meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan utama, antara lain beras, bawang merah, aneka cabai, dan daging ayam ras. Sementara itu, kenaikan harga mi ditengarai dipengaruhi oleh meningkatnya biaya bahan baku, terutama tepung terigu seiring kenaikan harga gandum global, serta meningkatnya biaya produksi dan logistik sejalan dengan penyesuaian harga energi. Lebih lanjut, kenaikan harga bahan baku pangan dan biaya energi turut mendorong penyesuaian harga sejumlah komoditas lainnya, antara

lain martabak, sayur olahan, hamburger, dan bakso siap santap (Tabel 2.10).

Kelompok Pendidikan

Pada Triwulan II 2026, kelompok Pendidikan mencatat deflasi sebesar 17,93% (yoy) dengan andil -1,18% (yoy), relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 17,97% (yoy) dengan andil -1,19% (yoy) (Tabel 2.11). Deflasi terutama bersumber dari subkelompok pendidikan menengah, khususnya tarif Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang masing-masing memberikan andil sebesar -0,84% dan -0,39% (yoy). Penurunan tarif tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung terkait penghapusan uang Komite Sekolah pada tahun ajaran 2025/2026 yang mulai berlaku sejak Agustus 2025, sehingga dampaknya secara tahunan masih berlanjut pada periode laporan. Kebijakan tersebut turut mendorong penurunan tarif pada subkelompok pendidikan dasar dan anak usia dini,

Tabel 2.10. Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran (% yoy)

Penyumbang Inflasi (%yoy)		Penyumbang Deflasi (%yoy)	
Komoditas	Andil	Komoditas	Andil
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran (Inflasi 1,70%)			
Jasa Pelayanan Makanan dan Minuman (Inflasi 1,70%)			
Nasi Dengan Lauk	0,05		
Mi	0,03		
Martabak	0,02		
Sayur Olahan	0,01		
Hamburger	0,01		
Bakso Siap Santap	0,01		

Sumber: BPS, diolah

Tabel 2.11. Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Pendidikan (% yoy)

Penyumbang Inflasi (%yoy)		Penyumbang Deflasi (%yoy)	
Komoditas	Andil	Komoditas	Andil
Pendidikan (Deflasi 17,93%)			
Kelompok Pendidikan Menengah (Deflasi 51,24%)			
		Sekolah Menengah Atas	-0,84
		Sekolah Menengah Pertama	-0,39
Kelompok Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini (Deflasi 1,77%)			
		Sekolah Dasar	-0,02
Kelompok Pendidikan Lainnya (Inflasi 6,93%)			
Bimbingan Belajar	0,04		
Kelompok Pendidikan Tinggi (Inflasi 0,59%)			
Akademi/Perguruan Tinggi	0,01		

Sumber: BPS, diolah

khususnya Sekolah Dasar (SD) dengan andil sebesar -0,02% (yoy). Di sisi lain, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan biaya bimbingan belajar dan akademi/ perguruan tinggi yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,04% dan 0,01% (yoy).

2.2. Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

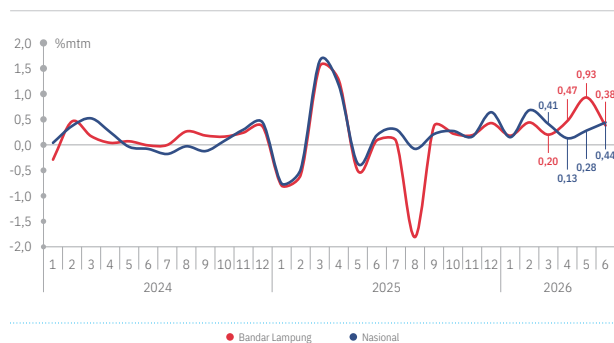
Inflasi Provinsi Lampung merupakan agregasi dari empat kabupaten/kota sampel penghitungan IHK oleh BPS, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Lampung Timur.

2.2.1. Inflasi Kota Bandar Lampung

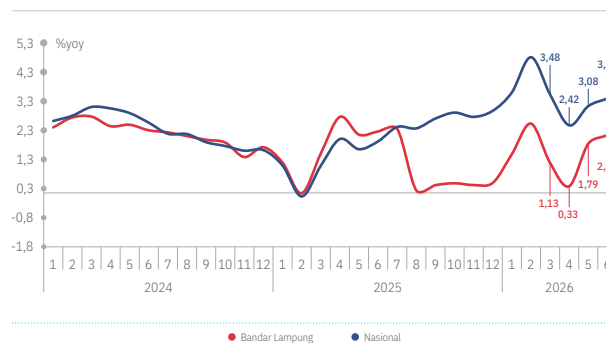
IHK Kota Bandar Lampung pada April 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,47% (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,20% (mtm) (Grafik 2.13). Secara bulanan, tekanan inflasi terutama bersumber dari kenaikan harga minyak goreng, angkutan udara, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil masing-masing sebesar 0,11%; 0,05%; dan 0,04% (mtm). Secara tahunan, inflasi Kota Bandar

Lampung pada April 2026 tercatat sebesar 0,33% (yoy), melambat dibandingkan 1,13% (yoy) pada bulan sebelumnya (Grafik 2.14), terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan, daging ayam ras, dan minyak goreng dengan andil masing-masing sebesar 0,48%; 0,19% dan 0,14% (yoy).

Memasuki Mei 2026, Kota Bandar Lampung mencatat inflasi sebesar 0,93% (mtm), lebih tinggi dibandingkan Januari yang sebesar 0,47% (mtm) (Grafik 2.13). Secara bulanan, tekanan inflasi utamanya didorong oleh kenaikan harga cabai merah dengan andil 0,17% (mtm), serta bahan bakar rumah tangga dan tomat yang masing-masing memberikan andil 0,07% (mtm). Secara tahunan, inflasi Kota Bandar Lampung pada Mei 2026 tercatat sebesar 1,79% (yoy), meningkat dibandingkan 0,33% (yoy) pada bulan sebelumnya (Grafik 2.14). Inflasi tahunan tersebut terutama disumbang oleh kenaikan emas perhiasan, minyak goreng, dan daging ayam ras dengan andil masing-masing sebesar 0,50%; 0,21%; dan 0,19% (yoy).

Grafik 2.13. Inflasi Bulanan Kota Bandar Lampung

Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.14. Inflasi Tahunan Kota Bandar Lampung

Sumber: BPS, diolah

Selanjutnya, pada Juni 2026, Kota Bandar Lampung mencatat inflasi sebesar 0,38% (mtm), lebih rendah dibandingkan Mei yang sebesar 0,93% (mtm) (Grafik 2.13). Tekanan inflasi bulanan terutama dipicu oleh kenaikan harga bensin, tomat, dan bawang putih dengan andil masing-masing sebesar 0,18%; 0,07%; dan 0,06% (mtm). Secara tahunan, inflasi Kota Bandar Lampung pada Juni 2026 tercatat sebesar 2,08% (yoy), meningkat dibandingkan 1,79% (yoy) pada bulan sebelumnya. Inflasi tahunan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan, minyak goreng, dan bensin dengan andil masing-masing sebesar 0,48%; 0,22%; dan 0,19% (yoy).

2.2.2. Inflasi Kota Metro

Pada April 2026, IHK Kota Metro mengalami inflasi sebesar 0,17% (mtm), stabil terhadap bulan sebelumnya yang sebesar 0,17% (mtm) (Grafik 2.15). Secara bulanan, inflasi terutama disumbang oleh kenaikan harga minyak goreng dengan andil sebesar 0,07% (mtm), serta cabai merah, kangkung, kopi siap saji, dan bawang merah dengan andil masing-masing sebesar 0,04% (mtm). Secara tahunan, Kota Metro mencatat inflasi sebesar 1,13% (yoy) pada April 2026, lebih rendah dibandingkan 1,62% (yoy) pada bulan sebelumnya (Grafik 2.16). Inflasi tahunan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan, daging ayam ras, dan beras dengan andil masing-masing sebesar 0,60%; 0,16%; dan 0,15% (yoy).

Memasuki Mei 2026, Kota Metro mencatat inflasi sebesar 1,13% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya mencatat sebesar 0,17% (mtm) (Grafik 2.15). Tekanan inflasi bulanan terutama didorong oleh kenaikan harga cabai merah dengan andil sebesar 0,23% (mtm), serta cabai rawit dan telepon seluler dengan andil masing-masing 0,22% (mtm). Secara tahunan, inflasi Kota Metro pada Mei 2026 tercatat sebesar 2,81% (yoy),

meningkat dibandingkan 1,13% (yoy) pada bulan sebelumnya (Grafik 3.16). Tekanan inflasi tahunan didominasi oleh tekanan harga emas perhiasan, cabai rawit, dan telepon seluler dengan andil masing-masing sebesar 0,55%; 0,37%; dan 0,24% (yoy).

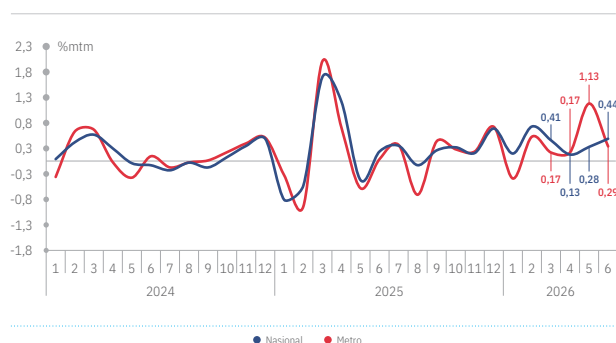
Pada Juni 2026, inflasi Kota Metro melambat menjadi 0,29% (mtm), dari bulan sebelumnya sebesar 1,13% (mtm) (Grafik 2.15). Secara bulanan, tekanan inflasi terutama disumbang oleh kenaikan harga bensin dengan andil 0,23% (mtm), serta bawang putih dan telepon seluler dengan andil masing-masing sebesar 0,05% (mtm). Secara tahunan, inflasi Kota Metro pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,07% (yoy), meningkat dari 2,81% (yoy) pada bulan sebelumnya (Grafik 2.16). Inflasi tahunan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan, telepon seluler, dan bensin dengan andil masing-masing sebesar 0,51%; 0,30%; dan 0,26% (yoy).

2.2.3. Inflasi Kabupaten Mesuji

Pada April 2026, IHK Kabupaten Mesuji mengalami inflasi sebesar 0,77% (mtm), melambat dari triwulan sebelumnya sebesar 0,80% (mtm) (Grafik 2.17). Inflasi tersebut terutama disumbang oleh kenaikan harga bawang putih, minyak goreng, dan tomat dengan andil masing-masing sebesar 0,18%; 0,16%; dan 0,09% (mtm). Secara tahunan, Kabupaten Mesuji tercatat mengalami inflasi sebesar 1,35% (yoy) pada April 2026, meningkat dibandingkan 1,50% (yoy) pada bulan sebelumnya (Grafik 2.18). Inflasi tahunan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan emas perhiasan, daging ayam ras, dan beras dengan andil masing-masing sebesar 0,81%; 0,15%; dan 0,14% (yoy).

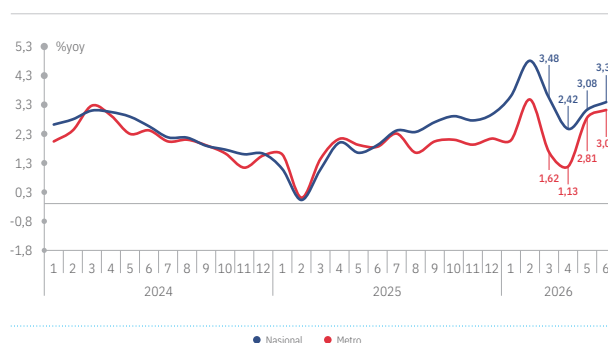
Memasuki Mei 2026, Kabupaten Mesuji mencatat inflasi sebesar 0,59% (mtm), kembali melambat dibandingkan 0,77% (mtm) pada bulan sebelumnya (Grafik 2.17). Secara bulanan, tekanan inflasi terutama didorong oleh

Grafik 2.15. Inflasi Bulanan Kota Metro



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.16. Inflasi Tahunan Kota Metro

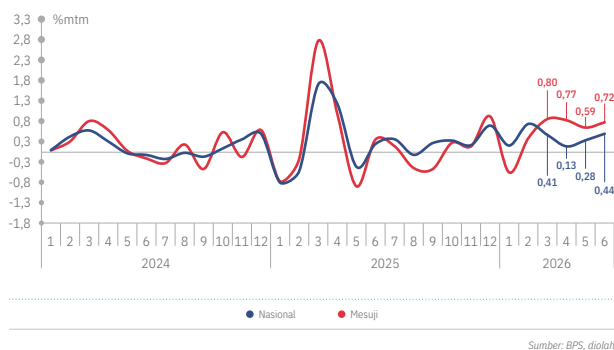


Sumber: BPS, diolah

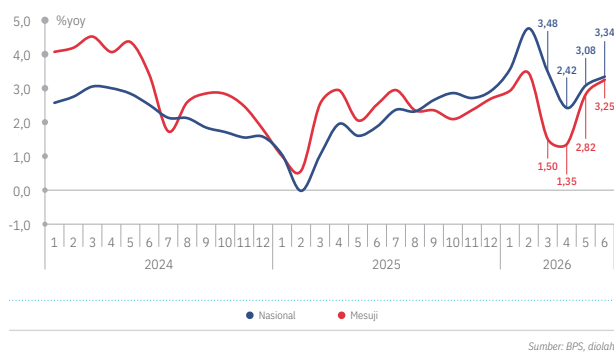
kenaikan bawang merah, cabai merah, dan minyak goreng dengan andil masing-masing sebesar 0,19%; 0,14%; dan 0,10 (mtm). Secara tahunan, inflasi Kabupaten Mesuji meningkat menjadi 2,82% (yoy), dibandingkan 1,35% (yoy) pada bulan sebelumnya (Grafik 2.18). Tekanan inflasi tahunan didominasi oleh sumbangan kenaikan harga emas perhiasan, beras, dan minyak goreng dengan andil masing-masing sebesar 0,73%; 0,30%; dan 0,27% (yoy).

Pada Juni 2026, inflasi Kabupaten Mesuji meningkat menjadi 0,72% (mtm), dari 0,59% (mtm) pada bulan sebelumnya (Grafik 2.17). Secara bulanan, inflasi tersebut terutama didorong oleh kenaikan harga bensin dengan andil sebesar 0,31% (mtm), serta bawang merah dan tomat dengan andil masing-masing sebesar 0,18% (mtm). Secara tahunan, inflasi Kabupaten Mesuji tercatat sebesar 3,25% (yoy), meningkat dibandingkan 2,82% (yoy) pada bulan sebelumnya (Grafik 2.18). Inflasi tahunan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan, bensin, dan minyak goreng dengan andil masing-masing sebesar 0,73%; 0,33%; dan 0,28% (yoy).

Grafik 2.17. Inflasi Bulanan Kabupaten Mesuji



Grafik 2.18. Inflasi Tahunan Kabupaten Mesuji

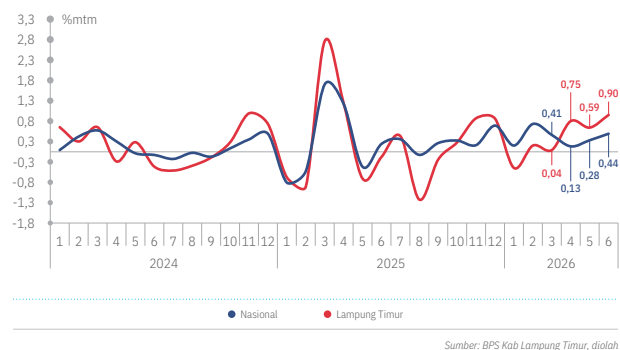


2.2.4. Inflasi Kabupaten Lampung Timur

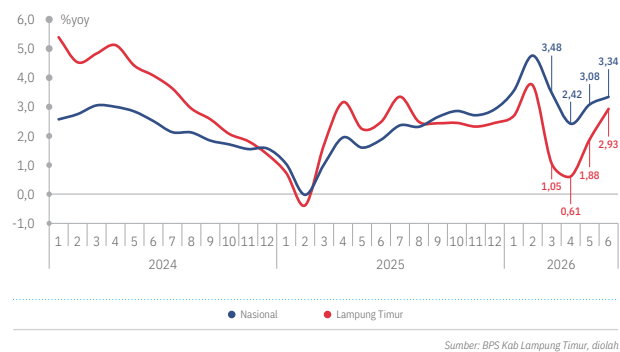
Pada April 2026, IHK Kabupaten Lampung Timur mencatat inflasi sebesar 0,75% (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,04% (mtm) (Grafik 2.19). Tekanan inflasi utamanya bersumber dari kenaikan harga telur ayam ras dan sigaret kretek mesin (SKM) dengan andil masing-masing sebesar 0,09% (mtm), serta beras dengan andil 0,08% (mtm). Secara tahunan, inflasi Kabupaten Lampung Timur pada April 2026 tercatat sebesar 0,61% (yoy), melambat dibandingkan 1,05% (yoy) pada bulan sebelumnya (Grafik 2.20). Inflasi tahunan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan daging ayam ras, beras, dan emas perhiasan dengan andil masing-masing sebesar 0,37%; 0,31%; dan 0,26% (yoy).

Memasuki Mei 2026, Kabupaten Lampung Timur mencatat inflasi sebesar 0,59% (mtm), melambat dibandingkan April sebesar 0,75% (mtm) (Grafik 2.19). Secara bulanan, tekanan inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga bawang merah, cabai merah, dan terong dengan andil masing-masing sebesar 0,19%; 0,11%; dan

Grafik 2.19. Inflasi Bulanan Kabupaten Lampung Timur



Grafik 2.20. Inflasi Tahunan Kabupaten Lampung Timur



0,06% (mtm). Secara tahunan, inflasi Kabupaten Lampung Timur meningkat menjadi 1,88% (yoy) dibandingkan 0,61% (yoy) pada bulan sebelumnya (Grafik 2.20). Tekanan inflasi tahunan didominasi oleh daging ayam ras, beras, dan emas perhiasan dengan andil masing-masing sebesar 0,37%; 0,34%; dan 0,25% (yoy).

Pada Juni 2026, Kabupaten Lampung Timur mencatat inflasi sebesar 0,90% (mtm), meningkat dibandingkan Mei yang sebesar 0,59% (mtm) (Grafik 2.19). Secara bulanan, kenaikan harga terutama dipicu oleh bensin, bawang merah, dan minyak goreng dengan andil masing-masing sebesar 0,26%; 0,17%; dan 0,06% (mtm). Secara tahunan, inflasi Kabupaten Lampung Timur tercatat sebesar 2,93% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 1,88% (yoy) pada bulan sebelumnya (Grafik 2.20). Inflasi tahunan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga daging ayam ras, beras, dan bawang merah dengan andil masing-masing sebesar 0,36%; 0,35%; dan 0,28% (yoy).

2.3. Inflasi Sumatera

Secara spasial, perkembangan inflasi di wilayah Sumatera pada Triwulan II 2026 menunjukkan tekanan harga yang cenderung meningkat di sebagian besar provinsi dibandingkan triwulan sebelumnya, meskipun tingkat inflasi antarwilayah masih bervariasi. Di Sumatera bagian utara, Provinsi Aceh dan Sumatera Utara masing-masing mencatat inflasi sebesar 5,84% dan 4,79% (yoy), terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan, cabai merah, beras, dan bensin. Sementara itu, di Sumatera bagian tengah, inflasi Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi masing-masing tercatat sebesar 4,70%; 4,55%; 4,67%; dan 3,85% (yoy), yang secara umum didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan, cabai merah, bensin, dan minyak goreng. Adapun di Sumatera bagian selatan, Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung masing-masing mencatat inflasi sebesar 3,96%; 2,89%; 4,67%; dan 2,46% (yoy), terutama bersumber dari kenaikan harga emas perhiasan dan bensin, serta sejumlah komoditas pangan, terutama cabai merah dan daging ayam ras (Gambar 2.1).

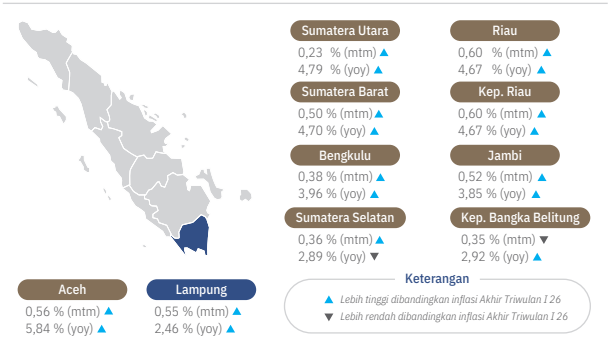
Secara umum, inflasi tahunan di wilayah Sumatera pada triwulan laporan terutama bersumber dari kenaikan harga emas perhiasan, cabai merah, dan bensin. Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan penguatan harga emas global, didorong oleh meningkatnya permintaan aset *safe haven* di tengah

ketidakpastian geopolitik serta ekspektasi penurunan suku bunga The Fed. Sementara itu, kenaikan harga cabai merah umumnya dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang kurang kondusif, termasuk curah hujan tinggi yang mengganggu proses panen dan menekan produksi di sejumlah sentra, baik di wilayah Sumatera seperti Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat maupun daerah pemasok di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Adapun kenaikan harga bensin sejalan dengan penyesuaian harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamina, mengikuti perkembangan harga minyak dunia.

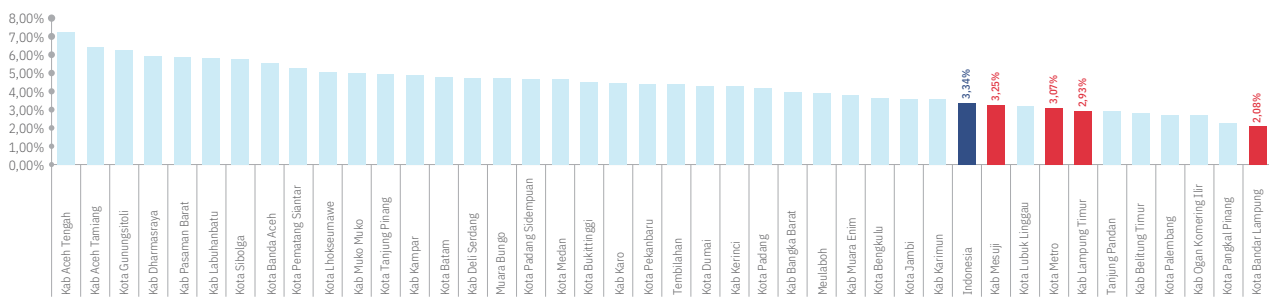
Selain ketiga komoditas tersebut, beras dan minyak goreng turut menjadi penyumbang inflasi di sejumlah provinsi di Sumatera. Kenaikan harga beras sejalan dengan berakhirnya puncak panen raya serta terbatasnya tambahan produksi akibat penundaan tanam di tengah kondisi cuaca yang kurang kondusif. Sementara itu, kenaikan harga minyak goreng dipengaruhi oleh meningkatnya serapan CPO untuk kebutuhan biodiesel seiring transisi mandatori B40 menuju B50, serta kenaikan biaya produksi dan kemasan.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, pada level kabupaten/kota, dari 41 kabupaten/kota sampel IHK di Sumatera berdasarkan SBH 2022, sebanyak 31 kabupaten/kota mencatat inflasi tahunan di atas inflasi nasional sebesar 3,34% (yoy). Inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 7,25% (yoy), sementara inflasi terendah tercatat di Kota Bandar Lampung sebesar 2,08% (yoy), mencerminkan masih terdapatnya disparitas tekanan harga antarwilayah di Sumatera. Lebih lanjut, seluruh kabupaten/kota sampel IHK di Provinsi Lampung mencatat inflasi tahunan di bawah tingkat inflasi nasional dan termasuk dalam kelompok 10 kabupaten/kota dengan inflasi terendah di Sumatera. Selain Kota Bandar Lampung, inflasi di Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro, dan Kabupaten Mesuji masing-masing tercatat sebesar 2,93%; 3,07%; dan 3,25% (yoy). Perkembangan

Gambar 2.1. Inflasi Wilayah Sumatera



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.21. Inflasi Tahunan Kabupaten Kota di Wilayah Sumatera

Sumber: BPS, diolah

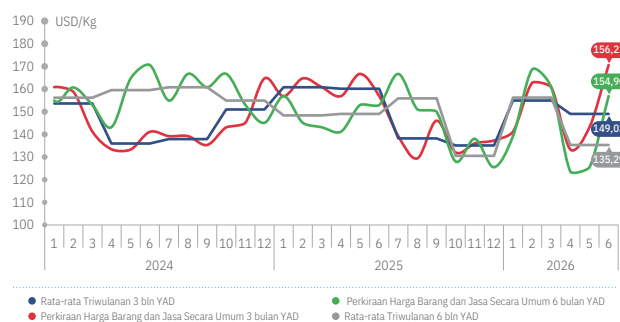
tersebut menunjukkan bahwa tekanan inflasi di Provinsi Lampung pada Triwulan II 2026 relatif lebih terjaga dibandingkan sebagian besar wilayah lain di Sumatera (Grafik 2.21).

2.4. Arah Perkembangan Inflasi Triwulan III 2026

Inflasi Provinsi Lampung pada Triwulan III 2026 diperkirakan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy), dengan kecenderungan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan tekanan inflasi diperkirakan terutama bersumber dari kelompok pendidikan; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya; kelompok makanan, minuman, dan tembakau; serta kelompok transportasi. Pada kelompok pendidikan, tekanan inflasi diperkirakan meningkat seiring berakhirnya efek basis rendah tarif pendidikan tingkat SMP dan SMA pascaimplementasi kebijakan pembebasan biaya Komite Sekolah oleh Pemerintah Provinsi Lampung pada Agustus 2025. Sementara itu, pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, level harga emas dunia yang diperkirakan masih lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya berpotensi mendorong inflasi emas perhiasan secara tahunan. Tekanan pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau antara lain berpotensi bersumber dari peningkatan biaya input industri pengolahan makanan dan minuman, khususnya terkait tertundanya musim giling tebu serta berlanjutnya pembatasan ekspor gula India hingga September 2026. Selain itu, penyesuaian harga rokok diperkirakan berlanjut secara bertahap seiring kenaikan harga tembakau dan biaya distribusi. Pada kelompok transportasi, tekanan inflasi berpotensi meningkat sejalan dengan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar, disertai risiko kenaikan harga BBM nonsubsidi lebih lanjut di tengah harga minyak global yang relatif tinggi serta potensi peningkatan tarif angkutan udara.

Di sisi lain, peningkatan inflasi IHK diperkirakan tertahan oleh membaiknya pasokan sejumlah komoditas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kondisi tersebut didukung oleh masuknya periode panen gadu padi yang berpotensi menahan kenaikan harga beras. Pasokan bawang merah juga diperkirakan membaik sejalan dengan berlanjutnya periode panen di sentra produksi lokal maupun daerah pemasok dari luar provinsi, khususnya Brebes dan Kulon Progo. Selain itu, berlangsungnya periode panen kopi robusta di Lampung diperkirakan meningkatkan ketersediaan pasokan dan menahan tekanan harga kopi kemasan. Perbaikan pasokan sejumlah komoditas pangan tersebut diperkirakan menjadi faktor penyeimbang terhadap potensi peningkatan tekanan harga pada kelompok pendidikan, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta kelompok transportasi pada Triwulan III 2026.

Inflasi pada Triwulan III 2026 diperkirakan tetap terkendali, meskipun terdapat sejumlah risiko yang perlu dicermati. Pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, tekanan harga berpotensi bersumber dari kembali optimalnya penyerapan bahan pangan oleh program strategis pemerintah seiring normalisasi aktivitas sekolah,

Grafik 2.22. Ekspektasi Perubahan Harga 3 & 6 Bulan Ke Depan

Sumber: World Bank, diolah

terutama terhadap komoditas telur ayam ras, daging ayam ras, dan sayuran, serta potensi terbatasnya pasokan ikan akibat kondisi cuaca dan gelombang laut yang kurang kondusif. Di sisi lain, tekanan harga pada kelompok tersebut berpotensi tertahan oleh optimalisasi pemanfaatan dukungan *dryer* dari program Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan antarwaktu, serta potensi koreksi harga CPO global seiring melemahnya permintaan dari negara importir utama dan meningkatnya pasokan pada puncak produksi musiman yang dapat meredam tekanan harga minyak goreng. Sementara itu, pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, peningkatan kuota LPG subsidi di Lampung diperkirakan turut mendukung terkendalinya tekanan harga.

2.5. Pengendalian Inflasi

Dalam rangka stabilitas inflasi Provinsi Lampung di tahun 2026, beberapa upaya pengendalian inflasi telah ditempuh TPID Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota di Lampung selama II 2026. Upaya-upaya dimaksud meliputi:

a. **Monitoring perkembangan harga-harga dan kecukupan pasokan kebutuhan pokok di pasar, distributor, dan gudang oleh TPID baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.** Upaya ini turut dilakukan dalam rangka memastikan barang pokok layak untuk dikonsumsi dan berkualitas baik, di antaranya:

1. Pemantauan harga harian melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang secara aktif disosialisasikan dalam setiap rapat dan *platform* komunikasi koordinasi TPID. Selain itu, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung turut melakukan pemantauan harga secara berkala di lapangan.
2. Penyampaian analisis harian perkembangan harga komoditas bahan pokok oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung berdasarkan data PIHPS, yang didiseminasi melalui *platform* komunikasi bersama TPID Lampung dan Satgas Pangan Lampung sebagai bagian dari *early warningsystem*.

b. **Penguatan Implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS)**

Sebagai tindak lanjut implementasi GPIPS, TPID Provinsi Lampung terus memperkuat upaya peningkatan produktivitas dan stabilitas harga pangan secara *end-to-end*, mulai dari hulu hingga hilir. Langkah tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari program strategis TPID Lampung, yang meliputi:

1. Hilirisasi produk pertanian sebagai upaya peningkatan nilai tambah melalui fasilitasi sarana dan prasarana produksi, antara lain bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), pengembangan demplot budidaya, pembangunan rumah produksi, serta pendampingan teknis pada tahapan pra dan pascapanen.
2. Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), baik intra-provinsi maupun antar-provinsi untuk komoditas pangan strategis berisiko defisit, serta pengembangan aneka produk UMKM, guna memperkuat kesinambungan pasokan dan mengurangi risiko defisit antarwilayah.
3. Peningkatan konsumsi produk olahan dan diversifikasi pangan melalui sosialisasi dan penyelenggaraan *regional event*, dengan fokus pada pengembangan komoditas bernilai tambah seperti beras medium, olahan komoditas hortikultura, dan tepung singkong dalam rangka memperluas substitusi dan mengurangi tekanan pada komoditas segar.
4. Peningkatan kapasitas petani *champion* binaan untuk mendukung implementasi hilirisasi pangan melalui transisi menuju praktik pertanian organik, penguatan mekanisasi, serta pemanfaatan teknologi berbasis *Internet of Things* (IoT) guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi.

c. **Rekomendasi Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung**

Menghadapi risiko inflasi pada triwulan II 2026, beberapa langkah dilakukan oleh TPID Provinsi Lampung dalam rangka menjaga laju inflasi agar berada dalam rentang target $2,5\% \pm 1\%$, antara lain sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga

- Optimalisasi pelaksanaan Gerakan Pasar Murah melalui pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) secara terukur guna menjaga stabilitas harga pasca berakhirnya panen raya tanaman pangan.
- Penguatan monitoring harga dan pasokan secara intensif, khususnya pada komoditas strategis dengan andil inflasi tinggi seperti bawang merah, aneka cabai, telur ayam ras, daging ayam ras, minyak goreng, dan beras.

2. Ketersediaan Pasokan

- Optimalisasi realisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) eksisting sebagai respons dini terhadap

indikasi kenaikan harga atau peningkatan permintaan pada komoditas pangan defisit.

- Penguatan koordinasi antar-OPD untuk mendukung intensifikasi pertanian, memastikan kesiapan dan kecukupan alsintan, optimalisasi irigasi dan sumber air alternatif (sumur bor); serta penguatan sarana pengolahan pasca panen dan distribusi pangan untuk menjaga produksi, pasokan, dan stabilitas harga dalam rangka menghadapi risiko El Nino.
- Menjaga keberlanjutan implementasi toko pengendalian inflasi di seluruh wilayah IHK dan non-IHK sebagai instrumen stabilisasi harga di tingkat konsumen.

3. Kelancaran Distribusi

- Penguatan efektivitas Subsidi Ongkos Angkut (SOA) melalui optimalisasi peran BUMD pangan sebagai operator distribusi, termasuk penyaluran komoditas strategis dari sentra produksi ke kabupaten/kota.
- Peningkatan kesiapan sarana dan prasarana distribusi melalui pemanfaatan Mobil Transportasi Operasi Pasar (TOP), serta koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memprioritaskan perbaikan jalur distribusi kabupaten/kota dan pedesaan yang dilalui angkutan pangan.
- Koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk peningkatan frekuensi penerbangan Jakarta–Lampung dan rute lainnya guna menjaga kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat.

4. Komunikasi efektif

- Penguatan koordinasi dan awareness TPID melalui rapat koordinasi rutin Provinsi dan Kabupaten/Kota, baik formal maupun informal, untuk memantau dinamika harga dan pasokan terkini.
- Penguatan sistem informasi harga dan pasokan melalui integrasi data hasil koordinasi dengan pemerintah daerah dan OPD terkait guna mendukung pengambilan kebijakan yang tepat dan berbasis data.
- Optimalisasi diseminasi informasi inflasi serta kampanye belanja bijak dan diversifikasi pangan melalui media sosial dan media digital luar ruang untuk menjaga ekspektasi inflasi dan meminimalkan risiko *panic buying*.

- Pelaksanaan *High Level Meeting* (HLM) TPID Provinsi Lampung dalam rangka konsolidasi kebijakan dan penguatan komitmen pengendalian inflasi menghadapi HBKN Iduladha, termasuk penetapan langkah antisipatif pada komoditas berisiko tinggi.

d. *Quick Wins* Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung

Diperlukan upaya untuk menahan laju inflasi saat ini dan ke depan, berbagai langkah melalui pengambilan kebijakan yang bersifat *quick win* dan perbaikan faktor struktural, diantaranya:

1. Intensifikasi pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara terarah, dengan fokus pada komoditas strategis yang menunjukkan tekanan harga, terutama beras dan minyak goreng serta komoditas pangan bergejolak lainnya. Pelaksanaan intervensi diarahkan berbasis hasil pemantauan harga dan pasokan agar tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat komoditas.
2. Optimalisasi penyaluran beras SPHP dan penguatan peran Toko Inflasi di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro sebagai pasar penyeimbang untuk memperkuat akses masyarakat terhadap komoditas pangan strategis dengan harga yang terjangkau.
3. Perluasan dan optimalisasi realisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) sebagai respons dini terhadap potensi defisit pasokan, khususnya komoditas hortikultura. Penguatan KAD diarahkan antara lain melalui keberlanjutan pasokan cabai merah Kulon Progo–Kota Metro, bawang merah Kabupaten Solok–Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, serta tindak lanjut kerja sama Kota Bandar Lampung–Kabupaten Bantul untuk penyediaan benih dan replikasi teknik budidaya bawang merah.
4. Penguatan monitoring harga, produksi, dan ketersediaan pasokan melalui *early warning system* dengan mengintegrasikan PIHPS, SPH, SP2KP, neraca pangan, serta e-Horti (sistem informasi hortikultura yang memuat perkembangan produksi, luas tanam, dan prakiraan panen komoditas strategis) guna mendeteksi lebih dini potensi tekanan harga maupun gangguan pasokan.

5. Penguatan kelancaran distribusi pangan melalui optimalisasi Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) untuk mendukung pelaksanaan operasi pasar, GPM, dan KAD, khususnya dalam menjaga kelancaran pasokan beras, bawang merah, dan aneka cabai dari sentra produksi menuju wilayah konsumsi.
6. Penguatan produktivitas dan ketahanan produksi pangan di tengah risiko El Niño, melalui perluasan penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP), optimalisasi *smart fertigation*, pengembangan sarana pembibitan, serta penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk memastikan kesiapan sarana produksi, pengairan, dan sumber air alternatif.
7. Optimalisasi sarana produksi dan pascapanen pangan melalui percepatan pemanfaatan sarana pengeringan dan pengolahan padi, termasuk *dryer*, *Rice Milling Unit* (RMU), dan *Rice Processing Unit* (RPU), serta dukungan sarana pengolahan komoditas pangan lainnya untuk menjaga kualitas hasil produksi, memperpanjang daya simpan, dan memperkuat ketersediaan pasokan antarmusim.
8. Penguatan koordinasi dan komunikasi kebijakan pengendalian inflasi melalui HLM TPID, rapat koordinasi tematik, dan *capacity building*, termasuk penguatan koordinasi dengan Bulog dan perangkat daerah dalam merespons perkembangan harga beras serta edukasi kepada pengelola program strategis pemerintah agar pola penyerapan bahan pangan tetap adaptif terhadap dinamika harga dan ketersediaan pasokan.

BOKS 1

Implementasi *Early Warning System* Harga Pangan Komoditas Utama dalam Rangka Pengendalian Inflasi Di Lampung

Pelaksanaan pengendalian inflasi melalui sinergi TPID di Provinsi Lampung membutuhkan sumber data yang *real time* dan akurat. Pengambilan keputusan di TPID akan lebih efektif apabila tersedia data harga pangan komoditas utama penyumbang inflasi yang seragam, akurat, tepat waktu dan *real time*. Kebutuhan data tersebut menjadi lebih penting apabila dilengkapi dengan penerapan sistem peringatan dini atau *early warning system* (EWS) yang *reliable* dan dapat mengidentifikasi perubahan harga yang tidak normal akibat dari gangguan pasokan yang disebabkan dari peningkatan permintaan, perubahan kondisi cuaca, pola musiman dan ketidaklancaran distribusi pada periode tertentu

Pengembangan EWS harga pangan diarahkan untuk menggeser proses pengendalian inflasi dari respons yang reaktif menjadi lebih antisipatif, terukur, dan berbasis data. EWS memanfaatkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) sebagai basis pembentukan sinyal risiko sehingga perkembangan harga antarwaktu dapat dibandingkan secara konsisten dan dapat diidentifikasi lebih awal. Perkembangan harga komoditas pangan strategis yang cenderung *volatile* dalam waktu relatif singkat akan berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi apabila tidak diantisipasi secara memadai.

Pemantauan harga komoditas pangan strategis telah dilakukan secara rutin namun proses identifikasi tekanan masih memerlukan penguatan melalui indikator kewaspadaan yang lebih objektif dan terukur. Pengamatan terhadap perubahan harga nominal belum selalu dapat membedakan apakah kenaikan yang terjadi merupakan fluktuasi yang masih sesuai dengan pola historis atau telah menunjukkan anomali. Kondisi tersebut menyebabkan penentuan status kewaspadaan, prioritas komoditas, dan waktu tindak lanjut masih membutuhkan asesmen manual serta berpotensi dilakukan setelah tekanan harga berkembang.

Metode yang digunakan untuk penerapan EWS adalah *Indicator of Price Anomalies* (IPA) yang dikembangkan dalam kerangka *Global Information and Early Warning System on Food and Agriculture* (GIEWS) FAO. Baquedano (2015) mengembangkan IPA untuk mengidentifikasi pertumbuhan harga yang abnormal melalui pendekatan pertumbuhan majemuk. Berbeda dengan metode yang membandingkan harga aktual terhadap tren estimasi, IPA menilai pertumbuhan harga terkini relatif terhadap distribusi pertumbuhan historis pada bulan yang sama. Pendekatan tersebut relevan untuk pasar pangan yang memiliki pola musiman, perdagangan antardaerah, maupun beberapa musim produksi.

Perhitungan IPA dilakukan secara bertahap untuk mengubah data harga menjadi indikator anomali yang dapat dibandingkan antar periode. Dasar pembentukan IPA adalah kombinasi dua horizon pertumbuhan harga yaitu *Quarterly Compound Growth Rate* (CQGR) yang mengukur pertumbuhan majemuk dalam tiga bulan untuk menangkap tekanan jangka pendek, sedangkan *Annual Compound Growth Rate* (CAGR) yang mengukur perubahan dalam dua belas bulan untuk menangkap dinamika lintas tahun. Penggunaan dua horizon waktu tersebut bertujuan untuk mengetahui volatilitas tekanan harga jangka pendek dan jangka panjang. Volatilitas harga dihitung dari standar deviasi *log return* bulanan pada jendela tiga dan dua belas bulan, kemudian digunakan untuk membentuk *volatility-adjusted growth* atau vCQGR dan vCAGR. Penyesuaian tersebut bertujuan mengurangi sensitivitas indikator terhadap lonjakan pertumbuhan yang terjadi bersamaan dengan volatilitas yang sangat tinggi. Selanjutnya vCQGR dan vCAGR dibandingkan dengan historical baseline pada bulan yang sama dengan menggunakan *weighted mean* dan *weighted standard deviation* dengan bobot yang lebih besar diberikan kepada observasi yang lebih baru. Hasil standardisasi

membentuk Q-IPA dan A-IPA, yang masing-masing menunjukkan posisi pertumbuhan kuartalan dan tahunan relatif terhadap pola historisnya. Kemudian Q-IPA dan A-IPA digabungkan menjadi IPA akhir menggunakan bobot gamma yang diperoleh melalui *Principal Component Analysis* (PCA). Nilai IPA di bawah 0,5 diklasifikasikan sebagai Normal, nilai 0,5 sampai kurang dari 1 sebagai Waspada (*Price Watch*), sedangkan nilai sekurang-kurangnya 1 diklasifikasikan sebagai Siaga (*Price Alert*).

Hasil pengolahan Juli 2026 menunjukkan bahwa dua komoditas berada pada status Siaga, dua komoditas Waspada, dan enam komoditas Normal.

Dari sepuluh komoditas yang dianalisis, Beras Kualitas Medium mencatat nilai IPA tertinggi sebesar 1,37 dan Beras Kualitas Super sebesar 1,34 sehingga keduanya masuk dalam status Siaga. Bawang Putih dan Daging Ayam Ras masing-masing berada pada status Waspada dengan IPA sebesar 0,91 dan 0,67. Sementara itu, Bawang Merah, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Gula Konsumsi, Minyak Goreng Curah, dan Telur Ayam Ras berada pada status Normal.

Tekanan pada kelompok beras terutama tercermin dari komponen kuartalan yang relatif tinggi. Beras Kualitas Medium memiliki Q-IPA sebesar 1,59 dan A-IPA sebesar 0,08 dengan gamma 0,858, sedangkan Beras Kualitas Super memiliki Q-IPA sebesar 1,53 dan A-IPA sebesar 0,07 dengan gamma 0,873. Kombinasi tersebut menunjukkan bahwa tekanan yang terdeteksi pada Juli 2026 terutama bersumber dari akselerasi harga dalam horizon tiga bulan, sementara komponen tahunan masih relatif dekat dengan *baseline* historis.

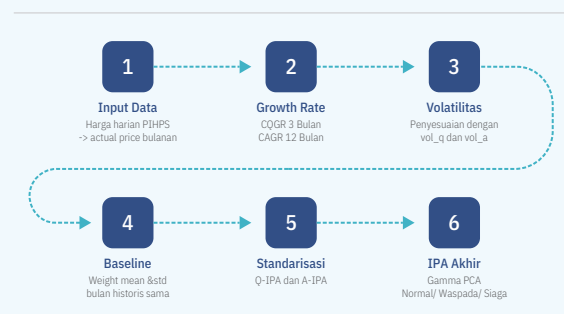
Bawang Putih dan Daging Ayam Ras berada pada status Waspada. Pada Juli 2026, harga aktual bulanan Bawang Putih tercatat Rp40.000/kg dengan Q-IPA sebesar 1,18, A-IPA sebesar -0,54, dan gamma 0,839 sehingga menghasilkan IPA akhir 0,91. Daging Ayam Ras tercatat Rp36.250/kg dengan

Q-IPA sebesar 0,65, A-IPA sebesar 0,98, dan gamma 0,966 sehingga menghasilkan IPA akhir 0,67.

Dinamika Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah menunjukkan pentingnya membaca EWS secara antarwaktu. Kedua komoditas sempat menunjukkan peningkatan sinyal pada periode sebelumnya, namun pada Juli 2026 kembali berada pada kategori Normal, masing-masing dengan IPA sebesar -0,77 dan 0,04. Pergerakan tersebut memperlihatkan bahwa status IPA dapat berubah seiring perkembangan harga relatif terhadap pola historisnya.

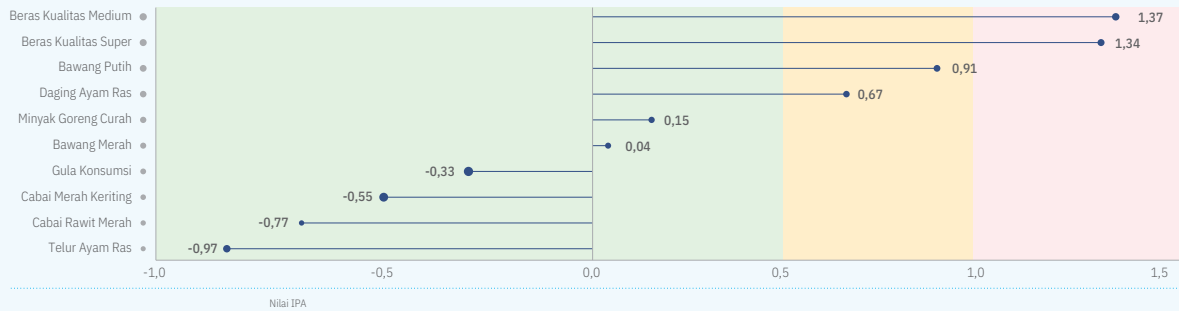
Sinyal EWS dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk meningkatkan intensitas monitoring dan memprioritaskan asesmen komoditas. Status Waspada dan Siaga perlu ditindaklanjuti melalui validasi terhadap produksi, stok, distribusi, cuaca, arus perdagangan, serta informasi pasar. Hasil validasi selanjutnya dapat mendukung penentuan waktu, komoditas, lokasi, dan instrumen pengendalian yang relevan, termasuk operasi pasar, Gerakan Pangan Murah, SPHP, fasilitasi distribusi, maupun penguatan pasokan. Dengan demikian, EWS berfungsi sebagai *decision-support* yang memperkuat ketepatan asesmen tanpa menggantikan pertimbangan fundamental dalam pengendalian inflasi.

Gambar 1. Alur Perhitungan Early Warning System Harga Pangan Berbasis IPA



Sumber: Baqedano (2015), diadaptasi; PIHPS, diolah

Grafik 1. Ringkasan Nilai IPA Komoditas Pangan Provinsi Lampung, Juli 2026

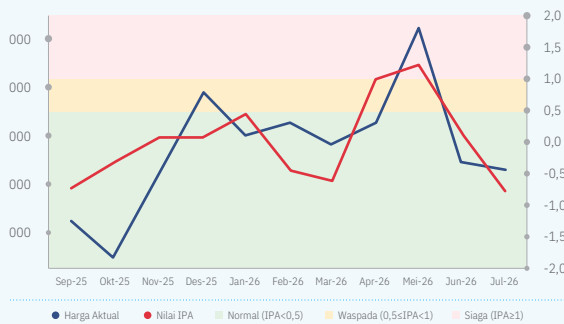


Sumber: PIHPS, diolah.

Catatan: Status IPA merupakan sinyal awal dan perlu dibaca bersama informasi fundamental pasar pangan sebelum digunakan sebagai dasar tindak lanjut kebijakan.

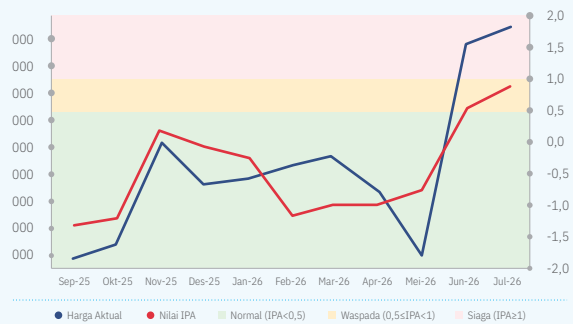
Hasil Pengolahan IPA Komoditas Pangan

Grafik 2. Perkembangan Harga dan Nilai IPA Cabai Rawit Merah



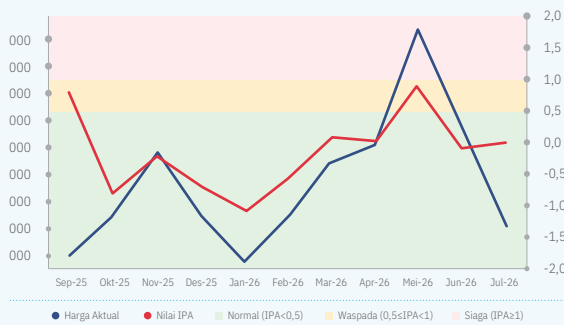
Sumber: PIHPS, diolah.

Grafik 4. Perkembangan Harga dan Nilai IPA Bawang Putih



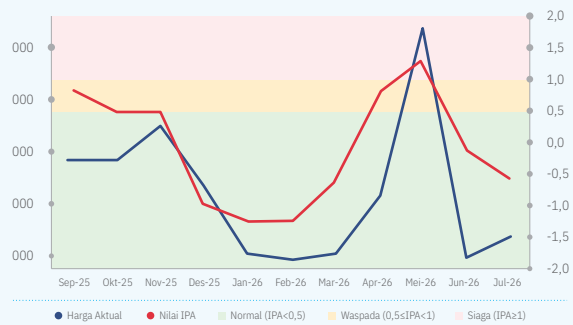
Sumber: PIHPS, diolah.

Grafik 3. Perkembangan Harga dan Nilai IPA Bawang Merah

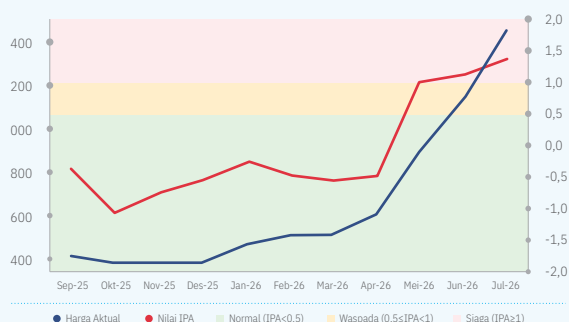


Sumber: PIHPS, diolah.

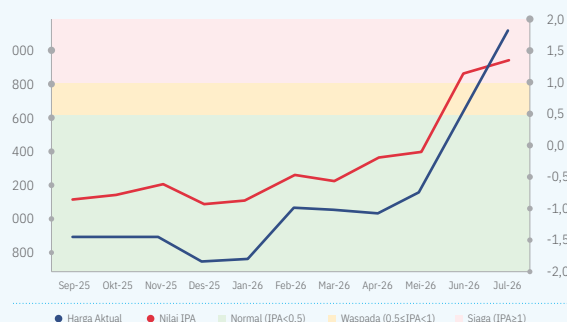
Grafik 5. Perkembangan Harga dan Nilai IPA Cabai Merah Keriting



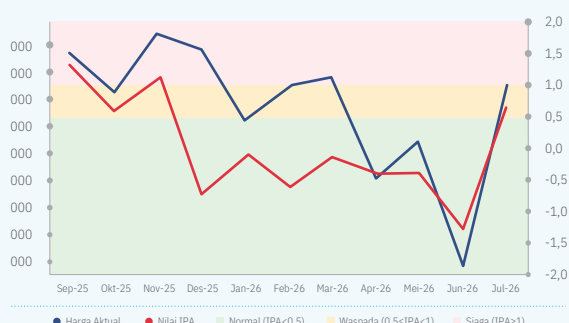
Sumber: PIHPS, diolah.

Grafik 6. Perkembangan Harga dan Nilai IPA Beras Kualitas Medium

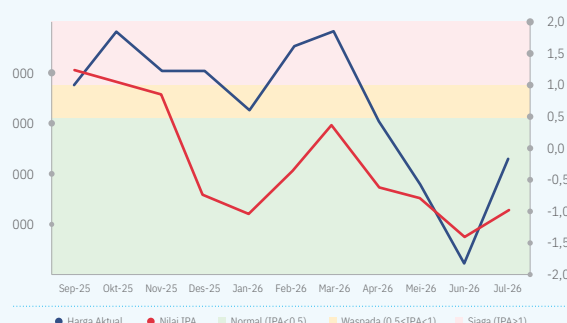
Sumber: PIHPS, diolah.

Grafik 7. Perkembangan Harga dan Nilai IPA Beras Kualitas Super

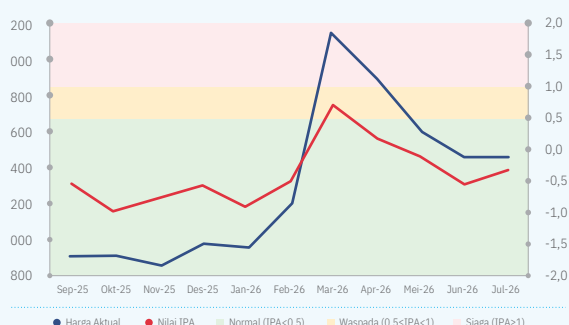
Sumber: PIHPS, diolah.

Grafik 8. Perkembangan Harga dan Nilai IPA Daging Ayam Ras

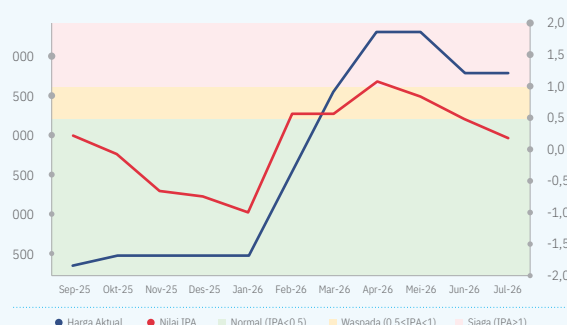
Sumber: PIHPS, diolah.

Grafik 9. Perkembangan Harga dan Nilai IPA Telur Ayam Ras

Sumber: PIHPS, diolah.

Grafik 10. Perkembangan Harga dan Nilai IPA Gula Konsumsi

Sumber: PIHPS, diolah.

Grafik 11. Perkembangan Harga dan Nilai IPA Minyak Goreng Curah

Sumber: PIHPS, diolah.

Catatan: Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah ditampilkan pada urutan awal sebagai grafik utama untuk menyoroti perubahan sinyal EWS antarwaktu.

BOKS 2

Bandar Lampung dan Metro Perkuat Pasokan Bawang Merah Melalui Kerja Sama Antardaerah Dengan Solok Untuk Kendalikan Inflasi Pangan



Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Kota Metro memperkuat sinergi pengendalian inflasi pangan melalui Kerja Sama Antardaerah (KAD) dengan Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antarpemerintah daerah (*Government-to-Government/G2G*) dan perjanjian kerja sama antarpelaku usaha (*Business-to-Business/B2B*) di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Solok pada Kamis, 30 Juli 2026. Kerja sama difokuskan pada penyediaan dan pemasaran bawang merah untuk memperkuat ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga di Lampung. Kerja sama ini juga merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Wilayah dalam rangkaian kegiatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang mendorong optimalisasi perdagangan antar daerah di Sumatra.

Kesepakatan G2G ini ditandatangani langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana; Wali Kota

Metro, Bambang Iman Santoso; dan Bupati Solok, Jon Firman Pandu. Kerja sama G2G ini langsung ditindaklanjuti melalui perjanjian B2B yang dilakukan antara petani *champion* bawang merah Kabupaten Solok dan *offtaker* dari Kota Bandar Lampung serta Kota Metro. Kegiatan tersebut turut disaksikan oleh Perwakilan Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Lampung.

KAD ini menjadi langkah strategis mengingat bawang merah merupakan salah satu komoditas yang kerap memengaruhi inflasi pangan Lampung, sementara produksi lokal belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan, terutama di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Berdasarkan rilis data dari Badan Pusat Statistik, pada Juni 2026, inflasi kota Metro tercatat sebesar 3,07% (yoy) dengan andil bawang merah sebesar 0,15% (yoy). Sementara, inflasi kota Bandar Lampung adalah 2,08% (yoy) dengan andil bawang merah sebesar 0,09% (yoy).

Selanjutnya, berdasarkan pantauan harga PIHPS selama satu bulan terakhir, rata-rata harga bawang merah di Kota Metro sebesar Rp43.431 dengan titik tertinggi pada 22 Juni 2026 mencapai Rp47.000. Sementara, rata-rata harga bawang merah di Kota Bandar Lampung adalah Rp38.863, dengan titik tertinggi pada 25 Juni 2026 yang mencapai Rp42.250. Kedua harga tertinggi ini berada di atas Harga Acuan Penjualan yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang berada pada kisaran Rp36.500 – Rp41.500.



Oleh karena itu, KAD yang dilakukan menjadi sangat strategis untuk menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga bawang merah. Hal ini didukung oleh produksi bawang merah Kabupaten Solok pada tahun 2025 mencapai sekitar 218,9 ribu ton, jauh melebihi produksi Lampung yang sekitar 1,3 ribu ton (BPS, 2026). Kondisi tersebut membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan untuk memperkuat pasokan dan menjaga stabilitas harga di Lampung sekaligus memperluas akses pasar bagi petani Solok.

KAD merupakan instrumen penting untuk menghubungkan daerah surplus dengan daerah yang masih membutuhkan tambahan pasokan. Kerja sama ini diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan, tetapi segera diikuti transaksi yang terukur dan berkelanjutan. Dengan distribusi yang lebih efisien, konsumen memperoleh pasokan dan harga yang lebih stabil, sementara petani memperoleh pasar yang lebih luas.

Inisiatif ini merupakan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) 2026, khususnya melalui penguatan perdagangan komoditas pangan strategis antardaerah di Sumatra. Sejalan dengan hasil Rapat Koordinasi TPID-TPID dan GPIPS Wilayah Sumatera pada Februari 2026, kerja sama ini mendukung penguatan pengendalian inflasi secara berkelanjutan dari sisi pasokan hingga distribusi. Implementasinya ditandai dengan realisasi transaksi perdana antara *offtaker* Bandar Lampung dan Metro dengan petani *champion* Kabupaten Solok yang didukung PT Pos Indonesia sebagai mitra logistik.

Pemerintah Kabupaten Solok menyambut kerja sama tersebut sebagai upaya memperluas kepastian pasar dan meningkatkan kesejahteraan petani. Sementara itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Kota Metro memandang kemitraan dengan daerah produsen penting untuk menjaga pasokan pangan pada wilayah pusat konsumsi dan

jasa. Kesepakatan G2G menjadi payung koordinasi, sedangkan perjanjian B2B memastikan komitmen diterjemahkan ke dalam transaksi dengan kejelasan volume, mutu, harga, dan mekanisme distribusi.

Ke depan, kerja sama akan diarahkan pada realisasi transaksi yang berkelanjutan dan terukur, didukung pertukaran informasi produksi, kebutuhan, harga, dan logistik serta evaluasi pelaksanaan secara berkala.

Tidak hanya berhenti pada KAD, perwakilan pemerintah daerah di Lampung juga mempelajari *best practices* Kabupaten Solok dalam pengembangan kawasan bawang merah, tata kelola budidaya, pembinaan kelembagaan kelompok tani, dan sistem perbenihan varietas lokal SS Sakato sebagai masukan bagi pengembangan sentra produksi di Lampung. Dengan transaksi yang berkelanjutan dan tata kelola yang kuat, KAD ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, dan melindungi daya beli masyarakat. Bank Indonesia akan terus mendukung penguatan koordinasi, fasilitasi kemitraan, pemanfaatan data, serta peningkatan kapasitas petani dan pelaku usaha guna memastikan manfaat kerja sama berlangsung secara berkelanjutan.

BOKS 3

Penguatan Resiliensi Usaha Tani Cabai Untuk Mendukung Stabilitas Pasokan dan Inflasi Lampung

Cabai sebagai Komoditas Strategis dalam Dinamika Inflasi Lampung

Perkembangan inflasi Provinsi Lampung hingga Juni 2026 tetap terkendali dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$. Pada Juni 2026, inflasi Lampung tercatat sebesar 2,46% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 1,94% (yoy) dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34% (yoy). Secara bulanan, IHK Lampung mengalami inflasi sebesar 0,55% (mtm), lebih rendah dari inflasi sebesar 0,82% (mtm) pada Mei 2026.

Di tengah perkembangan tersebut, cabai menjadi salah satu komoditas hortikultura dengan volatilitas harga yang tinggi. Sepanjang semester I 2026, cabai merah dan cabai rawit beberapa kali masuk sebagai komoditas utama penyumbang inflasi maupun deflasi bulanan. Pada Januari, cabai merah menjadi penyumbang deflasi terbesar dengan andil -0,25%, disertai cabai rawit sebesar -0,06%. Pada Mei, arah tekanan berbalik, cabai merah menjadi komoditas dengan andil inflasi terbesar sebesar

0,15%, sementara cabai rawit turut memberikan andil 0,06%. Memasuki Juni, peningkatan pasokan kembali menekan harga, dengan cabai merah memberikan andil deflasi -0,03% dan cabai rawit sebesar -0,02% pada Juni.

Perubahan arah andil yang relatif cepat tersebut mencerminkan karakter cabai sebagai komoditas *Perishabel*. Ketika produksi menurun dan pasokan mengeat, harga dapat meningkat cukup signifikan dalam waktu singkat. Sebaliknya, ketika panen berlangsung dan pasokan meningkat, harga menyesuaikan dengan penurunan. Bagi petani, kondisi ini menciptakan *trade-off*, dimana gangguan produksi dapat menurunkan volume hasil panen meskipun harga meningkat, sementara panen yang melimpah berpotensi diikuti penurunan harga. Oleh karena itu, penguatan ketahanan komoditas cabai perlu diarahkan tidak hanya pada stabilisasi harga, tetapi juga pada kesinambungan produksi dan keberlanjutan usaha petani.

Gambar B3.1. Andil Komoditas Inflasi/Deflasi Bulanan Utama di Provinsi Lampung pada Semester I 2026

Januari 2026		Februari 2026		Maret 2026		April 2026		Mei 2026		Juni 2026	
ANDIL INFLASI		ANDIL INFLASI		ANDIL INFLASI		ANDIL INFLASI		ANDIL INFLASI		ANDIL INFLASI	
Emas Perhiasan	0,08	Emas Perhiasan	0,09	Daging Ayam Ras	0,05	Minyak Goreng	0,09	Cabai Merah	0,15	Bensin	0,21
Tomat	0,05	Daging Ayam Ras	0,05	Bensin	0,04	Ikan Nila	0,04	Bawang Merah	0,10	Bawang Merah	0,07
Kangkung	0,04	Bawang Merah	0,04	Beras	0,03	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,03	Cabai Rawit	0,06	Tomat	0,05
Bayam	0,03	Cabai Rawit	0,04	Telur Ayam Ras	0,03	Beras	0,03	Tomat	0,06	Bawang Putih	0,04
Nasi dengan Lauk	0,03	Tomat	0,04	Vitamin	0,03	Cabai Merah	0,03	Minyak Goreng	0,06	Minyak Goreng	0,02
ANDIL DEFLASI		ANDIL DEFLASI		ANDIL DEFLASI		ANDIL DEFLASI		ANDIL DEFLASI		ANDIL DEFLASI	
Cabai Merah	-0,25	Bensin	-0,05	Cabai Merah	-0,09	Cabai Rawit	-0,06	Telur Ayam Ras	-0,07	Cabai Merah	-0,03
Bawang Merah	-0,12	Susu Cair Kemasan	-0,01	Celana Panjang Jeans Pria	-0,04	Emas Perhiasan	-0,03	Sampo	-0,02	Telur Ayam Ras	-0,02
Cabai Rawit	-0,06	Kangkung	-0,01	Tomat	-0,02	Daging Ayam Ras	-0,02	Kangkung	-0,02	Cabai Rawit	-0,02
Jeruk	-0,03	Hand Body Lotion	-0,01	Obat Gosok	-0,02	Angkutan Antar Kota	-0,01	Bawang Putih	-0,02	Daging Ayam Ras	-0,02
Bensin	-0,03	Wortel	-0,01	Emas Perhiasan	-0,02	Cumi-Cumi	-0,01	Emas Perhiasan	-0,01	Nugget	-0,02

Sumber: BPS, diolah, (%mtm)

Risiko Produksi Menjadi Tantangan Utama Kontinuitas Pasokan

Keberlanjutan produksi cabai masih dihadapkan pada risiko usaha tani yang relatif tinggi. Petani mengeluarkan biaya sejak awal musim tanam, mulai dari benih, pupuk, tenaga kerja, pengairan, hingga pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT). Sementara itu, keberhasilan produksi tetap dipengaruhi faktor eksternal yang tidak seluruhnya dapat dikendalikan. Kekeringan, cuaca ekstrem, dan gangguan OPT dapat menurunkan produktivitas bahkan menyebabkan gagal panen. Risiko tersebut memperkuat kebutuhan akan intervensi yang tidak hanya meningkatkan hasil produksi, tetapi juga memperkuat daya tahan petani terhadap gangguan usaha tani.

Merespons tantangan tersebut, Bank Indonesia berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKPTPH) Provinsi Lampung melaksanakan *Capacity Building* Penguatan Produktivitas dan Perlindungan Usaha Tani Hortikultura pada 19–20 Agustus 2026. Kegiatan ini melibatkan petani champion dan penyuluh yang mewakili masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung, sehingga penguatan kapasitas diharapkan dapat menjangkau wilayah produksi hortikultura secara lebih luas dan mendorong proses diseminasi praktik budidaya serta

pengelolaan risiko di tingkat petani. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) untuk memperkuat sisi hulu melalui peningkatan produktivitas, penerapan praktik budidaya yang lebih baik, pengendalian risiko produksi, serta penguatan perlindungan usaha tani cabai dan bawang merah.

Penguatan Produktivitas melalui Perbaikan Budidaya, Kesehatan Tanah, dan PHT

Penguatan produktivitas cabai menjadi bagian penting dari strategi GPIPS 2026 untuk menjaga kesinambungan pasokan komoditas strategis. Upaya tersebut dilakukan secara *end-to-end*, mulai dari produksi, hilirisasi dan kelembagaan, Kerja Sama Antar Daerah (KAD), hingga fasilitasi distribusi. Pada tingkat usaha tani, penguatan dimulai dari membenahan fondasi budidaya melalui pendekatan “sehatkan tanah, sehatkan tanaman”. Pendekatan ini menempatkan kualitas tanah sebagai prasyarat bagi pertumbuhan tanaman yang optimal, antara lain melalui penggunaan benih bermutu dan varietas unggul, analisis tanah, pengapuran menggunakan dolomit, penambahan bahan organik, serta pemanfaatan mikroorganisme bermanfaat seperti *Plant Growth Promoting Rhizobacteria* (PGPR) dan *Trichoderma*. Perbaikan tersebut kemudian diperkuat dengan pemanfaatan pupuk hayati cair (PHC) untuk mendukung proses biologis tanah,

Gambar B3.2. Pembukaan *Capacity Building* Penguatan Produktivitas dan Perlindungan Usaha Tani Hortikultura



Gambar B3.3. Talkshow Penguatan Kapasitas Petani dalam Penerapan Budidaya Hortikultura



meningkatkan ketersediaan dan efisiensi unsur hara, serta memperbaiki daya dukung tanah terhadap pertumbuhan tanaman. Dengan demikian, peningkatan produktivitas diarahkan bukan hanya melalui penambahan input, tetapi dengan membangun kondisi tanah dan tanaman yang lebih sehat sehingga proses budidaya dapat berlangsung lebih efisien dan berkelanjutan.

Gambar B3.4. Praktik Penguatan Kapasitas Budidaya Hortikultura dalam *Capacity Building* Penguatan Produktivitas dan Perlindungan Usaha Tani Hortikultura



Setelah fondasi budidaya diperkuat, menjaga hasil produksi dari risiko serangan **Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)** menjadi tahapan berikutnya untuk memastikan peningkatan produktivitas dapat dipertahankan hingga masa panen. Hal ini menjadi penting karena tanaman cabai rentan terhadap berbagai hama dan penyakit yang dapat menurunkan hasil bahkan mengganggu kontinuitas produksi. Oleh karena itu, penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dilakukan sebagai pendekatan pengelolaan risiko yang menyertai seluruh siklus budidaya, mulai dari persiapan lahan, pemilihan dan perlakuan benih, pengaturan pola serta jarak tanam, hingga pemantauan kondisi tanaman secara rutin. Pengendalian dilakukan secara bertahap melalui sanitasi lahan, penggunaan benih sehat dan varietas unggul, pengaturan drainase, pemanfaatan mikroorganisme, penggunaan perangkap dan musuh alami, serta eradikasi selektif terhadap tanaman yang

terserang, sementara pestisida digunakan secara selektif apabila diperlukan. Melalui kombinasi perbaikan kesehatan tanah dan penerapan PHT, penguatan produktivitas cabai diharapkan tidak hanya meningkatkan hasil per satuan lahan, tetapi juga menekan risiko kehilangan hasil dan membangun sistem produksi yang lebih resilien terhadap gangguan budidaya.

Asuransi Pertanian sebagai Lapisan Perlindungan Risiko Residual

Penguatan budidaya dan pengendalian risiko produksi belum sepenuhnya menghilangkan potensi kerugian yang dihadapi petani. Meskipun kesehatan tanah, penerapan PHT, teknologi budidaya, dan dukungan sarana pengairan telah diperkuat, sebagian risiko tetap berasal dari faktor eksternal yang sulit dikendalikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi peningkatan produktivitas perlu dilengkapi dengan instrumen yang tidak hanya menekan kemungkinan terjadinya gangguan, tetapi juga mampu mengurangi dampak finansial ketika gangguan benar-benar terjadi. Dalam konteks ini, asuransi pertanian berperan sebagai instrumen transfer risiko yang melengkapi upaya pencegahan, sehingga petani tetap memiliki kapasitas untuk mempertahankan usaha dan kembali melakukan penanaman pada musim berikutnya.

Skema Asuransi Mikro Tanaman menjadi salah satu bentuk perlindungan yang dapat mendukung keberlanjutan usaha tani berbasis manajemen risiko. Skema ini diarahkan untuk mendukung budidaya pertanian berkelanjutan melalui penerapan teknologi pertanian, manajemen risiko terintegrasi, dan *Good Agricultural Practices* (GAP). Nilai pertanggungan mengacu pada biaya operasional pembelian input selama satu musim tanam, sehingga perlindungan yang diberikan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar petani untuk memulihkan kapasitas produksinya. Risiko yang

dapat dijamin mencakup risiko standar seperti kekeringan dan angin puting beliung, serta dapat diperluas terhadap bencana alam dan hama/penyakit tanaman sesuai ketentuan polis. Pada saat yang sama, implementasi asuransi juga mendorong tata kelola usaha tani yang lebih tertib melalui penyusunan RAB, pendampingan sejak pratanam hingga pascapanen, serta pencatatan dan pelaporan hasil panen. Hal ini disampaikan pula dalam *capacity building* 19 – 20 Agustus 2026, sehingga petani memperoleh pemahaman yang menyeluruh terkait pertanian.

Integrasi Penguatan Produktivitas dan Perlindungan Usaha Tani untuk Mendukung Stabilitas Pasokan

Dengan demikian, pengelolaan risiko usaha tani hortikultura perlu dibangun secara berlapis dan saling melengkapi, mulai dari penguatan produktivitas hingga perlindungan terhadap risiko finansial. Lapisan pertama diarahkan pada perbaikan budidaya dan kesehatan tanah untuk meningkatkan peluang keberhasilan produksi; lapisan kedua pada penurunan risiko kehilangan hasil melalui PHT, teknologi, dan dukungan sarana produksi; sementara lapisan ketiga berfungsi memitigasi risiko residual melalui asuransi pertanian. Integrasi ketiga lapisan tersebut penting karena keberlanjutan pasokan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan petani menghasilkan produksi yang tinggi, tetapi juga oleh kemampuannya untuk tetap bertahan dan kembali produktif setelah menghadapi gangguan. Upaya tersebut turut diperkuat melalui sinergi Bank Indonesia dan

Pemerintah Provinsi Lampung melalui DKTPH, termasuk pemanfaatan e-Horti sebagai sarana pemantauan dan evaluasi produksi hortikultura agar intervensi produktivitas dan pengelolaan risiko dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Dalam jangka menengah, penguatan produktivitas dan perlindungan usaha tani hortikultura diharapkan memperkuat resiliensi petani sekaligus menjaga kontinuitas pasokan cabai sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi dari sisi pasokan. Petani yang lebih adaptif terhadap dinamika iklim, lebih mampu mengendalikan OPT, dan memiliki perlindungan terhadap risiko residual akan mempunyai peluang lebih besar untuk mempertahankan produksi serta kembali melakukan penanaman pada musim berikutnya. Kontinuitas produksi yang lebih terjaga pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi frekuensi dan besaran gejolak harga akibat gangguan pasokan, sehingga volatilitas komoditas hortikultura terhadap inflasi Provinsi Lampung dapat lebih terkendali.

Gambar B3.5. Kerangka Penguatan Produktivitas dan Perlindungan Usaha Tani





Pembiayaan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan, serta UMKM

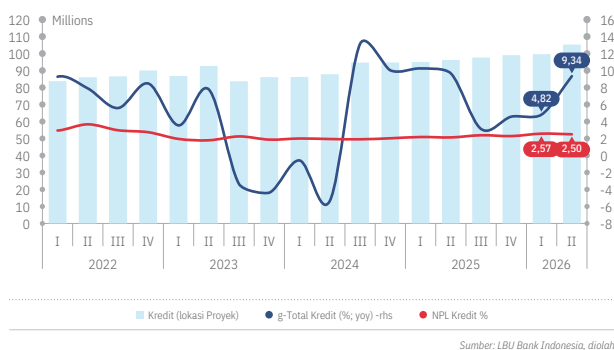
- Penyaluran kredit di Provinsi Lampung berdasarkan lokasi proyek tumbuh menguat dan risikonya tetap terjaga. Pada triwulan II 2026, penyaluran kredit tercatat tumbuh sebesar 9,34% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,82% (yoy).
- Pada triwulan II 2026, kredit konsumsi rumah tangga tercatat sebesar Rp30,76 triliun atau tumbuh 10,65% (yoy). Pertumbuhan kredit rumah tangga ditopang oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang masing-masing tumbuh sebesar 10,84% (yoy) dan 25,04% (yoy).
- Kinerja kredit rumah tangga sejalan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perseorangan pada triwulan II 2026 di Provinsi Lampung yang mencapai Rp50,38 triliun atau 74,64% dari total DPK. Pertumbuhan DPK perseorangan pada triwulan laporan tercatat sebesar 4,97% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,32% (yoy).
- Kinerja penyaluran kredit perbankan kepada sektor korporasi pada triwulan II 2026 meningkat signifikan. Kredit korporasi tercatat mencapai Rp74,48 triliun atau tumbuh 8,80% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,55% (yoy).
- Kredit UMKM tumbuh positif pada triwulan II 2026. Kredit yang disalurkan pada periode laporan tercatat sebesar Rp32,99 triliun atau tumbuh 1,91% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,87% (yoy).

3.1. Pembiayaan Daerah

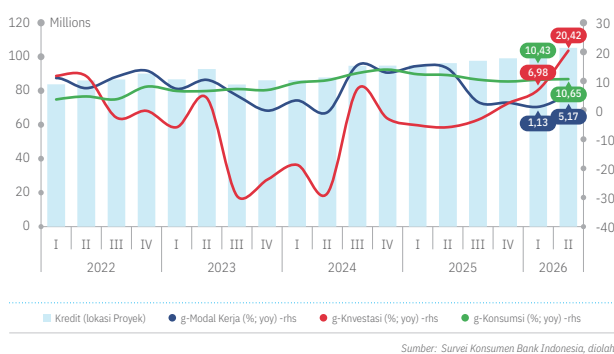
Penyaluran kredit di Provinsi Lampung berdasarkan lokasi proyek tumbuh menguat dan risikonya tetap terjaga. Pada triwulan II 2026, penyaluran kredit tercatat tumbuh sebesar 9,34% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,82% (yoy). Akselerasi pertumbuhan tersebut masih diiringi dengan kualitas kredit yang terkendali, tecermin dari rasio *Non-Performing Loan* (NPL) sebesar 2,50%, menurun dari 2,57% pada triwulan sebelumnya dan tetap berada di bawah ambang batas risiko kredit ($\leq 5\%$) (Grafik 3.1).

Penguatan pertumbuhan kredit pada periode laporan utamanya didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi sebesar 20,42% (yoy), secara signifikan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,98% (yoy). Kredit modal kerja juga mencatatkan perbaikan kinerja dengan tumbuh sebesar 5,17% (yoy), meningkat dari 1,13% (yoy) pada triwulan I 2026. Sejalan dengan itu, kredit konsumsi tetap tumbuh tinggi sebesar 10,65% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 10,43% (yoy) (Grafik 3.2 dan Grafik 3.3).

Grafik 3.1. Perkembangan Kredit dan NPL Prov. Lampung



Grafik 3.3. Kredit Prov. Lampung berdasarkan Jenis Penggunaan

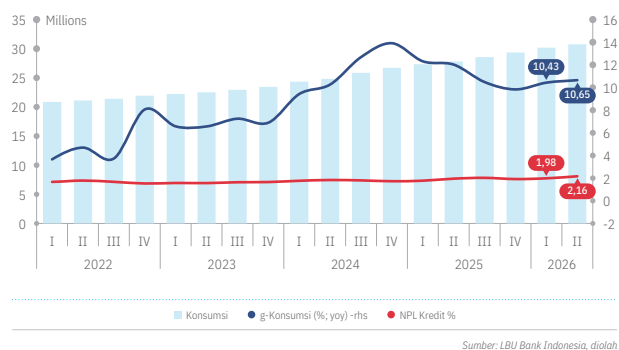


Berdasarkan jenis usahanya, penyaluran kredit konvensional dan pembiayaan syariah pada triwulan II 2026 masing-masing tumbuh sebesar 4,81% (yoy) dan 22,30% (yoy) (Grafik 3.4). Pembiayaan syariah tumbuh kuat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 17,82% (yoy), sementara kredit konvensional pada triwulan II 2026 tumbuh dengan sedikit moderasi dari 4,92% (yoy) pada triwulan I 2026.

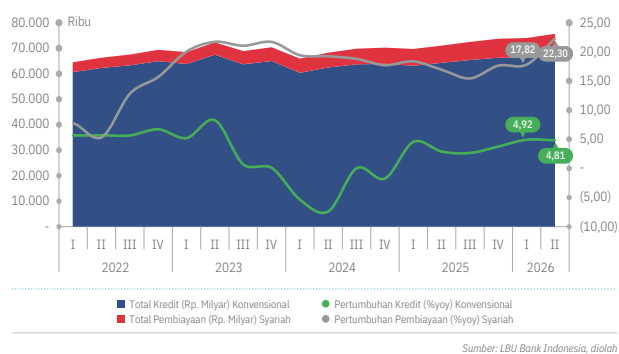
Secara spasial, kredit rumah tangga Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan positif yang ditopang oleh berlanjutnya beberapa pelanggaran kebijakan makroprudensial, seperti insentif berupa kelonggaran uang muka (*down payment*) nol persen, insentif pada penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR), dan insentif kredit kendaraan bermotor (KKB).

Kinerja perbankan dalam penyaluran kredit pada sektor UMKM pada periode laporan juga masih tercatat tumbuh pada triwulan II 2026. Pertumbuhan kredit UMKM terpantau sebesar 1,91% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,87% (yoy) (Grafik 3.5). Sinergi pemerintah daerah dan

Grafik 3.2. Kredit Konsumsi Prov. Lampung



Grafik 3.4. Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Usaha (Konvensional dan Syariah)



instansi/lembaga terkait untuk mengembangkan UMKM menjadi salah satu *push factor* yang mendorong penyaluran kredit pada sektor ini. Pertumbuhan kredit UMKM pada triwulan laporan utamanya ditopang oleh UMKM sektor mikro (52,41%), dilanjutkan sektor kecil (33,27%), dan sektor menengah (14,31%).

Bank Indonesia juga tetap menempuh kebijakan makprudensial yang akomodatif, termasuk penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makprudensial (KLM), mempertahankan rasio *Loan to Value* (LTV) dan *Financing to Value* (FTV) properti hingga 100%, serta kebijakan Rasio Intermediasi Makprudensial (RIM) yang tetap berada pada kisaran target 84–94%, guna memperkuat fungsi intermediasi perbankan dan meningkatkan akses pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk UMKM. Dengan dukungan likuiditas yang memadai, sektor usaha diperkirakan tetap memperoleh akses pembiayaan yang luas untuk menopang aktivitas produksi, investasi, dan ekspansi usaha secara berkelanjutan.

Sejak 1 Desember 2025, Bank Indonesia memperkuat KLM melalui skema berbasis kinerja penyaluran kredit/pembiayaan perbankan (*performance-based*) dan berorientasi ke depan (*forward-looking*), sehingga insentif tidak lagi hanya didasarkan pada realisasi penyaluran kredit, tetapi juga mempertimbangkan komitmen pertumbuhan kredit dan efektivitas transmisi suku bunga perbankan.

Hingga minggu pertama Juni 2026, Bank Indonesia mencatat insentif KLM yang telah disalurkan dalam skala nasional mencapai Rp418,1 triliun, terdiri dari Rp355,6 triliun melalui *lending channel* dan Rp62,5 triliun melalui *interest rate channel*. Berdasarkan kelompok bank, insentif tersebut disalurkan kepada bank BUMN sebesar Rp209,6 triliun, bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar Rp169,9 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp30,8 triliun, serta kantor cabang bank

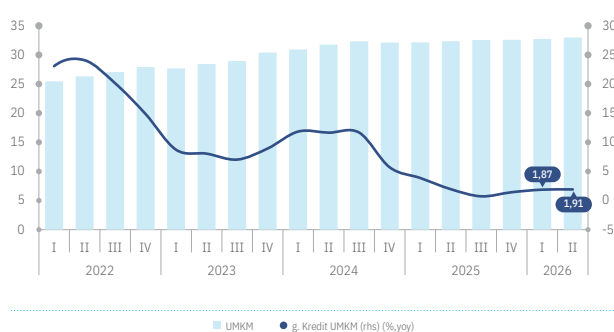
asing (KCBA) sebesar Rp7,8 triliun. Kebijakan tersebut diperkirakan semakin memperkuat fungsi intermediasi perbankan dan meningkatkan akses pembiayaan bagi dunia usaha termasuk UMKM.

Dukungan berkelanjutan juga dilakukan oleh Bank Indonesia melalui bauran kebijakan moneter, makprudensial, dan sistem pembayaran yang diarahkan untuk menjaga stabilitas perekonomian sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia tanggal 17–18 Juni 2026, BI-Rate dinaikkan sebesar 25 bps menjadi 5,75%, dengan suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 bps menjadi 4,75% dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 6,50%. Kenaikan tersebut merupakan langkah lanjutan setelah BI-Rate dinaikkan sebesar 50 bps menjadi 5,25% pada RDG 19–20 Mei 2026 dan sebesar 25 bps menjadi 5,50% pada RDG Mingguan 9 Juni 2026. Keputusan tersebut ditempuh untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah *pre-emptive* untuk menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada tahun 2026–2027. Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan moneter, termasuk intervensi di pasar valas dan pengelolaan likuiditas, guna menjaga ketahanan eksternal dan stabilitas perekonomian nasional.

3.1.1. Asesmen Sektor Rumah Tangga

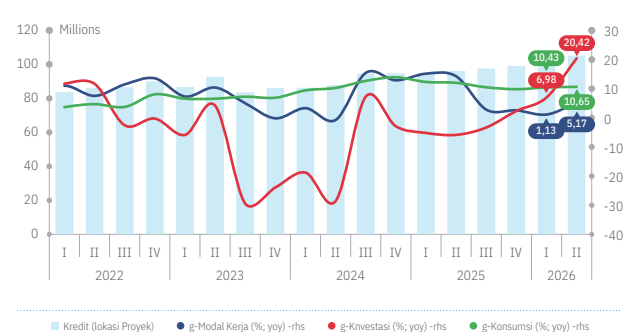
Pada triwulan II 2026, kredit konsumsi rumah tangga tumbuh dengan realisasi sebesar Rp30,76 triliun atau tumbuh sebesar 10,65% (yoy) (Grafik 3.6). Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 10,43% (yoy), sekaligus melanjutkan tren pertumbuhan dua digit yang telah berlangsung sejak triwulan sebelumnya. Hal tersebut sejalan dengan hasil Survei Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia dengan capaian Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang secara

Grafik 3.5. Perkembangan Kredit UMKM Provinsi Lampung



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.6. Perkembangan Kredit Konsumsi Rumah Tangga



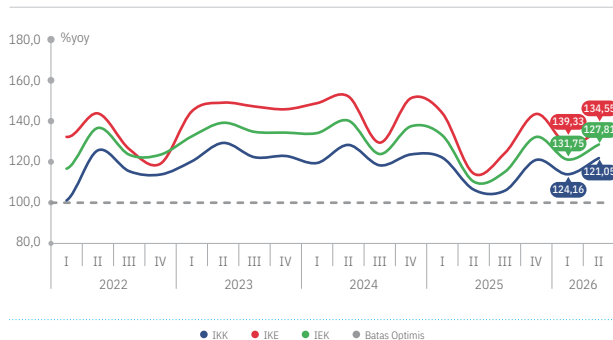
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

rata-rata pada triwulan II 2026 meningkat dan berada di atas batas optimis indeks, atau senilai 127,81, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berada pada nilai 120,33. Positifnya IKK didorong oleh pertumbuhan positif rata-rata triwulanan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumsi (IEK), yang masing-masing senilai 121,06 dan 134,56 (Grafik 3.7).

Adapun, pertumbuhan kredit sektor rumah tangga terpantau ditopang oleh kinerja positif Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang masing-masing tumbuh sebesar 10,84% (yoy) dan 25,04% (yoy) pada triwulan laporan.

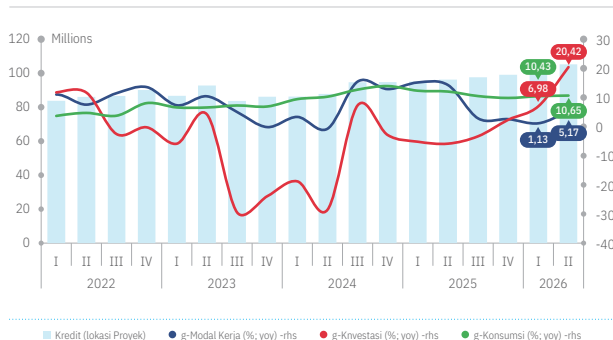
KPR tumbuh positif sebesar 10,84% (yoy) pada triwulan berjalan, sedikit meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 10,73% (yoy). Kinerja tersebut ditopang oleh berlanjutnya insentif berupa pelonggaran rasio *Loan to Value* (LTV) / *Financing to Value* (FTV) untuk kredit/pembiayaan properti, serta insentif fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk properti yang terutama menyasar segmen menengah. Insentif PPN DTP juga diberikan untuk pembelian rumah komersial dengan nilai di bawah Rp5 miliar sehingga turut mendorong pertumbuhan kredit rumah toko dan rumah kantor.

Grafik 3.7. Indeks Keyakinan Konsumen



Sumber: Survei Konsumen BI, diolah

Grafik 3.8. Perkembangan Kredit Konsumsi Rumah Tangga



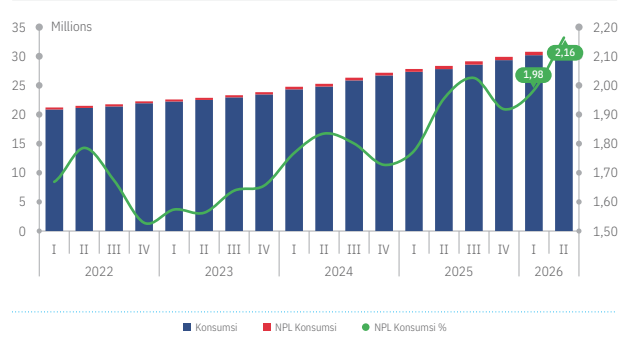
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya mendukung program satu juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat turut memberikan subsidi bunga dan program perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan penyaluran KPR di Provinsi Lampung. Sementara itu, KKB tumbuh sebesar 25,04% (yoy), melandai dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 34,25% (yoy) namun tetap berada pada level yang tinggi.

Kualitas kredit rumah tangga tetap terjaga di tengah peningkatan kinerja penyaluran kredit, tecermin dari besaran *Non-Performing Loan* (NPL) yang tetap berada di bawah ambang batasnya sebesar 5%. NPL kredit rumah tangga pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 2,16%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,98%, namun masih berada pada level yang terkendali (Grafik 3.9).

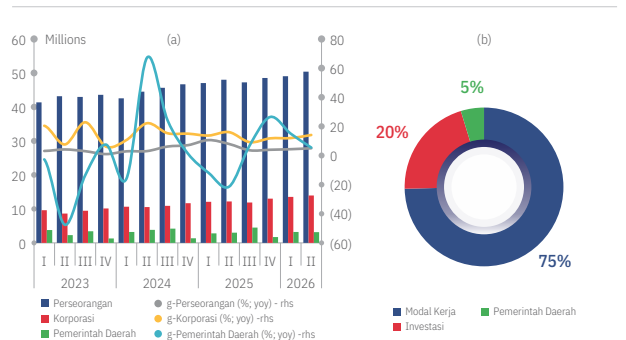
Kinerja kredit yang baik sejalan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perseorangan pada triwulan II 2026 di Provinsi Lampung yang mencapai Rp50,38 triliun atau 74,64% dari total DPK. **Pertumbuhan DPK perseorangan pada triwulan laporan tercatat sebesar 4,97% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan**

Grafik 3.9. NPL Kredit Konsumsi Rumah Tangga

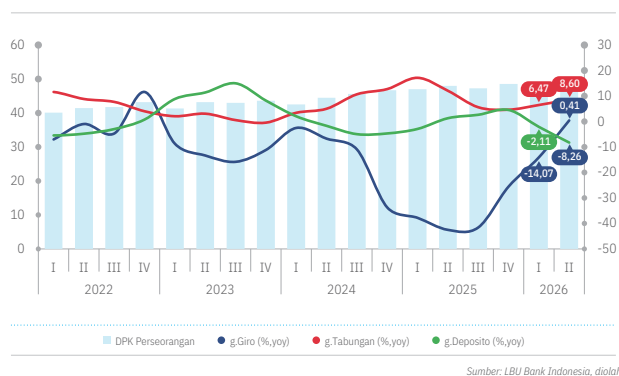


Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.10. DPK Berdasarkan Jenis Nasabah



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.11. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Berdasarkan Jenis Penggunaan

sebelumnya yang sebesar 4,32% (yoy). Komposisi DPK perseorangan pada triwulan II 2026 didominasi oleh tabungan dengan pangsa 80,25%, diikuti deposito dengan pangsa 18,10%, dan giro dengan pangsa 1,65% (Grafik 3.10).

Pertumbuhan DPK perseorangan pada triwulan laporan utamanya ditopang oleh pertumbuhan tabungan sebesar 8,60% (yoy), meningkat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 6,47% (yoy). Kinerja DPK pada instrumen giro juga membaik dan kembali tumbuh positif sebesar 0,41% (yoy) setelah berkontraksi sebesar 14,07% (yoy) pada triwulan I 2026. Di sisi lain, pertumbuhan DPK perseorangan masih tertahan oleh kinerja instrumen deposito yang mengalami kontraksi sebesar 8,26% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya yang sebesar 2,11% (yoy) (Grafik 3.11).

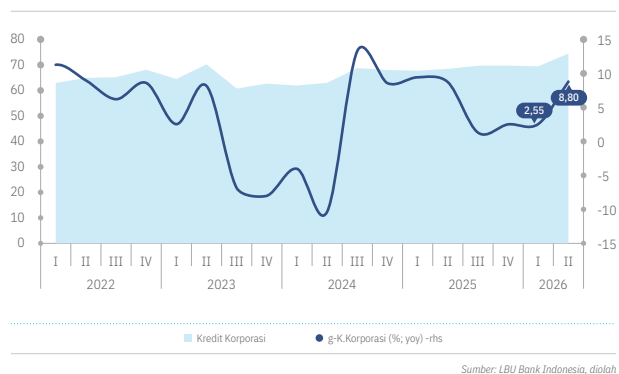
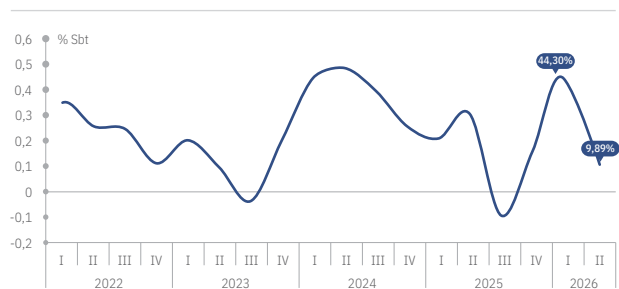
3.1.2. Asesmen Sektor Korporasi

Kinerja penyaluran kredit perbankan kepada sektor korporasi pada triwulan II 2026 meningkat signifikan. Kredit perbankan Provinsi Lampung untuk korporasi pada triwulan II 2026 tercatat mencapai Rp74,48 triliun atau tumbuh sebesar 8,80% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,55% (yoy) (Grafik 3.12). Pertumbuhan kredit di sektor korporasi ini turut mendorong kinerja kredit Provinsi Lampung secara menyeluruh karena memiliki pangsa yang dominan, yaitu sebesar 70,77% dari total kredit yang disalurkan.

Di sisi lain, hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) menunjukkan perkembangan kegiatan usaha yang termoderasi pada triwulan laporan. Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Kegiatan Usaha tercatat sebesar 9,89%, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 44,30% (Grafik 3.13). Moderasi tersebut

terutama bersumber dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan seiring berlalunya puncak musim panen. Perbedaan arah antara akselerasi kredit korporasi dan moderasi SBT mengindikasikan bahwa ekspansi pembiayaan pada triwulan laporan lebih banyak diarahkan pada pembentukan kapasitas usaha ke depan, sebagaimana tecermin dari tingginya pertumbuhan kredit investasi.

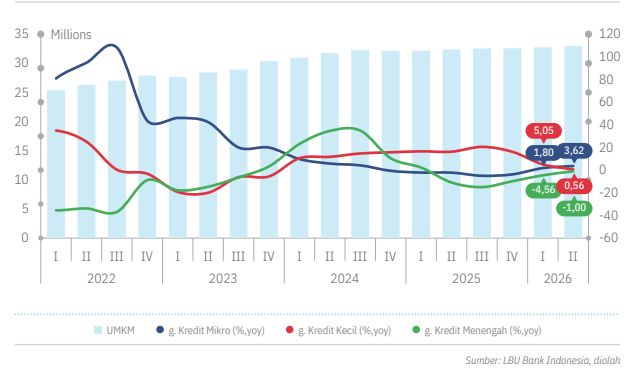
Sejalan dengan itu, pertumbuhan DPK korporasi di Provinsi Lampung pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 14,09% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 11,97% (yoy). Pertumbuhan DPK korporasi utamanya ditopang oleh instrumen tabungan yang tumbuh sebesar 31,69% (yoy), meskipun melandai dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 49,91% (yoy). Komponen giro juga mengalami pertumbuhan sebesar 11,44% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 9,79% (yoy). Perbaikan signifikan juga terjadi pada instrumen deposito yang tumbuh sebesar 8,54% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya berkontraksi sebesar 5,20% (yoy), sejalan dengan meningkatnya daya tarik imbal hasil simpanan berjangka pasca kenaikan suku bunga kebijakan (Grafik 3.14).

Grafik 3.12. Pertumbuhan Kredit Korporasi**Grafik 3.13. SBT Perkembangan Kegiatan Usaha**

Grafik 3.14. DPK Kredit Korporasi



Grafik 3.16. Pertumbuhan Kredit UMKM Mikro, Kecil, dan Menengah



3.2. Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kredit UMKM Provinsi Lampung tumbuh positif pada triwulan II 2026. Kredit yang disalurkan pada periode laporan tercatat sebesar Rp32,99 triliun atau tumbuh 1,91% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,87% (yoy). Pertumbuhan tersebut utamanya ditopang oleh UMKM mikro yang tumbuh sebesar 3,62% (yoy), meningkat dari 1,80% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Kredit UMKM kecil masih tumbuh positif sebesar 0,56% (yoy), meskipun melandai dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,05% (yoy). Sementara itu, kredit UMKM menengah masih berkontraksi sebesar 1,00% (yoy), namun kontraksi tersebut jauh lebih terbatas dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 4,56% (yoy) (Grafik 3.15).

Lebih lanjut, berdasarkan pangsaanya, kredit UMKM mikro masih mendominasi dengan pangsa sebesar 52,41%, diikuti UMKM kecil sebesar 33,27% dan UMKM menengah dengan pangsa 14,31% (Grafik 3.17).

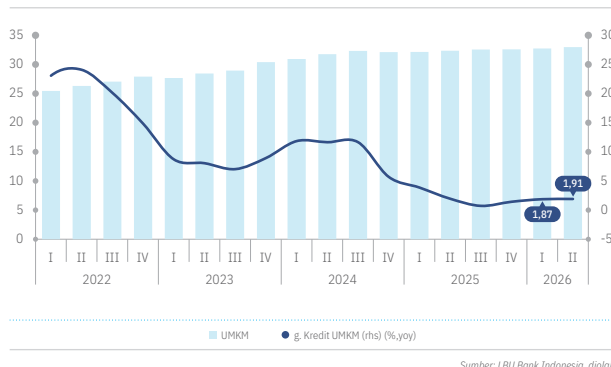
Pembiayaan untuk UMKM didominasi oleh kredit modal kerja dengan pangsa sebesar 78,53% dari total kredit UMKM (Grafik 3.18). Pada triwulan laporan, kredit UMKM untuk kebutuhan investasi tumbuh sebesar 18,84% (yoy),

lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 13,64% (yoy). Lebih lanjut, kredit yang digunakan untuk keperluan modal kerja terpantau mengalami kontraksi sebesar 1,92% (yoy), sedikit lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 0,83% (yoy) (Grafik 3.19).

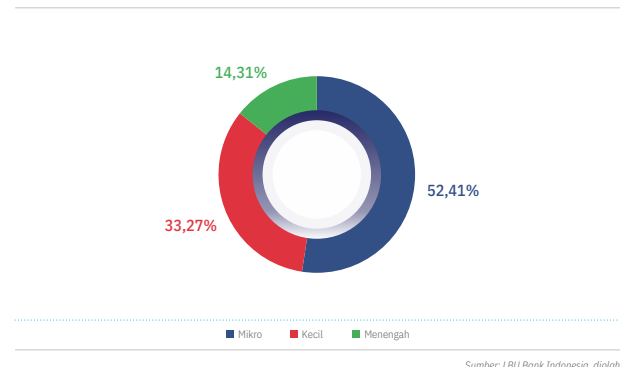
Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, diperlukan dukungan stabilitas makroekonomi serta sistem keuangan yang kokoh. Untuk mendukung upaya tersebut, salah satunya diperlukan pemberdayaan sektor riil khususnya pengembangan UMKM yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam rangka optimalisasi kontribusi UMKM, salah satunya dilakukan melalui pemasaran produk UMKM secara global. Peningkatan akses dan jangkauan UMKM terhadap jasa keuangan sangat dibutuhkan untuk menghadapi persaingan tersebut, sehingga pengembangan UMKM tidak luput dari kontribusi pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan.

Dalam upaya mendorong fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan dari sisi *supply* melalui berbagai

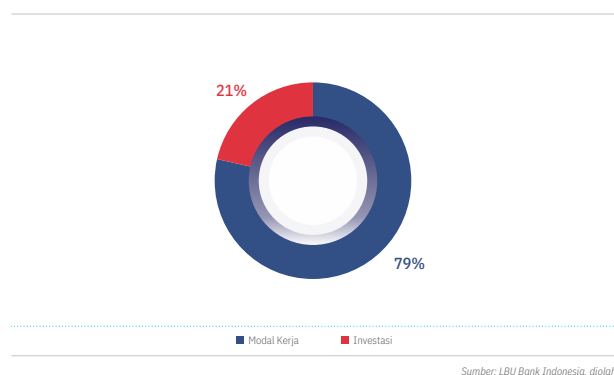
Grafik 3.15. Pertumbuhan Kredit UMKM



Grafik 3.17. Pangsa Kredit UMKM



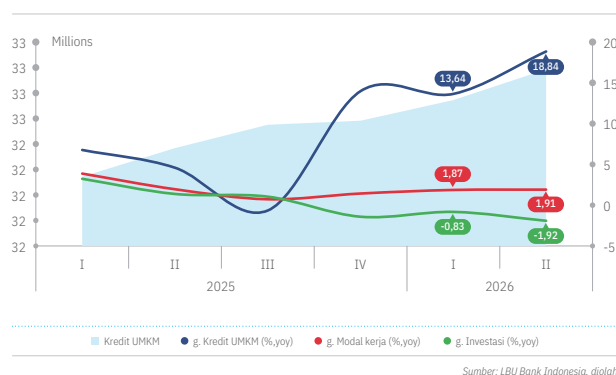
Grafik 3.18. Kredit UMKM berdasarkan Jenis Penggunaan



instrumen makroprudensial. Pertama, Kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang diatur dalam PBI No.23/13/PBI/2021 dan disempurnakan melalui PBI No.24/3/PBI/2022. RPIM merupakan rasio yang menggambarkan porsi pembiayaan inklusif bank dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, korporasi UMKM, dan Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR), sehingga dapat memperkuat inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Bank Indonesia terus mendorong peningkatan akses keuangan UMKM yang dilakukan melalui kebijakan baik dari sisi *demand* maupun sisi *supply*. Dari sisi *demand*, UMKM diarahkan untuk meningkatkan kapabilitasnya sehingga mampu masuk ke dalam kategori bankable, melalui berbagai bentuk program bantuan teknis berlandaskan 3 pilar, yaitu (1) korporatisasi, melalui penguatan kelembagaan dan perluasan mitra; (2) peningkatan kapasitas secara *end-to-end*, melalui penguatan kewirausahaan dan perluasan pasar; dan (3) pembiayaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan perluasan digitalisasi keuangan. Dalam pilar pembiayaan, Bank Indonesia mendorong percepatan akses pembiayaan UMKM melalui penyediaan data dan

Grafik 3.19. Kredit UMKM berdasarkan Penggunaan



informasi UMKM yang potensial mendapat pembiayaan (BISAID), penyediaan dan pendampingan penggunaan aplikasi pencatatan keuangan secara digital (SIAPIK), serta fasilitasi pelaksanaan *business matching* pembiayaan bersama perbankan.

Sebagai wujud dukungan di tingkat regional, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung turut mengembangkan UMKM agar lebih kuat dan berdaya saing antara lain melalui (1) Program Unggulan, meliputi pemberian pelatihan, pendampingan, penyediaan informasi, serta fasilitasi akses keuangan dan pasar dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku usaha, memperkuat kelembagaan, serta mendorong hilirisasi produk agar lebih berdaya saing; dan (2) Pemberdayaan Usaha Syariah, meliputi kegiatan pengembangan kemandirian ekonomi pesantren berbasis pendekatan manajemen ekonomi dan bisnis modern, yang memiliki peran penting dalam membangun pondasi ekonomi nasional yang kuat, serta diperkirakan dapat mendorong pesantren sebagai penggerak utama dalam ekosistem rantai nilai halal yang fokus pada bahan baku, teknologi pengolahan, sertifikasi halal, dan pemisahan produk halal dari kontaminasi, melalui serangkaian program pendampingan dan bimbingan teknis.



16:42 96%

QR

INBOX

SCAN QR

TAMJUNG BIKSA
SEDAYU CITY KELAPA GADING
JAKARTA

NID: 000008158678739
TIME: 13:17:14.525

01
PR 2022

REF ID 000256
MNTD : ID1001126306419

MIKAN SCAN QR CODE BERTUT

QRIS



Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

- Aliran uang kartal di Provinsi Lampung pada triwulan II 2026 tercatat mengalami *net outflow* sebesar Rp1,01 triliun. Kondisi aliran uang kartal *outflow* juga mengalami kenaikan sebesar 2,28% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya dengan *outflow* sebesar negatif 4,29% (yoy).
- Transaksi pembayaran melalui sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (RTGS) tumbuh positif jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp29,20 triliun menjadi sebesar Rp38,55 triliun. Transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) juga mengalami kontraksi sebesar 5,98% (yoy). Secara nominal, transaksi kartu ATM/Debit juga tercatat menurun sebesar 2,99% (yoy), mengikuti tren triwulan sebelumnya yang juga mengalami penurunan sebesar 4,46% (yoy).
- Sampai dengan Juni 2026, *merchant* QRIS yang tersebar di Provinsi Lampung mencapai 894.797 *merchant*. Jumlah tersebut terus meningkat sejalan dengan tren peningkatan *merchant* QRIS di wilayah Sumatra. Sementara, jumlah pengguna QRIS di Provinsi Lampung adalah sebesar 1.567.685. Jumlah ini mengalami pertumbuhan 6,26% (qtoq) dari triwulan sebelumnya.

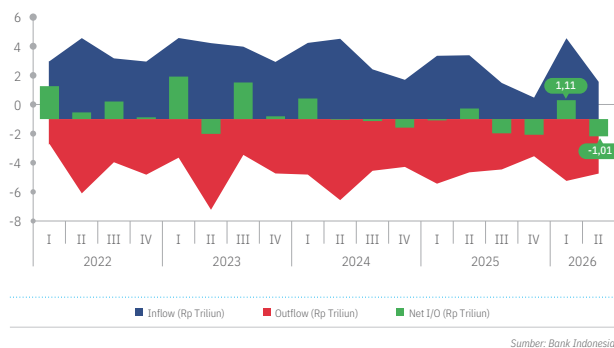
4.1. Perkembangan Transaksi Sistem Pembayaran Tunai

Perkembangan transaksi sistem pembayaran tunai dilihat dari beberapa indikator, antara lain jumlah aliran uang masuk dari Perbankan ke Bank Indonesia (*inflow*), jumlah aliran uang keluar dari Bank Indonesia ke Perbankan (*outflow*), termasuk dukungan penyediaan Uang Layak Edar (ULE) kepada masyarakat luas melalui berbagai kegiatan, seperti penukaran uang melalui Bank Indonesia, Kas Keliling, dan Kas Titipan.

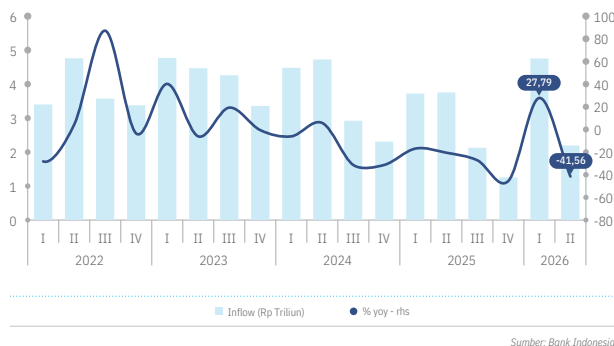
4.1.1. Perkembangan Aliran Uang Kartal

Aliran uang kartal di Provinsi Lampung pada triwulan II 2026 tercatat mengalami **net outflow** sebesar **Rp1,01 triliun**. Kondisi ini berbeda dengan triwulan sebelumnya yang mengalami *net inflow* sebesar Rp1,11 triliun. Secara lebih rinci, dapat dilihat bahwa aliran uang kartal *inflow* tercatat menurun sebesar 41,56% (yoy) pada triwulan II 2026 (Grafik 4.2). Selanjutnya, aliran uang Kartal *outflow* meningkat sebesar 2,28% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami penurunan sebesar 4,29% (yoy).

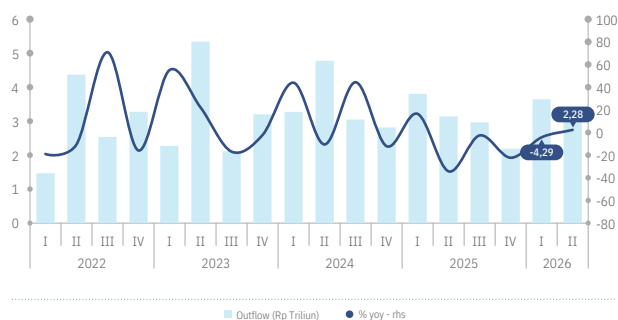
Grafik 4.1. Perkembangan Aliran Uang Kartal Triwulanan



Grafik 4.2. Aliran Uang Kartal *Inflow*



Grafik 4.3. Aliran Uang Kartal *Outflow*



4.1.2. Penyediaan Uang Layak Edar

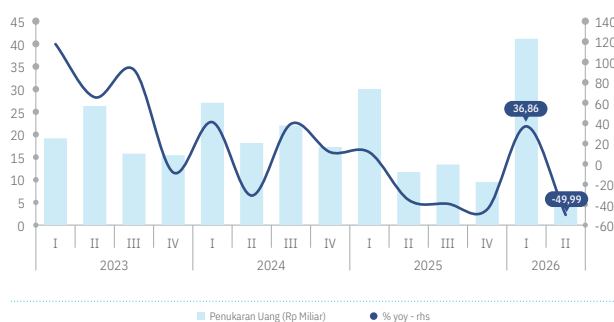
Dalam pelaksanaan tugas pada bidang Pengelolaan Uang Rupiah, Bank Indonesia melakukan pengedaran uang ke berbagai daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yakni tersedia dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan tentunya dalam kondisi yang layak edar.

Sebagai strategi untuk memenuhi kebutuhan uang kartal yang layak edar (*clean money policy*) tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung secara berkala melaksanakan layanan penukaran Uang Tidak Layak Edar (UTLE) baik secara langsung melalui loket penukaran kantor Bank Indonesia dan kas keliling, serta bersinergi dengan Perbankan untuk turut menerima penukaran uang. Selain itu, untuk terus meningkatkan kualitasnya (*soil level*), Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung juga secara berkala melakukan kegiatan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE).

Pada triwulan II 2026 penukaran uang melalui Bank Indonesia tercatat sebesar Rp5,86 miliar, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp41,12 miliar (Grafik 4.4). Secara lebih rinci pada triwulan II 2026, penukaran melalui kas keliling tercatat sebesar Rp1,23 miliar menurun jika dibandingkan dengan Rp18,99 miliar pada triwulan sebelumnya (Grafik 4.5). Perbandingan nominal yang signifikan terjadi karena pada triwulan sebelumnya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan uang menjelang Hari Raya Idulfitri Tahun 2026 melonjak.

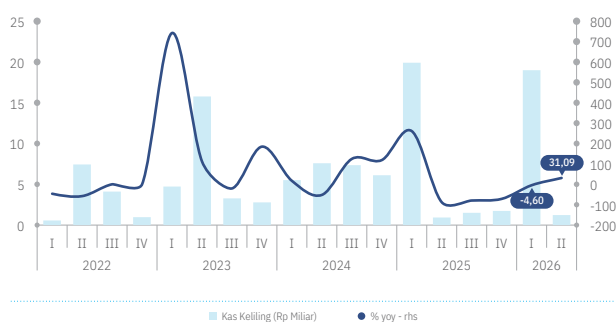
Selanjutnya, KPwBI Provinsi Lampung tetap berupaya untuk memenuhi kebutuhan Uang Layak Edar (ULE) khususnya di daerah terpencil melalui kegiatan kas titipan dan kas keliling 3T (Terdepan, Terluar dan Terpencil). Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi

Grafik 4.4. Penukaran Uang Melalui BI



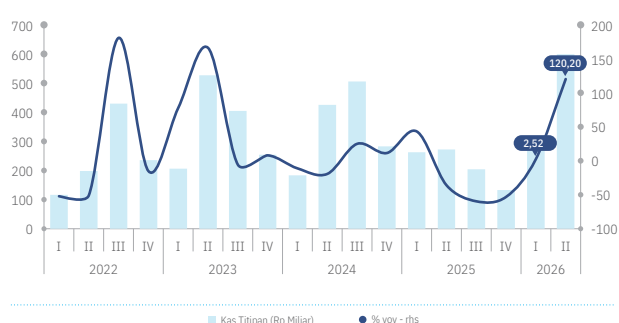
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.5. Kas Keliling



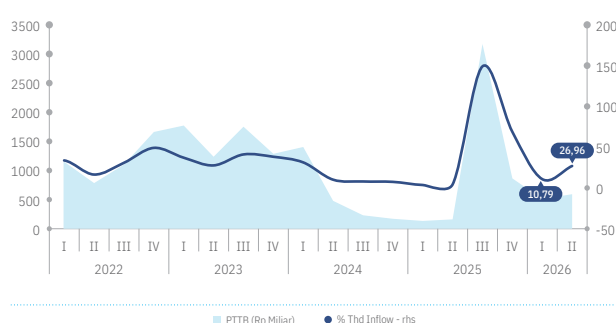
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.6. Kas Titipan



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.7. Perkembangan Pemusnahan UTLE



Sumber: Bank Indonesia

Lampung saat ini memiliki 1 (satu) Kas Titipan yang berada di Liwa, Kabupaten Lampung Barat dengan Bank Pengelola PT BRI KC Liwa. Kas Titipan Liwa memiliki 4 (empat) Bank Peserta yang terdiri dari BNI, Bank Mandiri, BSI, dan BPD Lampung. Adapun selama triwulan II 2026, transaksi keluar kas titipan Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp599 miliar (Grafik 4.6), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp269,11 miliar.

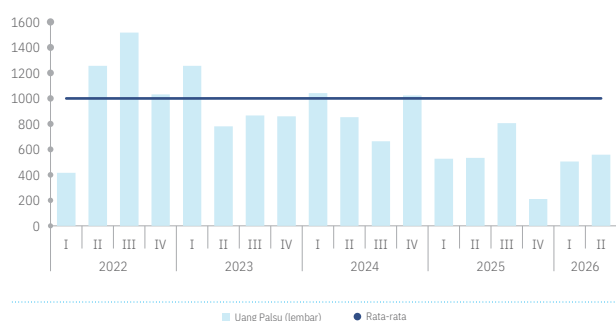
Pada periode laporan, UTLE yang dimusnahkan tercatat sebesar Rp591 miliar. Dibandingkan dengan nominal inflow, persentase pemusnahan tersebut tercatat sebesar 26,96%, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 10,79% (Grafik 4.7).

4.1.3. Perkembangan Temuan Uang Palsu

Pada triwulan II 2026, terdapat temuan uang palsu sebanyak 558 lembar di Provinsi Lampung (Grafik 4.8). Jumlah tersebut mengalami tren yang cukup konsisten, di mana temuan uang palsu pada triwulan sebelumnya juga tercatat sebanyak 504 lembar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, jumlah uang palsu yang ditemukan mengalami peningkatan sebesar 4,49% (yoy). Berdasarkan komposisinya, temuan uang palsu

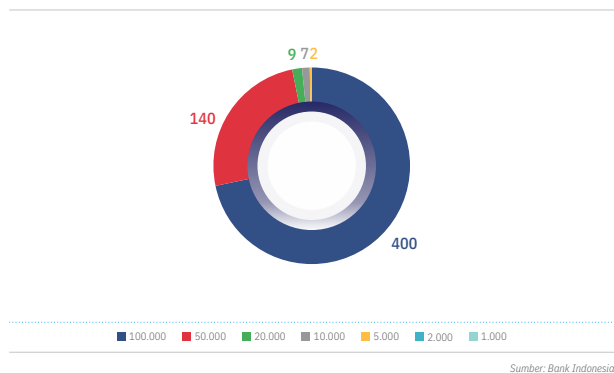
pada triwulan II 2026 didominasi oleh Uang Pecahan Besar (UPB) (Grafik 4.9), dengan pecahan terbanyak Rp100.000. Sementara itu, untuk Uang Pecahan Kecil (UPK) tercatat ditemukan 9 (sembilan) lembar pecahan Rp20.000; 7 (tujuh) lembar pecahan Rp10.000; dan 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000. Upaya pencegahan dan penanganan uang palsu tetap terus dilakukan oleh KPwBI Provinsi Lampung melalui sosialisasi dan edukasi program Cinta Bangsa Paham Rupiah yang mencakup materi ciri-ciri keaslian uang rupiah (CIKUR) kepada masyarakat secara berkelanjutan dan melalui berbagai *platform*. Selain itu, sinergi dengan perbankan dan pihak

Grafik 4.8. Temuan Uang Palsu



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.9. Pecahan Uang Palsu Tw II 2026



aparatur hukum juga dilakukan sebagai upaya untuk terus menurunkan tindak kejahatan peredaran uang palsu di Provinsi Lampung.

4.2. Perkembangan Sistem Pembayaran Bank Indonesia

Transaksi pembayaran melalui sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia, *Real Time Gross Settlement* (RTGS) tercatat mengalami perlambatan pada triwulan I 2026. Hal serupa juga terjadi pada transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang tercatat masih mengalami pertumbuhan negatif.

Transaksi pembayaran melalui SKNBI tercatat mengalami kontraksi sebesar 5,98% (yoy), kondisi ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang juga terkontraksi sebesar 18,86% (yoy) (Grafik 4.10). Adapun kinerja transaksi kliring debit yang tercatat pada triwulan II 2026 adalah sebesar 18,63% (qtq) dan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 18,79% (qtq). Sementara, kinerja transaksi kliring kredit pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 25,08% (qtq) dibandingkan pada triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 36,38% (qtq).

Grafik 4.10. Perkembangan Transaksi Kliring

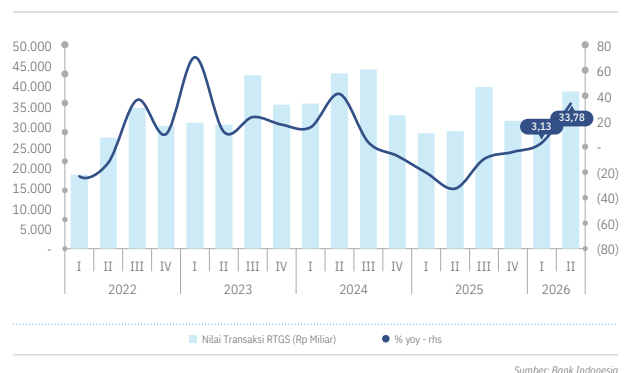


Selanjutnya, nilai transaksi pembayaran melalui RTGS tercatat tumbuh positif jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dari sebesar Rp29,20 triliun menjadi sebesar Rp38,55 triliun. Nilai ini tumbuh sebesar 33,78% (yoy), jauh lebih tinggi bila dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,13% (yoy) (Grafik 4.11). Adapun dinamika pertumbuhan transaksi RTGS tersebut merupakan salah satu indikator atas membaiknya aktivitas perekonomian di Provinsi Lampung. Hal ini juga menjadi indikasi perubahan landscape penggunaan sistem pembayaran di Provinsi Lampung seiring peningkatan akseptasi sistem pembayaran non tunai.

Lebih lanjut, untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan transfer dana yang lebih efisien, cepat (*real-time*), serta tersedia setiap saat (24/7), Bank Indonesia telah mengembangkan BI-FAST sebagai infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang dapat mengakomodasi kebutuhan dimaksud. Kehadiran BI-FAST diharapkan mampu memperkuat ketahanan sistem pembayaran ritel nasional melalui penyediaan alternatif terhadap infrastruktur sistem pembayaran nasional eksisting yang terbatas pada jam operasional tertentu.

Fitur BI-FAST antara lain mencakup operasional setiap saat (24/7), dana diterima secara *real-time* oleh nasabah dan bank, melayani transfer kredit (*push*) dan debit (*pull*), dapat menggunakan *proxy address* (antara lain nomor handphone dan *e-mail*) sebagai pengganti nomor rekening, notifikasi kepada nasabah secara otomatis, *fraud detection system* dan *Anti Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism* (AML/CFT). BI-FAST telah diimplementasikan mulai Desember 2021 melalui kanal *mobile/internet* maupun *counter*, yang kemudian akan dikembangkan melalui kanal lainnya, a.l. QRIS, ATM, dan EDC.

Grafik 4.11. Perkembangan Transaksi RTGS



4.3. Perkembangan Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

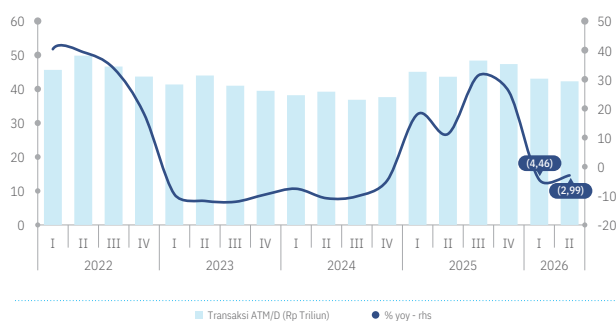
Sejalan dengan peningkatan akseptasi pembayaran non tunai, preferensi metode pembayaran masyarakat mulai bergeser dan menuntut pembayaran serba *mobile*, cepat, serta aman melalui berbagai *platform*. Oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang sistem pembayaran memiliki tugas untuk mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar. Perkembangan sistem pembayaran harus selalu berada pada koridor ketentuan yang berlaku demi kelancaran dan keamanan berjalannya kegiatan sistem pembayaran nasional.

4.3.1. Perkembangan Transaksi APMK

Pada periode laporan, nominal transaksi kartu ATM/Debit tercatat menurun sebesar 2,99% (yoy), mengikuti tren triwulan sebelumnya yang juga mengalami penurunan sebesar 4,46% (yoy) (Grafik 4.12).

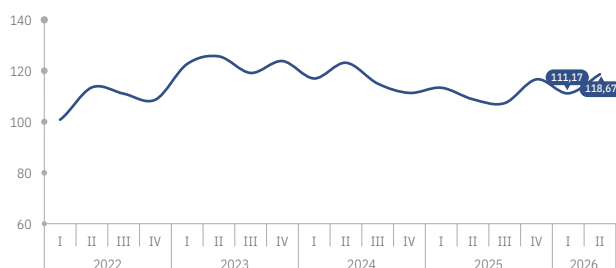
Berbeda dengan perkembangan kartu ATM/Debit, transaksi pembayaran melalui kartu kredit pada triwulan II 2026 terpantau meningkat sebesar 14,60% (yoy) (Grafik 4.14), melanjutkan tren peningkatan pada triwulan sebelumnya sebesar 26,13% (yoy).

Grafik 4.12. Perkembangan Transaksi Kartu ATM/D



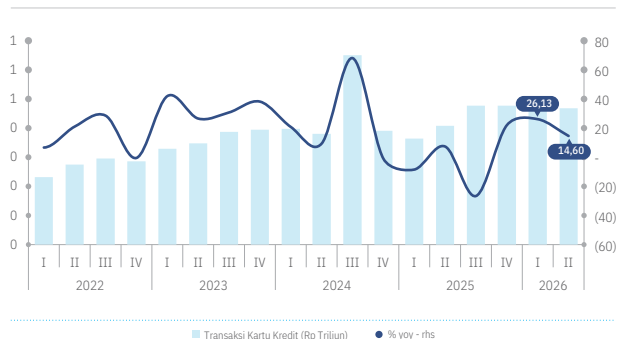
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.13. Indeks Pengeluaran Konsumsi Barang Tahan Lama



Sumber: Bank Indonesia

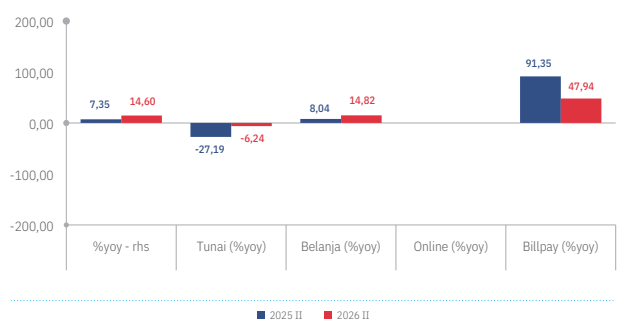
Grafik 4.14. Perkembangan Transaksi Kartu Kredit



Sumber: Bank Indonesia

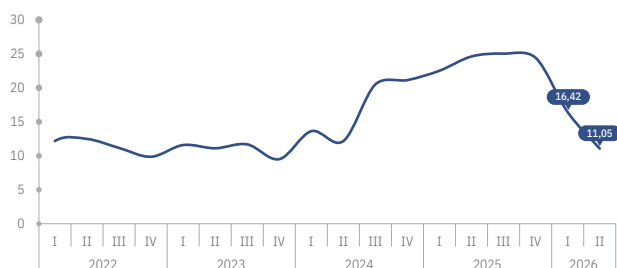
Secara lebih rinci, berdasarkan jenis transaksinya terlihat bahwa pertumbuhan transaksi kartu kredit yang lebih tinggi disebabkan oleh ekspansi transaksi belanja yang tercatat mengalami kenaikan sebesar 14,82% (yoy), melanjutkan tren peningkatan di triwulan sebelumnya yakni sebesar 27,35% (yoy). Kontras dengan transaksi belanja, transaksi tunai tercatat berkontraksi sebesar 6,24%, sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi signifikan sebesar 25,26% (Grafik 4.15).

Grafik 4.15. Pertumbuhan Kartu Kredit Per Jenis Transaksi (% yoy)



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.16. Pangsa Penghasilan untuk Pembayaran Cicilan



Sumber: Bank Indonesia

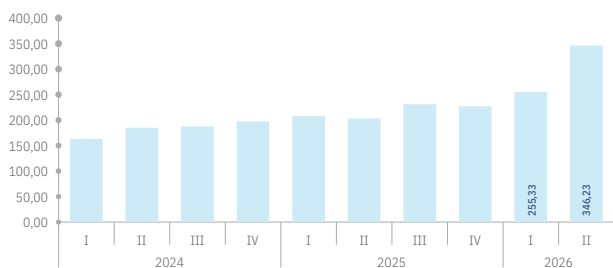
Namun, hasil Survei Konsumen yang dilakukan oleh KPwBI Provinsi Lampung mengindikasikan bahwa pangsa penghasilan untuk pembayaran cicilan terpantau mengalami penurunan sejak triwulan sebelumnya meskipun transaksi belanja tinggi. (Grafik 4.16).

4.3.2. Perkembangan Transaksi Uang Elektronik

Pada triwulan II 2026, dana *float* atau nilai uang elektronik yang merupakan kewajiban penerbit kepada pengguna tercatat sebesar Rp346,23 miliar (Grafik 4.17), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp255,33 miliar. Berdasarkan jenis transaksinya, perkembangan uang elektronik pada triwulan II 2026 mengalami kenaikan signifikan pada transaksi belanja sebesar 70,00% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 27,68% (yoy). Hal ini berkebalikan dengan transaksi transfer yang menurun signifikan sebesar 45,02% (yoy), serta transaksi tarik tunai yang juga dengan tren penurunan sebesar 65,03% (yoy) (Grafik 4.18).

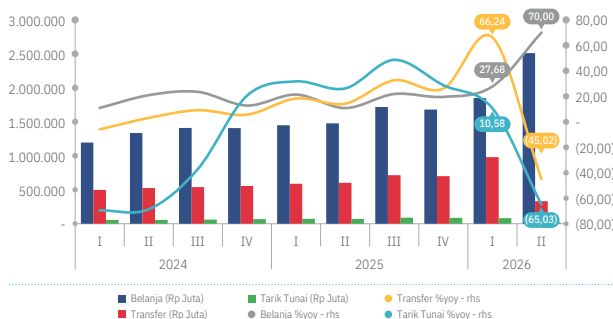
Berdasarkan pangsaanya, transaksi uang elektronik pada periode laporan sebagian besar berasal dari transaksi belanja yang mencapai 86,27% (Grafik 4.19). Sementara itu, pada kedua jenis transaksi lainnya, yaitu transfer dan tarik tunai pangsaanya masing-masing sebesar 11,36% dan 0,84%.

Grafik 4.17. Perkembangan Dana Float UE



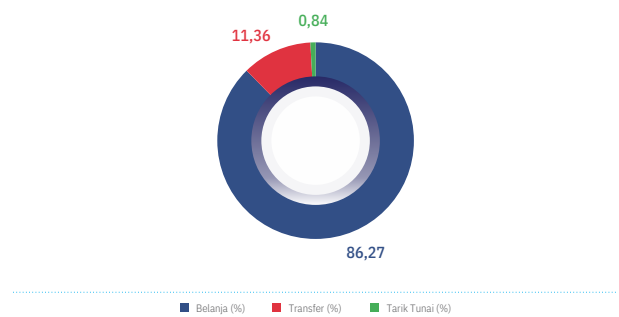
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.18. Perkembangan Transaksi UE Per Jenis Transaksi



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.19. Pangsa Transaksi UE Triwulanan



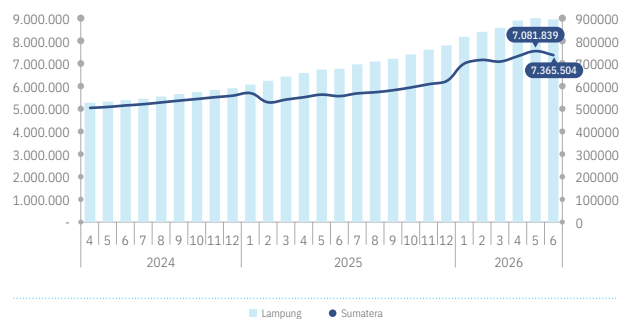
Sumber: Bank Indonesia

4.4. Perkembangan Merchant & Pengguna QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)

Sampai dengan Juni 2026, merchant QRIS yang tersebar di Provinsi Lampung mencapai 894.797 merchant. Jumlah tersebut terus meningkat sejalan dengan tren peningkatan merchant QRIS di wilayah Sumatera (Grafik 4.21).

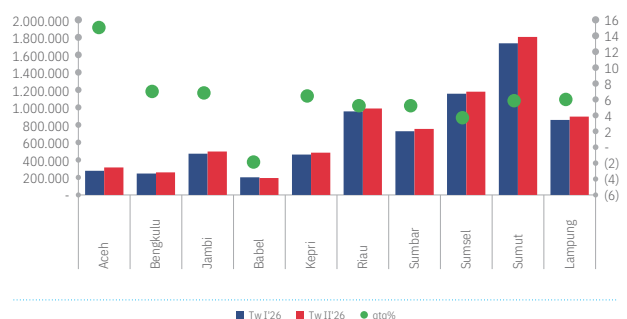
Secara triwulanan, pertumbuhan tertinggi merchant QRIS se-Sumatera pada triwulan II 2026 dicapai oleh Provinsi Aceh, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Jambi dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 13,40%; 5,37%; dan 5,18% (qtq) (Grafik 4.22). Sementara itu berdasarkan

Grafik 4.20. Perkembangan Jumlah Merchant QRIS



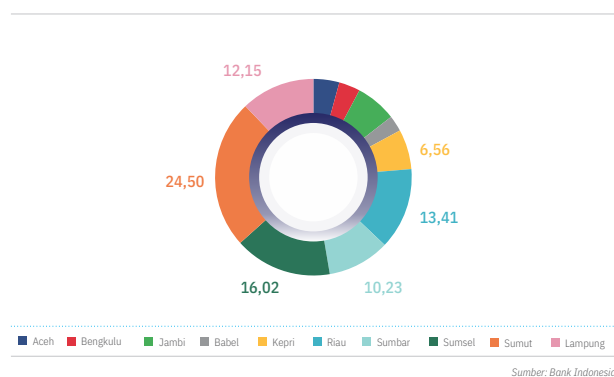
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.21. Pertumbuhan Merchant QRIS Triwulanan

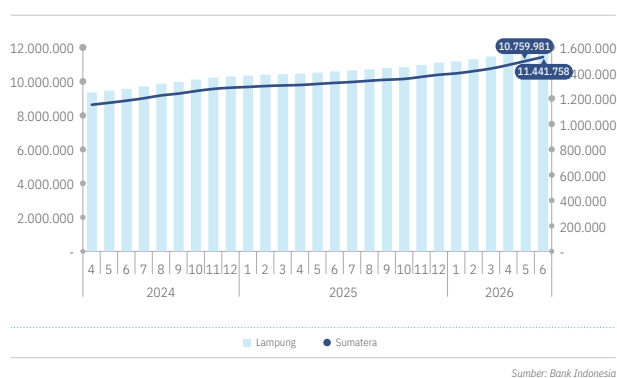


Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.22. Pangsa Merchant QRIS di Sumatera



Grafik 4.23. Perkembangan Pengguna QRIS



pangsanya, *merchant* QRIS di Provinsi Lampung menduduki peringkat ke-4 (12,15%) setelah Sumatra Utara, Sumatra Selatan, dan Riau (Grafik 4.22).

Sampai dengan Juni 2026, jumlah pengguna QRIS di Provinsi Lampung adalah sebesar 1.567.685 (Grafik 4.23). Jumlah ini mengalami pertumbuhan 6,26% (qtq) dari triwulan sebelumnya.

Berbagai strategi program perluasan QRIS telah dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dalam rangka perluasan QRIS pada triwulan II tahun 2026, antara lain:

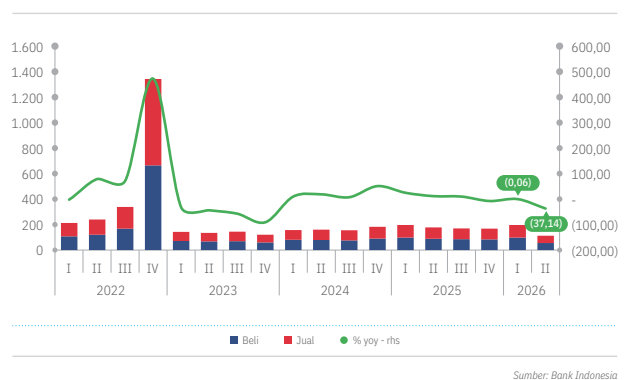
- Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku UMKM yang *onboarding* menjadi UMKM binaan Bank Indonesia dalam kegiatan *Bootcamp* Digitalisasi terkait transaksi aman dan nyaman menggunakan QRIS serta perlindungan konsumen.
- Edukasi dan sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Pendamping KPM dalam rangka elektronifikasi bantuan sosial non tunai.
- Edukasi dan sosialisasi kepada mahasiswa/i dan komunitas di Provinsi Lampung dalam program SIGMA QRIS (SInergi Generasi eMAS pakai QRIS).

- Sinergi dan kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah mendorong penggunaan QRIS dalam bertransaksi, dan memberikan edukasi perlindungan konsumen, seperti dalam pelaksanaan pembekalan Muli Mekhanai 2026 yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata serta Piloting Bansos Digital bersama Pemerintah Kota Metro.

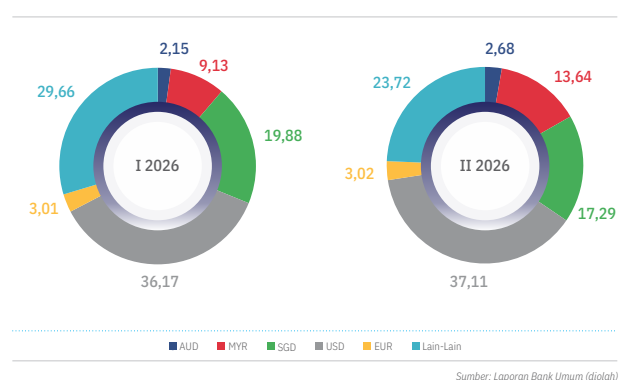
4.5. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (Kupva BB)

Kegiatan Penukaran Valuta Asing merupakan kegiatan jual beli uang kertas asing serta pembelian cek pelawat (*Traveller's Cheque*). Kegiatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh Perbankan maupun badan usaha bukan bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas, atau biasa disebut dengan *money changer*. Guna mendukung terciptanya perdagangan valuta asing yang sehat dan aman bagi masyarakat, Bank Indonesia telah mengatur tata cara perizinan dan pengawasan Kegiatan Penukaran Valuta Asing yang dilakukan oleh Bukan Bank (KUPVA BB). Ketentuan tersebut tertuang pada Peraturan Bank Indonesia No.18/20/PBI/2016 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.18/42/DKSP tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

Grafik 4.24. Transaksi KUPVA BB di Provinsi Lampung

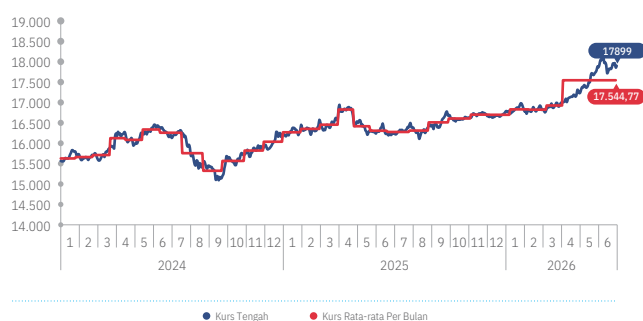


Grafik 4.25. Pangsa Transaksi KUPVA Per Jenis Mata Uang



Pada triwulan II 2026 transaksi KUPVA BB di Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp112 miliar, mengalami penurunan dibandingkan total transaksi triwulan sebelumnya sebesar Rp196 miliar. Nominal transaksi tersebut tercatat mengalami kontraksi sebesar 37,14% (yoy) (Grafik 4.24). Berdasarkan jenis transaksinya pangsa transaksi jual (dilihat dari sisi KUPVA BB) pada periode laporan tercatat sebesar 50,27%, sedangkan transaksi beli sebesar 49,72%.

Grafik 4.26. Pergerakan Nilai Tukar USD-IDR



Sumber: Bank Indonesia

Peluncuran QRIS Tap Pada Smart BRT Itera dan *Kick-Off Siger Fest 2026*: Bijak Bertransaksi, Siap Digitalisasi

BOKS 4

Transformasi digital menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih adaptif dan berdaya saing. Pada awal Triwulan II 2026, jumlah *merchant* QRIS di Provinsi Lampung telah mencapai 889 ribu merchant, dengan nilai transaksi sebesar Rp1,87 triliun dan volume transaksi mencapai 22,4 juta transaksi. Capaian tersebut menunjukkan semakin tingginya penerimaan masyarakat terhadap pembayaran digital serta menguatnya fondasi ekonomi dan keuangan digital di Provinsi Lampung. Adapun berdasarkan asesmen pemetaan adopsi dan infrastruktur digital yang dilakukan oleh Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Provinsi Lampung berada di kategori '*Digital Payment Expansion*' karena telah memiliki infrastruktur yang sudah siap namun adopsi pembayaran digital masih cukup rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi kebijakan dan implementasi yang sesuai dengan karakteristik dari masyarakat Lampung.

Dalam rangka memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Provinsi Lampung serta melanjutkan keberhasilan Siger Fest 2025 yang berhasil menarik lebih dari 10 ribu pengunjung dengan nilai transaksi mencapai Rp650 juta, Siger Fest 2026 kembali hadir sebagai wadah kolaborasi yang mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, UMKM, penyedia jasa pembayaran, komunitas, dan media. Melalui kolaborasi tersebut, Siger Fest diharapkan dapat memperluas literasi dan akseptasi pembayaran digital, meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat daya saing UMKM, mendorong inovasi daerah, serta memperluas akses keuangan bagi masyarakat.

Dalam momentum *Kick-Off Siger Fest 2026*, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung bersama Institut Teknologi Sumatera (ITERA) turut meluncurkan implementasi QRIS TAP pada layanan SMART BRT ITERA (Bus Rapid Transit Institut Teknologi Sumatera). Inovasi ini memanfaatkan teknologi *Near Field Communication* (NFC) yang memungkinkan transaksi dilakukan secara lebih

cepat, mudah, aman, dan praktis melalui proses tap menggunakan perangkat yang telah mendukung fitur NFC. Implementasi QRIS TAP tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pengguna transportasi publik sekaligus memperluas pemanfaatan pembayaran digital dalam aktivitas sehari-hari masyarakat.

Inisiatif peluncuran QRIS TAP pada BRT ITERA juga dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa pengembangan unit armada dan rute transportasi ini merupakan bagian dari proyek uji coba dan percontohan untuk mendukung visi Transportasi Lampung Maju berbasis inovasi dan teknologi. Bersama dengan Pemerintah Provinsi Lampung, Institut Teknologi Sumatera terus bersinergi untuk riset dan uji coba transportasi publik yang berbasis teknologi. Ke depan, BRT ITERA akan terus dikembangkan hingga mencakup rute-rute dalam kota hingga objek wisata di Kota Bandar Lampung.

Adapun *Kick Off Siger Fest 2026* dilakukan oleh Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Jihan Nurlela; bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto; Rektor ITERA, I Nyoman Pugeng Aryantha; Wakil Walikota Kota Bandar Lampung, Deddy Amarullah; Penyedia Jasa Pembayaran; akademisi; serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kehadiran berbagai pihak tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam mendorong transformasi digital yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Melalui dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Siger Fest 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan digitalisasi pada sektor pemerintahan, perlindungan sosial, pendidikan, transportasi, UMKM, komunitas, dan pertanian diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi dan kualitas layanan publik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung.

BOKS 4

Dalam rangkaiannya, Siger Fest 2026 akan diselenggarakan melalui berbagai kegiatan yang mencakup edukasi keamanan transaksi digital dan perlindungan konsumen, festival kuliner untuk mendukung promosi dan digitalisasi UMKM, apresiasi Program Unggulan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta

berbagai kegiatan olahraga dan komunitas yang menysasar generasi muda. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa digitalisasi tidak hanya berfokus pada peningkatan transaksi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.







Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

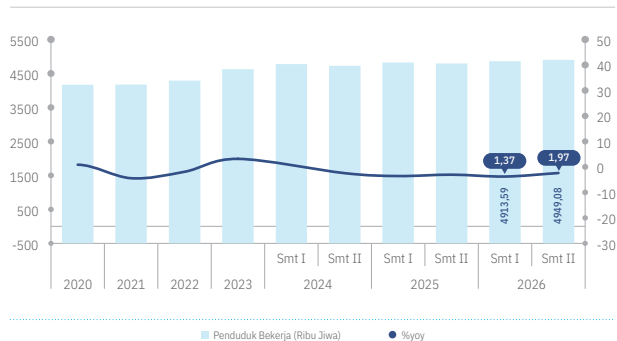
- Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Triwulan II 2026 menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari peningkatan jumlah penduduk yang bekerja menjadi 4,95 juta jiwa, bertambah 95,7 ribu jiwa atau tumbuh 1,97% dibandingkan Agustus 2025.
- Berdasarkan status pekerjaan utama pada Triwulan II 2026, jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal tercatat sebanyak 3.374,85 ribu orang (69,17%), sementara penduduk yang bekerja di sektor formal sebanyak 1.504,21 ribu orang (30,83%). Persentase pekerja formal meningkat sebesar 4,45 persen poin dibandingkan dengan periode Triwulan II 2025.
- Berdasarkan hasil Sakernas Triwulan II 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 3,97%, yang menunjukkan bahwa sekitar empat dari setiap seratus angkatan kerja berada dalam kondisi menganggur. Angka tersebut menurun 5,70% (yoy) dibandingkan dengan Triwulan II 2025.
- Rata-rata NTP Provinsi Lampung pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 127,28, menunjukkan peningkatan secara triwulanan, meskipun masih mengalami tekanan secara tahunan. Rata-rata NTP pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar 126,63, sementara pada Triwulan II 2025 sebesar 128,95.
- Jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung pada Triwulan II 2026 tercatat menurun sebesar 6,22% (yoy), menjadi 831,89 ribu jiwa dibandingkan dengan Triwulan II 2025 yang mencapai 887,02 ribu jiwa. Dari sisi komposisinya, penduduk miskin di Provinsi Lampung utamanya berada di daerah pedesaan di mana sebagian besar berprofesi sebagai petani.

5.1. Ketenagakerjaan

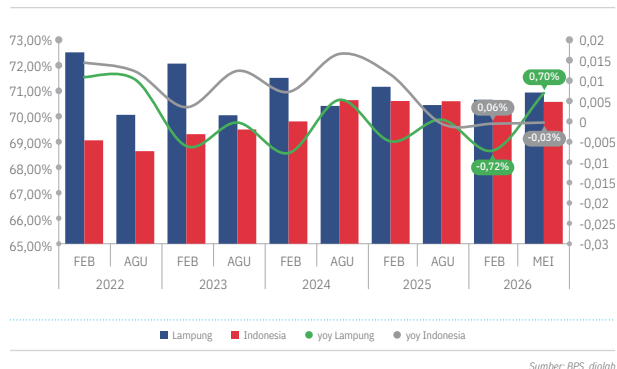
Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Triwulan II 2026 menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal tersebut tecermin dari peningkatan jumlah penduduk yang bekerja menjadi 4,95 juta jiwa, bertambah 95,7 ribu jiwa atau tumbuh 1,97% dibandingkan Agustus 2025 (Grafik 5.1). Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk yang bekerja, jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Lampung tercatat menurun sebesar 4,09% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu dari 213,17 ribu jiwa menjadi 204,45 ribu jiwa.

Sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Lampung turut menunjukkan peningkatan. Pada Triwulan II 2026, TPAK tercatat sebesar 70,93%, meningkat 0,70% dibandingkan dengan Agustus pada tahun sebelumnya (Grafik 5.3). Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi di Provinsi Lampung masih berada pada tingkat yang tinggi, meskipun di tingkat nasional terjadi penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia menurun 0,03%.

Grafik 5.1. Jumlah Penduduk Bekerja di Provinsi Lampung



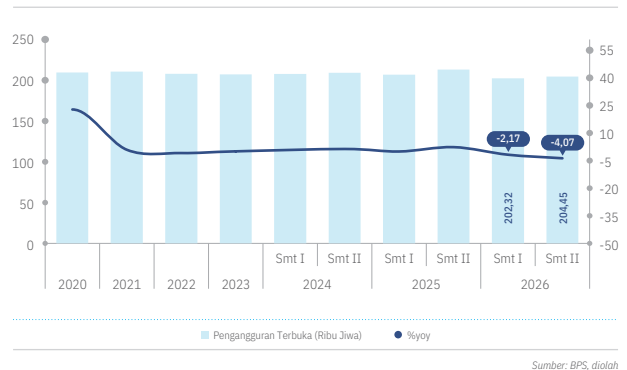
Grafik 5.3. TPAK Provinsi Lampung



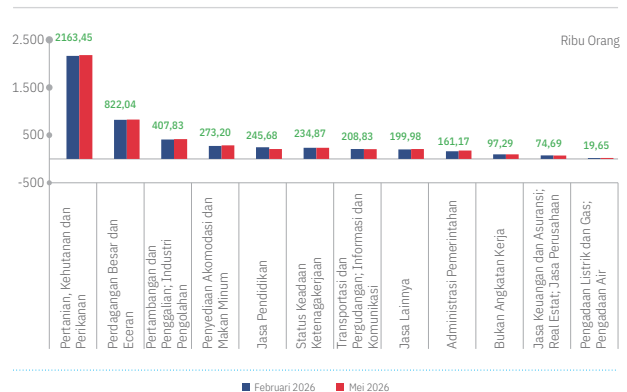
Pada Triwulan II 2026, struktur ketenagakerjaan Provinsi Lampung didominasi oleh sektor tradisional, yang tecermin dari komposisi penduduk bekerja berdasarkan lapangan usaha utama (Grafik 5.4). Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan jumlah 2,18 juta orang atau mencapai 44,04% dari total penduduk bekerja. Selanjutnya, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor menyerap 16,70% tenaga kerja, sedangkan sektor pertambangan, penggalian, dan industri pengolahan memiliki pangsa sebesar 8,41% (Tabel 5.1).

Disparitas gender merupakan salah satu aspek yang turut berkaitan dengan TPAK dalam pasar tenaga kerja. Pada Triwulan I 2026, TPAK laki-laki di Provinsi Lampung tercatat sebesar 88,46%, lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan yang sebesar 52,74% (Grafik 5.5). Secara tahunan, penurunan kontribusi TPAK perempuan menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan masih menghadapi tantangan, terutama karena adanya berbagai hambatan struktural dan sosial dalam mengakses kesempatan kerja.

Grafik 5.2. Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung



Grafik 5.4. Share Tenaga Kerja Provinsi Lampung



Tabel 5.1. Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Lampung

Lapangan Pekerjaan Utama	2025				2026				%Mei'26 thd Ags'25
	Feb	Porsi	Ags	Porsi	Feb	Porsi	Mei	Porsi	
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, & Perikanan; dan Penggalian	2.291,2	46,96	1.998,32	41,17	2.163,5	44,03	2.179,5	44,04	9,07
Pertambangan dan Industri Pengolahan	392,3	8,04	468,18	9,65	407,8	8,30	428,8	8,66	-8,41
Pengadaan Listrik, Gas, & Air Minum, Pengelolaan Sampah	24,9	0,51	18,18	0,37	19,7	0,40	21,4	0,43	17,71
Konstruksi	232,7	4,77	261,97	5,40	234,9	4,78	235,2	4,75	-10,22
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	854,8	17,52	940,53	19,38	822,0	16,73	826,6	16,70	-12,11
Transportasi, Pergudangan, & Komunikasi	198,6	4,07	190,95	3,93	208,8	4,25	206,1	4,16	7,93
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	214,7	4,40	259,87	5,35	273,2	5,56	286,2	5,78	10,13
Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate; Jasa Perusahaan	71,2	1,46	109,83	2,26	74,7	1,52	72,3	1,46	-34,17
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	134,7	2,76	149,31	3,08	161,2	3,28	177,1	3,58	18,61
Jasa Pendidikan	242,0	4,96	227,54	4,69	245,7	5,00	209,0	4,22	-8,15
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	76,1	1,56	55,73	1,15	97,3	1,98	97,6	1,97	75,13
Jasa Lainnya	145,4	2,98	172,97	3,56	201,5	4,10	209,1	4,23	20,89
	4879,1	100	4853,4	100	4913,6	100	4949,1	100	

Sumber: BPS, diolah

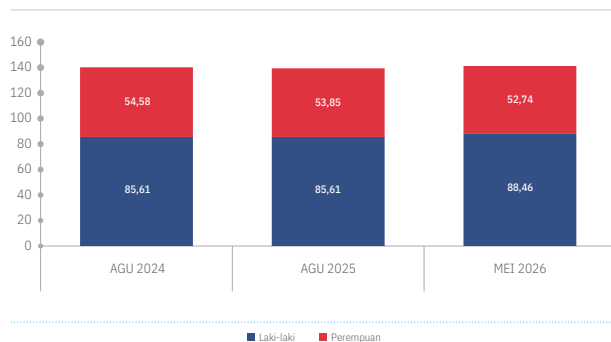
Perkembangan tersebut juga berkaitan dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Lampung yang menunjukkan perbaikan signifikan. Pada tahun 2025, IKG Provinsi Lampung kembali mengalami penurunan menjadi 0,38, atau turun sebesar 0,02 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,40 (Grafik 5.6). Penurunan IKG tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesetaraan gender di Provinsi Lampung, yang terutama didukung oleh perbaikan pada dimensi kesehatan reproduksi dan pasar tenaga kerja.

Berdasarkan hasil Sakernas Triwulan II 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 3,97%, yang menunjukkan bahwa sekitar empat dari setiap seratus angkatan kerja berada dalam kondisi menganggur. Angka tersebut menurun 5,70% (yoy)

dibandingkan dengan Triwulan II 2025. Secara regional, Provinsi Lampung tercatat memiliki TPT terendah ketiga di wilayah Sumatera (Grafik 5.7).

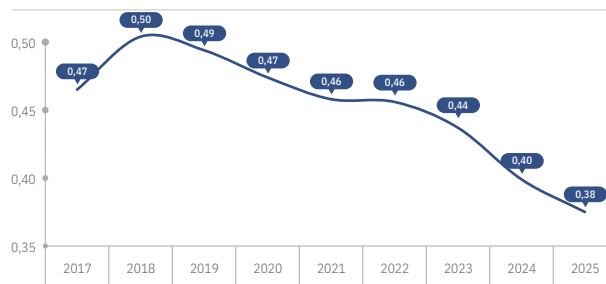
Ditinjau secara spasial, TPT perkotaan pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 6,15%, lebih tinggi dibandingkan dengan TPT perdesaan yang sebesar 2,54%. TPT perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,12 persen poin, sementara TPT perdesaan menurun sebesar 0,43 persen poin dibandingkan November 2025 (Grafik 5.8). Kondisi tersebut sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung yang menunjukkan adanya indikasi potensi peningkatan penggunaan tenaga kerja pada Triwulan II 2026 (Grafik 5.9).

Grafik 5.5. TPAK Provinsi Lampung Berdasarkan Gender



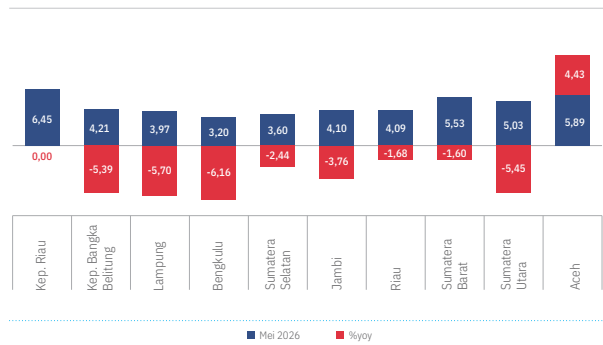
Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.6. IKG Provinsi Lampung



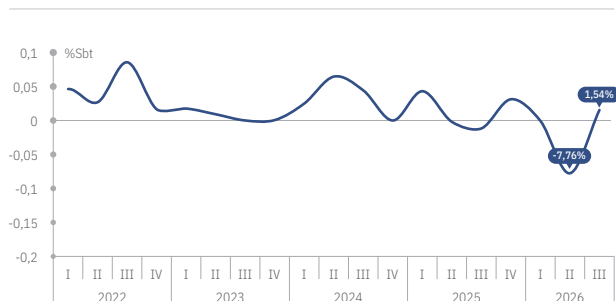
Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.7. TPT Sumatera



Sumber: BPS, diolah

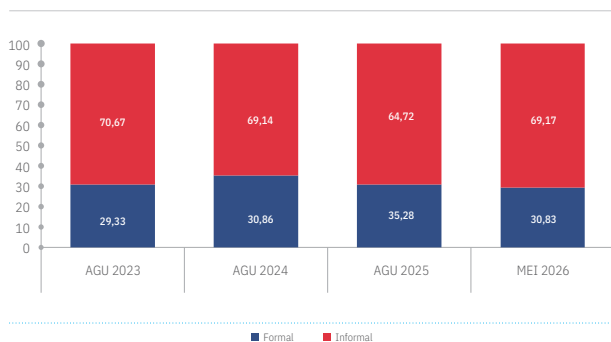
Grafik 5.9. Penggunaan Tenaga Kerja dan Perkembangan Investasi pada Dunia Usaha di Provinsi Lampung



Sumber: SKDU KPwBI Provinsi Lampung, diolah

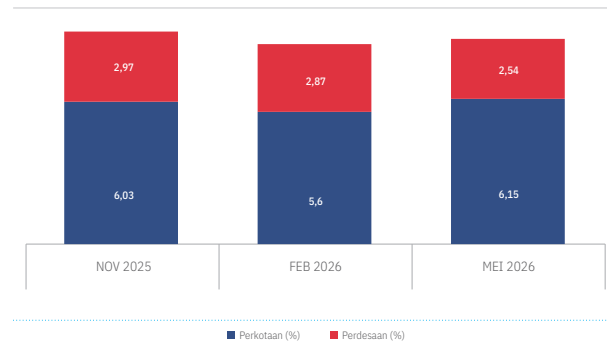
Selain ditinjau dari sisi penawaran tenaga kerja, kondisi pasar tenaga kerja juga dapat dilihat dari perkembangan tingkat upah. Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2026 mengalami peningkatan sebesar 5,35%(yoy), dari Rp2.893.069 pada tahun 2025 menjadi Rp3.047.734 (Grafik 5.10). Pada tingkat kabupaten/kota, UMK Kota Bandar Lampung tercatat meningkat sebesar 5,64%, lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan UMP di tingkat provinsi. Meskipun demikian, peningkatan tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan pada tahun 2025 yang sebesar 6,50% (yoy), baik di Kota Bandar Lampung maupun pada tingkat provinsi (Grafik 5.10).

Grafik 5.11. Proporsi Pekerja Formal dan Informal di Provinsi Lampung



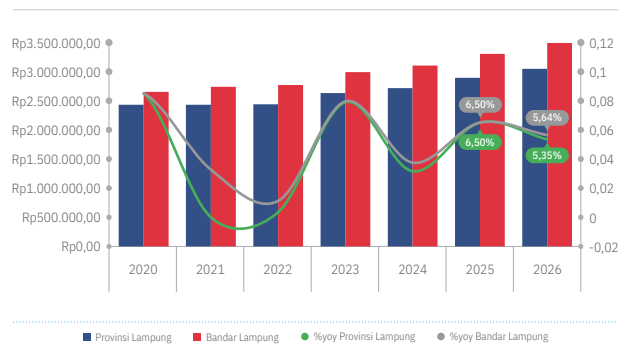
Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.8. TPT Provinsi Lampung berdasarkan Wilayah Tempat Tinggal



Sumber: BPS, diolah

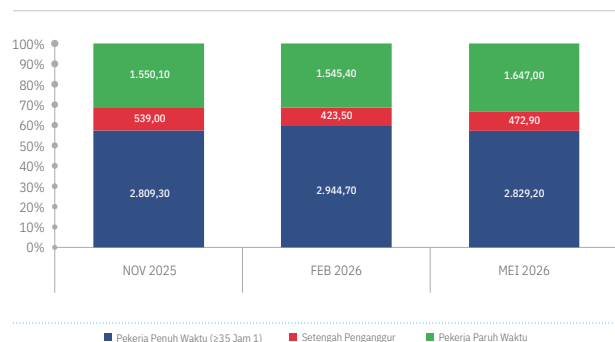
Grafik 5.10. Perkembangan Upah Minimum Provinsi Lampung



Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan status pekerjaan utama pada Triwulan II 2026, jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal tercatat sebanyak 3.374,85 ribu orang (69,17%), sementara penduduk yang bekerja di sektor formal sebanyak 1.504,21 ribu orang (30,83%). Persentase pekerja formal meningkat sebesar 4,45 persen poin dibandingkan dengan periode Triwulan II 2025 (Grafik 5.11). Peningkatan proporsi pekerja formal tersebut menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk yang berstatus berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan/atau pekerja keluarga/tidak dibayar di Provinsi Lampung.

Grafik 5.12. Pekerja di Provinsi Lampung berdasarkan Jam Kerja

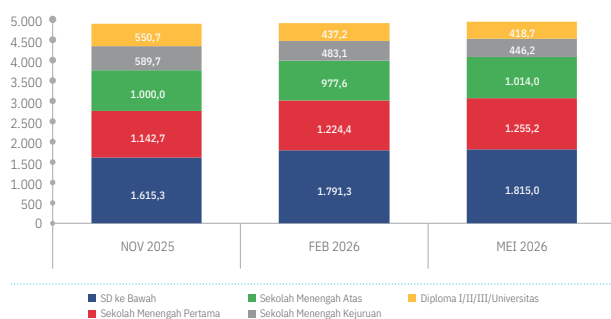


Sumber: BPS, diolah

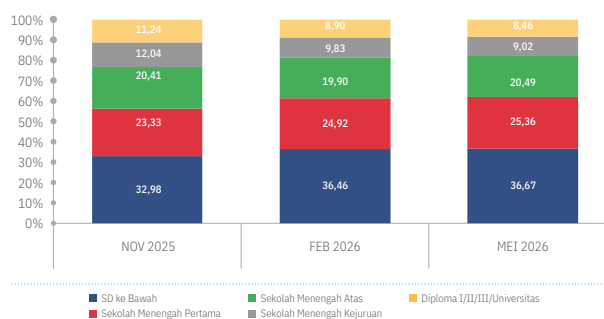
Tabel 5.2. Dekomposisi Penduduk Usia Kerja dan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Lampung

Indikator	2024		2025		2026		Perubahan Mei'26 thd Ags'25	Perubahan Mei'26 thd Feb'26
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Mei		
Penduduk Usia Kerja (15+) (ribu)	7.053,58	7.096,22	7.147,00	7.192,54	7.241,03	7.265,49	1,01%	0,34%
Angkatan Kerja (ribu)	5.044,04	4.996,75	5.085,87	5.066,55	5.115,90	5.153,54	1,72%	0,74%
Bekerja	4.836,33	4.787,59	4.876,06	4.853,38	4.913,59	4.949,08	1,97%	0,72%
Pengangguran	207,70	209,16	206,80	213,17	202,32	204,45	-4,09%	1,05%
Bukan Angkatan Kerja (ribu)	2.009,54	2.099,47	2.061,13	2.125,99	2.125,12	2.111,95	-0,66%	-0,62%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	71,51	70,41	71,16	70,44	70,65	70,93	0,70%	0,40%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	4,12	4,19	4,07	4,21	3,95	88,46	2001,19%	2139,49%
Pekerja Tidak Penuh (1-34 jam) (ribu)	2.011,60	1.890,89	2.099,30	2.019,40	1.968,90	2.119,90	4,98%	7,67%
Setengah Penganggur	521,60	461,02	578,10	548,05	423,50	472,90	-13,71%	11,66%
Pekerja Paruh Waktu	1.490,00	1.429,88	1.521,20	1.471,35	1.545,40	1.647,00	11,94%	6,57%
Pekerja Penuh (= 35 jam*) (ribu)	2.824,70	2.896,70	2.779,70	2.833,98	2.944,70	2.829,20	-0,17%	-3,92%

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.13. TPAK Menurut Tingkat Pendidikan (ribu orang)

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.14. TPAK Menurut Tingkat Pendidikan (%)

Sumber: BPS, diolah

Persentase pekerja paruh waktu mengalami peningkatan sebesar 1,63 persen poin pada Triwulan II 2026. Sebaliknya, persentase pekerja setengah pengangguran dan pekerja penuh masing-masing mengalami penurunan sebesar 1,45 persen poin dan 0,18 persen poin (Grafik 5.12). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian tenaga kerja di Provinsi Lampung masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan dengan waktu kerja penuh.

Ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan, dominasi pekerjaan informal pada struktur ketenagakerjaan Triwulan II 2026 turut tercermin dari tingginya proporsi pekerja dengan tingkat pendidikan rendah. Jika dibandingkan dengan data November 2025 dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk bekerja dengan pendidikan Diploma I/II/III mengalami penurunan dari 550,7 ribu orang menjadi 418,7 ribu orang (Grafik 5.13). Sementara itu, persentase pekerja dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, serta Sekolah Menengah Kejuruan mengalami peningkatan, dengan kenaikan terbesar tercatat pada

kelompok pendidikan SD ke bawah sebesar 3,69 persen poin. Di sisi lain, persentase penduduk yang tamat Sekolah Menengah Kejuruan mengalami penurunan sebesar 3,02 persen poin (Grafik 5.14).

5.2. Nilai Tukar Petani

Rata-rata NTP Provinsi Lampung pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 127,28, menunjukkan peningkatan secara triwulanan, meskipun masih mengalami tekanan secara tahunan. Rata-rata NTP pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar 126,63, sementara pada Triwulan II 2025 sebesar 128,95 (Grafik 5.15). Perkembangan tersebut tercermin dari peningkatan indeks yang diterima petani (It), terutama pada subsektor Hortikultura yang tumbuh sebesar 9,57% (yoy).

Selanjutnya, secara sektoral, rata-rata NTP pada beberapa subsektor tercatat mengalami pertumbuhan, meliputi NTP hortikultura, tanaman pangan, perikanan tangkap, peternakan, dan perikanan budidaya yang masing-masing tumbuh sebesar 9,57%; 6,16%; 3,24%; 0,24%; dan 0,20% (yoy). Di sisi lain, rata-rata NTP

tertinggi di Provinsi Lampung pada Triwulan II 2026 masih berasal dari NTP perkebunan rakyat dan hortikultura, masing-masing sebesar 158,12 dan 129,73. Meskipun demikian, secara rata-rata, NTP sektor perkebunan rakyat tercatat mengalami kontraksi sebesar 7,77% (yoy) dibandingkan dengan rata-rata Triwulan II 2025 (Grafik 5.16).

Secara lebih rinci, rata-rata indeks yang diterima petani (It) di Provinsi Lampung pada Triwulan II 2026 tercatat meningkat sebesar 1,99% (yoy) dibandingkan dengan Triwulan II 2025 dan sebesar 2,24% (qto) dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya (Grafik 5.17). Sementara itu, rata-rata indeks harga yang dibayarkan petani (Ib) di Provinsi Lampung mengalami peningkatan sebesar 3,31% (yoy) pada Triwulan II 2026 dibandingkan dengan rata-rata Triwulan II 2025 dan sebesar 1,71% (qto) dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya (Grafik 5.18).

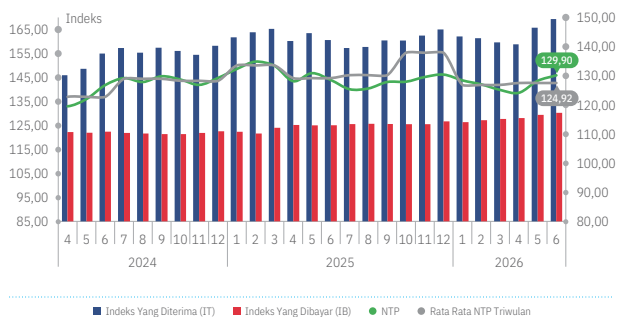
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa secara triwulanan, peningkatan harga yang diterima petani pada Triwulan II 2026 lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan harga yang dibayarkan petani. Kenaikan It sebesar 2,24% (qto), yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan Ib sebesar 1,71% (qto), mengindikasikan bahwa peningkatan harga komoditas yang diterima petani relatif

lebih besar dibandingkan dengan peningkatan biaya produksi dan konsumsi rumah tangga petani. Dengan demikian, secara triwulanan, kondisi tersebut mengindikasikan adanya perbaikan daya beli dan kesejahteraan petani dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Namun demikian, secara tahunan, kenaikan Ib sebesar 3,31% (yoy) masih lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan It sebesar 1,99% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan biaya yang ditanggung petani secara tahunan masih lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan harga yang diterima atas produk pertanian. Dengan demikian, meskipun daya beli petani menunjukkan perbaikan secara triwulanan, tekanan terhadap daya beli petani secara tahunan masih relatif tinggi, seiring dengan kenaikan harga barang dan jasa yang dibayarkan petani yang lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan harga produk pertanian yang diterima.

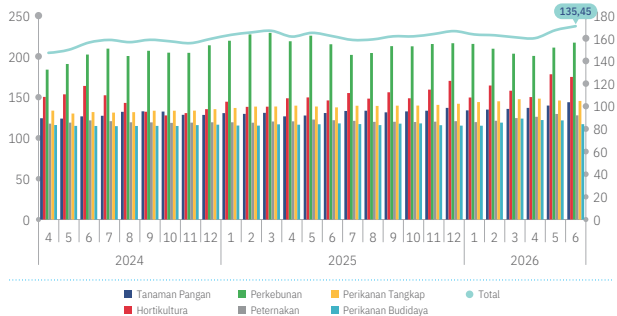
Hal tersebut juga tercermin dari perkembangan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP), yang menggambarkan pengeluaran riil petani dalam menjalankan kegiatan usaha taninya. Pada Triwulan II 2026, rata-rata NTUP Provinsi Lampung meningkat dari 132,76 menjadi

Grafik 5.15. NTP Provinsi Lampung dan Komponen Penyusunnya



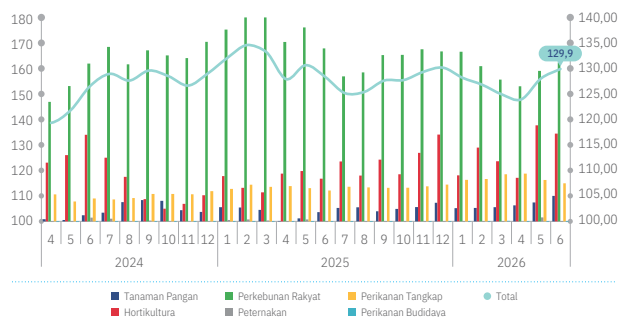
Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 5.17. Indeks yang Diterima per Sub Sektor



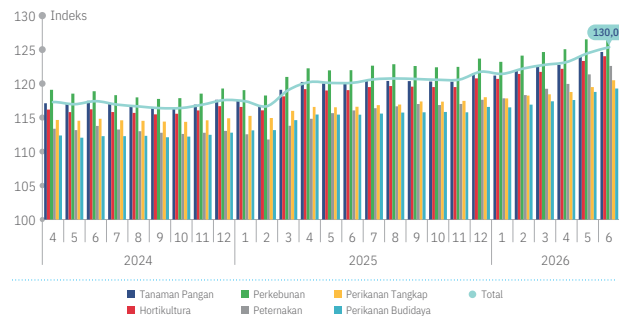
Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 5.16. NTP Per Sub Sektor



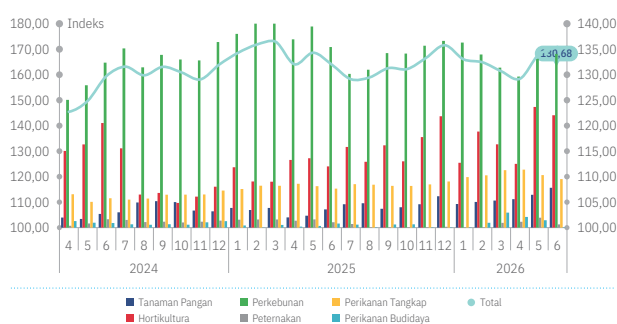
Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 5.18. Indeks yang Dibayar per Sub Sektor



Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 5.19. Pertumbuhan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) per Subsektor



Sumber: BPS, diolah

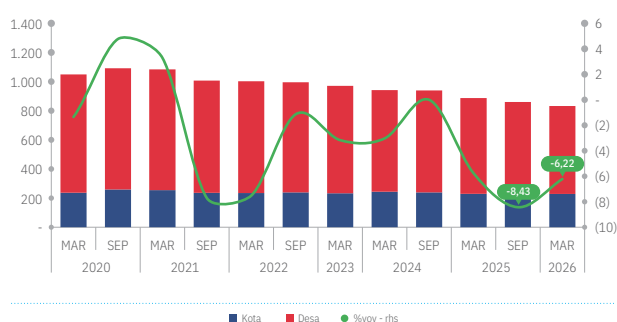
132,88, atau tumbuh sebesar 0,09% (yoy) dibandingkan dengan rata-rata NTUP Triwulan II 2025 (Grafik 5.19). Adapun rata-rata NTP Lampung pada Triwulan II 2026 yang sebesar 127,28 tercatat lebih tinggi dari rata-rata NTP Nasional triwulan II 2026 yang sebesar 126,87 (Grafik 5.20).

5.3. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung pada Maret 2026 tercatat menurun sebesar 6,22% (yoy), menjadi 831,89 ribu jiwa dibandingkan dengan Maret 2025 yang mencapai 887,02 ribu jiwa. Berdasarkan komposisinya, penduduk miskin di Provinsi Lampung mayoritas berada di wilayah perdesaan, dengan sebagian besar bekerja sebagai petani. Penduduk miskin yang berada di wilayah perdesaan mencapai 72,53%, sementara 27,47% lainnya berada di wilayah perkotaan (Grafik 5.21).

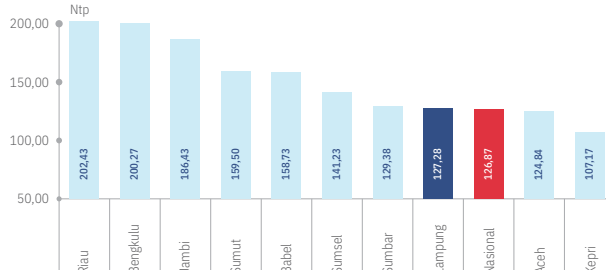
Sementara itu, persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung pada Maret 2026 tercatat sebesar 9,31%, lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Nasional yang sebesar 8,07% (Grafik 5.22). Lebih lanjut, Provinsi Lampung berada pada posisi tertinggi ke-4 jika dibandingkan dengan 9 (sembilan)

Grafik 5.21. Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Lampung



Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.20. NTP Provinsi-Provinsi di Sumatera



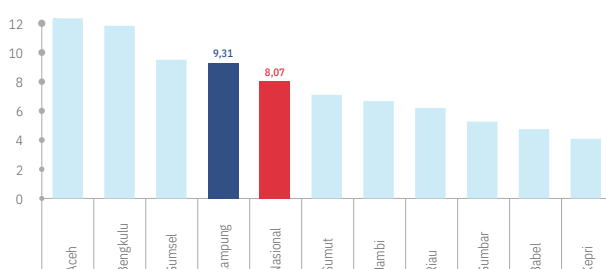
Sumber: BPS, diolah

provinsi lainnya di Sumatera, setelah Provinsi Aceh (12,34%), Provinsi Bengkulu (11,83%), dan Sumatera Selatan (9,50%).

Selanjutnya, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan Provinsi Lampung pada Maret 2026 tercatat sebanyak 228,52 ribu jiwa, atau menurun sebesar 0,28% (yoy) dibandingkan dengan Maret 2025 yang tercatat sebanyak 229,16 ribu jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan Provinsi Lampung pada Maret 2026 tercatat mencapai 603,37 ribu jiwa. Meskipun masih memiliki proporsi yang besar, jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 657,85 ribu jiwa, atau menurun sebesar 8,28% (yoy).

Lebih lanjut, berdasarkan perkembangan Garis Kemiskinan (GK) Provinsi Lampung pada tahun berjalan, dengan data terbaru pada bulan Maret 2026, nilai GK tercatat sebesar Rp657.467 per kapita per bulan. Angka tersebut meningkat sebesar 7,35% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya dan meningkat sebesar 3,69% (qtd) dibandingkan dengan September 2025. GK merupakan salah satu indikator yang menentukan tingkat kemiskinan

Grafik 5.22. Persentase Penduduk Miskin di Sumatera dibandingkan Nasional



Sumber: BPS, diolah

selain pendapatan, yaitu sebagai batas minimum pengeluaran yang mencakup kebutuhan makanan dan nonmakanan agar seseorang tidak dikategorikan sebagai penduduk miskin. Dengan demikian, seseorang dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah nilai garis tersebut. Nilai GK dibentuk oleh dua komponen utama, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Perkembangan harga kelompok makanan sebagai komponen utama GKM turut memengaruhi pergerakan GK, dengan beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras menjadi komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap GK, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan di Provinsi Lampung. Dengan demikian, peningkatan harga bahan makanan menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan garis kemiskinan di Provinsi Lampung.

Di Provinsi Lampung, wilayah perdesaan memiliki kontribusi GKM terhadap GK yang lebih tinggi, yaitu mencapai 75,73%, sedangkan di wilayah perkotaan

sebesar 74,54%. Sementara itu, kontribusi GKBM terhadap GK tercatat sebesar 25,46% di wilayah perkotaan dan 24,27% di wilayah perdesaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada Maret 2026, komponen makanan masih memiliki peranan yang jauh lebih besar terhadap GK dibandingkan dengan komponen bukan makanan.

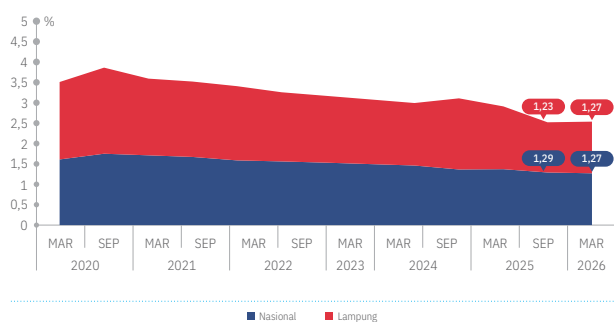
Komoditas makanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap GK pada umumnya sama antara perkotaan dan perdesaan, dengan beras tetap menjadi penyumbang utama, yaitu sebesar 19,83% di perkotaan dan 24,33% di perdesaan. Kedua, rokok kretek filter memberikan sumbangan sebesar 12,79% di perkotaan dan 11,39% di perdesaan. Komoditas penting lainnya meliputi telur ayam ras, daging ayam ras, kopi bubuk dan kopi instan, mie instan, kue basah, bawang merah, tempe, cabai rawit, daging ayam ras, kopi bubuk, dan lainnya. Di sisi lain, komoditas bukan makanan yang paling besar kontribusinya terhadap GK adalah perumahan, yakni 7,75% di perkotaan dan 8,00% di perdesaan, diikuti

Tabel 5.3. Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
Makanan	74,54	Makanan	75,73
Beras	19,83	Beras	24,33
Rokok kretek filter	12,79	Rokok kretek filter	11,39
Telur ayam ras	4,86	Telur ayam ras	4,46
Tempe	2,65	Cabai rawit	2,85
Daging ayam ras	2,61	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,59
Roti	2,52	Bawang merah	2,50
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,51	Roti	2,39
Bawang merah	2,27	Tempe	2,19
Cabai rawit	2,22	Gula pasir	2,10
Mi instan	1,93	Mi instan	1,81
Tahu	1,91	Tahu	1,62
Kue basah	1,55	Tongkol/Tuna/Cakalang	0,90
Lainnya	16,91	Lainnya	16,60
Bukan Makanan	25,46	Bukan Makanan	24,27
Perumahan	7,75	Perumahan	8
Bensin	3,28	Bensin	3,44
Listrik	3,08	Listrik	2,26
Pendidikan	2,11	Pendidikan	1,31
Perlengkapan mandi	1,21	Perlengkapan mandi	1,1
Kesehatan	0,87	Perawatan kulit, muka, kuku, dan rambut	0,81
Pakaian jadi perempuan dewasa	0,77	Pakaian jadi perempuan dewasa	0,77
Lainnya	6,38	Lainnya	6,58

Sumber: BPS

Grafik 5.23. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)



Sumber: BPS, diolah

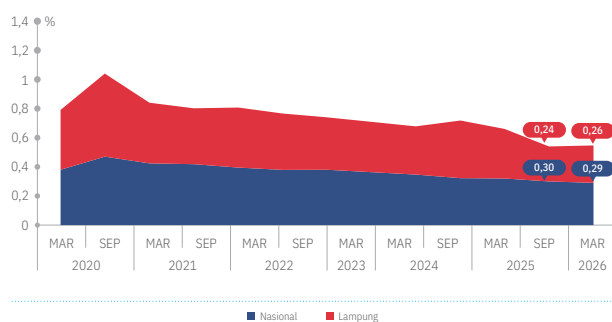
bensin, listrik, dan pendidikan. Selanjutnya, kontribusi juga berasal dari kebutuhan perlengkapan mandi, kesehatan, produk perawatan pribadi, pakaian jadi, serta keperluan lainnya (Tabel 5.3).

Selanjutnya, hingga Maret 2026, kondisi kemiskinan menunjukkan perbaikan baik dari sisi kedalaman maupun keparahan kemiskinan. Hal tersebut tercermin dari nilai P1 yang menurun menjadi 1,27 dari 1,54 pada periode yang sama tahun sebelumnya, sementara nilai P2 turun menjadi 0,26 dari 0,34 pada tahun sebelumnya (Grafik 5.23 dan 5.24). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan, sedangkan Indeks Keparahannya (P2) menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Berdasarkan wilayah, kondisi kemiskinan di perdesaan relatif lebih berat dibandingkan dengan perkotaan. Hal tersebut tercermin dari nilai P1 di wilayah perkotaan yang sebesar 0,99, sedangkan di wilayah perdesaan tercatat lebih tinggi, yaitu 1,42. Kondisi serupa juga terlihat pada P2, dengan nilai sebesar 0,22 di wilayah perkotaan dan mencapai 0,28 di wilayah perdesaan.

Sementara itu, Koefisien Gini hingga Maret 2026 tercatat menurun menjadi 0,290, dibandingkan dengan 0,292 pada periode yang sama tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya penurunan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Lampung. Sejalan dengan perkembangan di Provinsi Lampung, Koefisien Gini Nasional juga mengalami penurunan menjadi 0,368 dari sebelumnya sebesar 0,3875 pada tahun sebelumnya (Grafik 5.25).

Pemerintah Pusat terus melanjutkan program bantuan sosial (bansos) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Lampung. Berdasarkan kebijakan Kementerian Sosial per Juli 2024, Himbara-BSI

Grafik 5.24. Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)

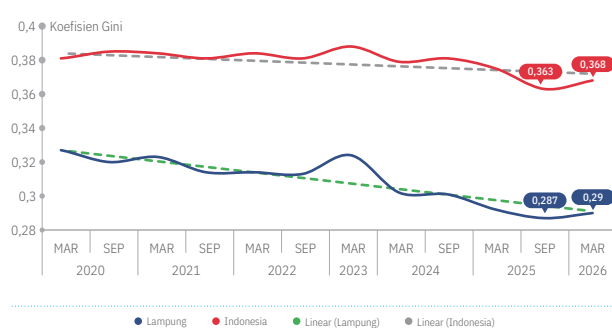


Sumber: BPS, diolah

menyalurkan dana BSNT PKH Tahap 4 2024 di 512 Kab/Kota, sementara PT Pos Indonesia menyalurkan dana bansos PKH Tahap 4 2024 di 514 Kab/Kota, sehingga terdapat 2 Kab/Kota yang menerima penyaluran secara tunai. PKH merupakan salah satu program yang ditujukan untuk menekan angka kemiskinan sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dengan memberikan bantuan kepada keluarga kurang mampu. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap kepada keluarga kurang mampu, dengan besaran bantuan sebesar Rp900 ribu hingga Rp3 juta per tahun.

Pada periode Triwulan II 2026, penyaluran PKH dilakukan melalui skema non tunai oleh bank-bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri) bersama BSI di 512 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, di satu wilayah dapat terdapat dua atau lebih bank penyalur untuk memastikan keterjangkauan dan kelancaran distribusi. Penyaluran secara berkala secara non tunai tersebut dilakukan setiap tiga bulan sekali, dengan tujuan menjaga konsistensi dan ketepatan sasaran dalam mendukung keluarga kurang mampu. Lebih lanjut, penyaluran tertinggi adalah Kabupaten Lampung Timur dengan total sebanyak 54.796 KPM senilai Rp41.747.350.000 (Tabel 5.4).

Grafik 5.25. Koefisien Gini Provinsi Lampung



Sumber: BPS, diolah

Tabel 5.4. Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Triwulan II 2026

Kab/ Kota	Penyalur	SP2D (Jml KPM)	SP2D (Nominal)	Penyaluran (Jml KPM)	Penyaluran (Nominal)	% Penyaluran (Jml KPM)	% Penyaluran (Nominal)	Penyerapan (Jml KPM)	% Penyerapan (Jml KPM)
KOTA BANDAR LAMPUNG	BMRI	42	Rp29.850.000	42	Rp29.850.000	100,00%	100,00%	41	97,62%
KOTA BANDAR LAMPUNG	BNI	4	Rp3.075.000	4	Rp3.075.000	100,00%	100,00%	4	100,00%
KOTA BANDAR LAMPUNG	BRI	32.299	Rp24.409.375.000	32.299	Rp24.409.375.000	100,00%	100,00%	31.812	98,49%
KOTA METRO	BMRI	18	Rp11.825.000	18	Rp11.825.000	100,00%	100,00%	17	94,44%
KOTA METRO	BNI	1	Rp1.800.000	1	Rp1.800.000	100,00%	100,00%	1	100,00%
KOTA METRO	BRI	5.460	Rp4.083.975.000	5.460	Rp4.083.975.000	100,00%	100,00%	5.413	99,14%
LAMPUNG BARAT	BMRI	14.677	Rp10.811.250.000	14.677	Rp10.811.250.000	100,00%	100,00%	13.418	91,42%
LAMPUNG BARAT	BNI	4	Rp2.325.000	4	Rp2.325.000	100,00%	100,00%	4	100,00%
LAMPUNG BARAT	BRI	18	Rp11.525.000	18	Rp11.525.000	100,00%	100,00%	17	94,44%
LAMPUNG SELATAN	BMRI	72	Rp51.875.000	72	Rp51.875.000	100,00%	100,00%	60	83,33%
LAMPUNG SELATAN	BNI	10	Rp6.725.000	10	Rp6.725.000	100,00%	100,00%	10	100,00%
LAMPUNG SELATAN	BRI	53.655	Rp39.265.550.000	53.655	Rp39.265.550.000	100,00%	100,00%	52.705	98,23%
LAMPUNG TENGAH	BMRI	92	Rp65.750.000	92	Rp65.750.000	100,00%	100,00%	73	79,35%
LAMPUNG TENGAH	BNI	17	Rp12.075.000	17	Rp12.075.000	100,00%	100,00%	13	76,47%
LAMPUNG TENGAH	BRI	52.701	Rp39.293.050.000	52.700	Rp39.292.450.000	100,00%	100,00%	51.588	97,89%
LAMPUNG TIMUR	BMRI	54.735	Rp41.703.600.000	54.735	Rp41.703.600.000	100,00%	100,00%	51.440	93,98%
LAMPUNG TIMUR	BNI	10	Rp6.475.000	10	Rp6.475.000	100,00%	100,00%	9	90,00%
LAMPUNG TIMUR	BRI	51	Rp37.275.000	51	Rp37.275.000	100,00%	100,00%	51	100,00%
LAMPUNG UTARA	BMRI	41.229	Rp30.810.350.000	41.229	Rp30.810.350.000	100,00%	100,00%	38.752	93,99%
LAMPUNG UTARA	BNI	2	Rp1.575.000	2	Rp1.575.000	100,00%	100,00%	2	100,00%
LAMPUNG UTARA	BRI	39	Rp28.325.000	39	Rp28.325.000	100,00%	100,00%	37	94,87%
MESUJI	BMRI	7.901	Rp5.961.750.000	7.901	Rp5.961.750.000	100,00%	100,00%	7.344	92,95%
MESUJI	BNI	2	Rp1.200.000	2	Rp1.200.000	100,00%	100,00%	2	100,00%
MESUJI	BRI	15	Rp12.100.000	15	Rp12.100.000	100,00%	100,00%	14	93,33%
PESAWARAN	BMRI	22.797	Rp17.256.500.000	22.797	Rp17.256.500.000	100,00%	100,00%	21.184	92,92%
PESAWARAN	BNI	1	Rp875.000	1	Rp875.000	100,00%	100,00%	1	100,00%
PESAWARAN	BRI	36	Rp25.750.000	36	Rp25.750.000	100,00%	100,00%	35	97,22%
PESISIR BARAT	BMRI	12	Rp8.125.000	12	Rp8.125.000	100,00%	100,00%	9	75,00%
PESISIR BARAT	BNI	4	Rp2.175.000	4	Rp2.175.000	100,00%	100,00%	4	100,00%
PESISIR BARAT	BRI	7.835	Rp6.106.450.000	7.835	Rp6.106.450.000	100,00%	100,00%	7.727	98,62%
PESISIR BARAT	POS	905	Rp737.825.000	901	Rp734.975.000	99,56%	99,61%	901	100,00%
PRINGSEWU	BMRI	26	Rp19.850.000	26	Rp19.850.000	100,00%	100,00%	21	80,77%
PRINGSEWU	BNI	5	Rp1.925.000	5	Rp1.925.000	100,00%	100,00%	4	80,00%
PRINGSEWU	BRI	17.417	Rp12.990.650.000	17.417	Rp12.990.650.000	100,00%	100,00%	17.149	98,46%
TANGGAMUS	BMRI	33.223	Rp24.765.675.000	33.223	Rp24.765.675.000	100,00%	100,00%	31.436	94,62%
TANGGAMUS	BNI	7	Rp3.500.000	7	Rp3.500.000	100,00%	100,00%	6	85,71%
TANGGAMUS	BRI	33	Rp24.700.000	33	Rp24.700.000	100,00%	100,00%	32	96,97%
TULANG BAWANG	BMRI	13.921	Rp10.244.525.000	13.921	Rp10.244.525.000	100,00%	100,00%	13.017	93,51%
TULANG BAWANG	BNI	2	Rp2.100.000	2	Rp2.100.000	100,00%	100,00%	1	50,00%
TULANG BAWANG	BRI	26	Rp18.175.000	26	Rp18.175.000	100,00%	100,00%	23	88,46%
TULANG BAWANG BARAT	BMRI	10.384	Rp7.929.000.000	10.384	Rp7.929.000.000	100,00%	100,00%	9.811	94,48%
TULANG BAWANG BARAT	BNI	8	Rp5.300.000	8	Rp5.300.000	100,00%	100,00%	7	87,50%
TULANG BAWANG BARAT	BRI	12	Rp7.300.000	12	Rp7.300.000	100,00%	100,00%	12	100,00%
WAY KANAN	BMRI	22.088	Rp16.576.525.000	22.088	Rp16.576.525.000	100,00%	100,00%	20.118	91,08%
WAY KANAN	BNI	3	Rp1.200.000	3	Rp1.200.000	100,00%	100,00%	2	66,67%
WAY KANAN	BRI	26	Rp18.375.000	26	Rp18.375.000	100,00%	100,00%	25	96,15%

Sumber: HIMBARA

Adapun, untuk bantuan program sembako, telah disalurkan kepada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung secara non tunai dengan kabupaten penerima

banjos tertinggi adalah Kabupaten Lampung Selatan dengan total sebanyak 93.965 KPM senilai Rp 18.793.000.000 (Tabel 5.5).

Tabel 5.5. Penyaluran Program Sembako Posisi Triwulan II 2026

Kab/ Kota	Mekanise Penyaluran	Penyalur	SP2D Kemensos					
			Tahap April		Tahap Mei		Tahap Juni	
			Jumlah KPM	Nominal Rp	Jumlah KPM	Nominal Rp	Jumlah KPM	Nominal Rp
KOTA BANDAR LAMPUNG	NON TUNAI	BMRI	66	13.200.000	66	13.200.000	66	13.200.000
KOTA BANDAR LAMPUNG	NON TUNAI	BNI	7	1.400.000	7	1.400.000	7	1.400.000
KOTA BANDAR LAMPUNG	NON TUNAI	BRI	48.043	9.608.600.000	48.043	9.608.600.000	48.043	9.608.600.000
KOTA BANDAR LAMPUNG	TUNAI	POS	0	0	0	0	0	0
KOTA METRO	NON TUNAI	BMRI	29	5.800.000	29	5.800.000	29	5.800.000
KOTA METRO	NON TUNAI	BNI	4	800.000	4	800.000	4	800.000
KOTA METRO	NON TUNAI	BRI	8.300	1.660.000.000	8.300	1.660.000.000	8.300	1.660.000.000
KOTA METRO	TUNAI	POS	0	0	0	0	0	0
LAMPUNG BARAT	NON TUNAI	BMRI	25.024	5.004.800.000	25.024	5.004.800.000	25.024	5.004.800.000
LAMPUNG BARAT	NON TUNAI	BNI	4	800.000	4	800.000	4	800.000
LAMPUNG BARAT	NON TUNAI	BRI	28	5.600.000	28	5.600.000	28	5.600.000
LAMPUNG BARAT	TUNAI	POS	0	0	0	0	0	0
LAMPUNG SELATAN	NON TUNAI	BMRI	122	24.400.000	122	24.400.000	122	24.400.000
LAMPUNG SELATAN	NON TUNAI	BNI	26	5.200.000	26	5.200.000	26	5.200.000
LAMPUNG SELATAN	NON TUNAI	BRI	97.578	19.515.600.000	97.578	19.515.600.000	97.578	19.515.600.000
LAMPUNG SELATAN	TUNAI	POS	0	0	0	0	0	0
LAMPUNG TENGAH	NON TUNAI	BMRI	196	39.200.000	196	39.200.000	196	39.200.000
LAMPUNG TENGAH	NON TUNAI	BNI	27	5.400.000	27	5.400.000	27	5.400.000
LAMPUNG TENGAH	NON TUNAI	BRI	85.145	17.029.000.000	85.145	17.029.000.000	85.145	17.029.000.000
LAMPUNG TENGAH	TUNAI	POS	0	0	0	0	0	0
LAMPUNG TIMUR	NON TUNAI	BMRI	88.412	17.682.400.000	88.412	17.682.400.000	88.412	17.682.400.000
LAMPUNG TIMUR	NON TUNAI	BNI	27	5.400.000	27	5.400.000	27	5.400.000
LAMPUNG TIMUR	NON TUNAI	BRI	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000
LAMPUNG TIMUR	TUNAI	POS	0	0	0	0	0	0
LAMPUNG UTARA	NON TUNAI	BMRI	69.750	13.950.000.000	69.750	13.950.000.000	69.750	13.950.000.000
LAMPUNG UTARA	NON TUNAI	BNI	8	1.600.000	8	1.600.000	8	1.600.000
LAMPUNG UTARA	NON TUNAI	BRI	66	13.200.000	66	13.200.000	66	13.200.000
LAMPUNG UTARA	TUNAI	POS	0	0	0	0	0	0
MESUJI	NON TUNAI	BMRI	13.181	2.636.200.000	13.181	2.636.200.000	13.181	2.636.200.000
MESUJI	NON TUNAI	BNI	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000
MESUJI	NON TUNAI	BRI	25	5.000.000	25	5.000.000	25	5.000.000
MESUJI	TUNAI	POS	0	0	0	0	0	0
PESAWARAN	NON TUNAI	BMRI	37.660	7.532.000.000	37.660	7.532.000.000	37.660	7.532.000.000
PESAWARAN	NON TUNAI	BNI	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000
PESAWARAN	NON TUNAI	BRI	81	16.200.000	81	16.200.000	81	16.200.000
PESAWARAN	TUNAI	POS	0	0	0	0	0	0
PESISIR BARAT	NON TUNAI	BMRI	25	5.000.000	25	5.000.000	25	5.000.000
PESISIR BARAT	NON TUNAI	BNI	4	800.000	4	800.000	4	800.000
PESISIR BARAT	NON TUNAI	BRI	12.199	2.439.800.000	12.199	2.439.800.000	12.199	2.439.800.000
PESISIR BARAT	TUNAI	POS	1.691	338.200.000	1.691	338.200.000	1.691	338.200.000
PRINGSEWU	NON TUNAI	BMRI	52	10.400.000	52	10.400.000	52	10.400.000
PRINGSEWU	NON TUNAI	BNI	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000
PRINGSEWU	NON TUNAI	BRI	29.658	5.931.600.000	29.658	5.931.600.000	29.658	5.931.600.000
PRINGSEWU	TUNAI	POS	0	0	0	0	0	0
TANGGAMUS	NON TUNAI	BMRI	58.881	11.776.200.000	58.881	11.776.200.000	58.881	11.776.200.000
TANGGAMUS	NON TUNAI	BNI	14	2.800.000	14	2.800.000	14	2.800.000
TANGGAMUS	NON TUNAI	BRI	61	12.200.000	61	12.200.000	61	12.200.000
TANGGAMUS	TUNAI	POS	0	0	0	0	0	0
TULANG BAWANG	NON TUNAI	BMRI	21.111	4.222.200.000	21.111	4.222.200.000	21.111	4.222.200.000
TULANG BAWANG	NON TUNAI	BNI	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000
TULANG BAWANG	NON TUNAI	BRI	39	7.800.000	39	7.800.000	39	7.800.000
TULANG BAWANG	TUNAI	POS	0	0	0	0	0	0
TULANG BAWANG BARAT	NON TUNAI	BMRI	16.080	3.216.000.000	16.080	3.216.000.000	16.080	3.216.000.000
TULANG BAWANG BARAT	NON TUNAI	BNI	14	2.800.000	14	2.800.000	14	2.800.000
TULANG BAWANG BARAT	NON TUNAI	BRI	21	4.200.000	21	4.200.000	21	4.200.000
TULANG BAWANG BARAT	TUNAI	POS	0	0	0	0	0	0
WAY KANAN	NON TUNAI	BMRI	39.217	7.843.400.000	39.217	7.843.400.000	39.217	7.843.400.000
WAY KANAN	NON TUNAI	BNI	6	1.200.000	6	1.200.000	6	1.200.000
WAY KANAN	NON TUNAI	BRI	39	7.800.000	39	7.800.000	39	7.800.000
WAY KANAN	TUNAI	POS	0	0	0	0	0	0

Kab/ Kota	Mekanise Penyaluran	Penyalur	PENYALURAN											
			Tahap April				Tahap Mei				Tahap Juni			
			Jumlah KPM	%	Nominal Rp	%	Jumlah KPM	%	Nominal Rp	%	Jumlah KPM	%	Nominal Rp	%
KOTA BANDAR LAMPUNG	NON TUNAI	BMRI	66	100%	13.200.000	100%	66	100%	13.200.000	100%	66	100%	13.200.000	100%
KOTA BANDAR LAMPUNG	NON TUNAI	BNI	7	100%	1.400.000	100%	7	100%	1.400.000	100%	7	100%	1.400.000	100%
KOTA BANDAR LAMPUNG	NON TUNAI	BRI	48.043	100%	9.608.600.000	100%	48.043	100%	9.608.600.000	100%	48.043	100%	9.608.600.000	100%
KOTA BANDAR LAMPUNG	TUNAI	POS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
KOTA METRO	NON TUNAI	BMRI	29	100%	5.800.000	100%	29	100%	5.800.000	100%	29	100%	5.800.000	100%
KOTA METRO	NON TUNAI	BNI	4	100%	800.000	100%	4	100%	800.000	100%	4	100%	800.000	100%
KOTA METRO	NON TUNAI	BRI	8.300	100%	1.660.000.000	100%	8.300	100%	1.660.000.000	100%	8.300	100%	1.660.000.000	100%
KOTA METRO	TUNAI	POS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
LAMPUNG BARAT	NON TUNAI	BMRI	25.024	100%	5.004.800.000	100%	25.024	100%	5.004.800.000	100%	25.024	100%	5.004.800.000	100%
LAMPUNG BARAT	NON TUNAI	BNI	4	100%	800.000	100%	4	100%	800.000	100%	4	100%	800.000	100%
LAMPUNG BARAT	NON TUNAI	BRI	28	100%	5.600.000	100%	28	100%	5.600.000	100%	28	100%	5.600.000	100%
LAMPUNG BARAT	TUNAI	POS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
LAMPUNG SELATAN	NON TUNAI	BMRI	122	100%	24.400.000	100%	122	100%	24.400.000	100%	122	100%	24.400.000	100%
LAMPUNG SELATAN	NON TUNAI	BNI	26	100%	5.200.000	100%	26	100%	5.200.000	100%	26	100%	5.200.000	100%
LAMPUNG SELATAN	NON TUNAI	BRI	97.578	100%	19.515.600.000	100%	97.578	100%	19.515.600.000	100%	97.578	100%	19.515.600.000	100%
LAMPUNG SELATAN	TUNAI	POS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
LAMPUNG TENGAH	NON TUNAI	BMRI	196	100%	39.200.000	100%	196	100%	39.200.000	100%	196	100%	39.200.000	100%
LAMPUNG TENGAH	NON TUNAI	BNI	27	100%	5.400.000	100%	27	100%	5.400.000	100%	27	100%	5.400.000	100%
LAMPUNG TENGAH	NON TUNAI	BRI	85.144	100%	17.028.800.000	100%	85.144	100%	17.028.800.000	100%	85.144	100%	17.028.800.000	100%
LAMPUNG TENGAH	TUNAI	POS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
LAMPUNG TIMUR	NON TUNAI	BMRI	88.412	100%	17.682.400.000	100%	88.412	100%	17.682.400.000	100%	88.412	100%	17.682.400.000	100%
LAMPUNG TIMUR	NON TUNAI	BNI	27	100%	5.400.000	100%	27	100%	5.400.000	100%	27	100%	5.400.000	100%
LAMPUNG TIMUR	NON TUNAI	BRI	100	100%	20.000.000	100%	100	100%	20.000.000	100%	100	100%	20.000.000	100%
LAMPUNG TIMUR	TUNAI	POS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
LAMPUNG UTARA	NON TUNAI	BMRI	69.750	100%	13.950.000.000	100%	69.750	100%	13.950.000.000	100%	69.750	100%	13.950.000.000	100%
LAMPUNG UTARA	NON TUNAI	BNI	8	100%	1.600.000	100%	8	100%	1.600.000	100%	8	100%	1.600.000	100%
LAMPUNG UTARA	NON TUNAI	BRI	66	100%	13.200.000	100%	66	100%	13.200.000	100%	66	100%	13.200.000	100%
LAMPUNG UTARA	TUNAI	POS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
MESUJI	NON TUNAI	BMRI	13.181	100%	2.636.200.000	100%	13.181	100%	2.636.200.000	100%	13.181	100%	2.636.200.000	100%
MESUJI	NON TUNAI	BNI	5	100%	1.000.000	100%	5	100%	1.000.000	100%	5	100%	1.000.000	100%
MESUJI	NON TUNAI	BRI	25	100%	5.000.000	100%	25	100%	5.000.000	100%	25	100%	5.000.000	100%
MESUJI	TUNAI	POS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
PESAWARAN	NON TUNAI	BMRI	37.660	100%	7.532.000.000	100%	37.660	100%	7.532.000.000	100%	37.660	100%	7.532.000.000	100%
PESAWARAN	NON TUNAI	BNI	5	100%	1.000.000	100%	5	100%	1.000.000	100%	5	100%	1.000.000	100%
PESAWARAN	NON TUNAI	BRI	81	100%	16.200.000	100%	81	100%	16.200.000	100%	81	100%	16.200.000	100%
PESAWARAN	TUNAI	POS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
PESISIR BARAT	NON TUNAI	BMRI	25	100%	5.000.000	100%	25	100%	5.000.000	100%	25	100%	5.000.000	100%
PESISIR BARAT	NON TUNAI	BNI	4	100%	800.000	100%	4	100%	800.000	100%	4	100%	800.000	100%
PESISIR BARAT	NON TUNAI	BRI	12.199	100%	2.439.800.000	100%	12.199	100%	2.439.800.000	100%	12.199	100%	2.439.800.000	100%
PESISIR BARAT	TUNAI	POS	1.691	100%	338.200.000	100%	1.691	100%	338.200.000	100%	1.691	100%	338.200.000	100%
PRINGSEWU	NON TUNAI	BMRI	52	100%	10.400.000	100%	52	100%	10.400.000	100%	52	100%	10.400.000	100%
PRINGSEWU	NON TUNAI	BNI	5	100%	1.000.000	100%	5	100%	1.000.000	100%	5	100%	1.000.000	100%
PRINGSEWU	NON TUNAI	BRI	29.658	100%	5.931.600.000	100%	29.658	100%	5.931.600.000	100%	29.658	100%	5.931.600.000	100%
PRINGSEWU	TUNAI	POS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
TANGGAMUS	NON TUNAI	BMRI	58.881	100%	11.776.200.000	100%	58.881	100%	11.776.200.000	100%	58.881	100%	11.776.200.000	100%
TANGGAMUS	NON TUNAI	BNI	14	100%	2.800.000	100%	14	100%	2.800.000	100%	14	100%	2.800.000	100%
TANGGAMUS	NON TUNAI	BRI	61	100%	12.200.000	100%	61	100%	12.200.000	100%	61	100%	12.200.000	100%
TANGGAMUS	TUNAI	POS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
TULANG BAWANG	NON TUNAI	BMRI	21.111	100%	4.222.200.000	100%	21.111	100%	4.222.200.000	100%	21.111	100%	4.222.200.000	100%
TULANG BAWANG	NON TUNAI	BNI	5	100%	1.000.000	100%	5	100%	1.000.000	100%	5	100%	1.000.000	100%
TULANG BAWANG	NON TUNAI	BRI	39	100%	7.800.000	100%	39	100%	7.800.000	100%	39	100%	7.800.000	100%
TULANG BAWANG	TUNAI	POS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
TULANG BAWANG BARAT	NON TUNAI	BMRI	16.080	100%	3.216.000.000	100%	16.080	100%	3.216.000.000	100%	16.080	100%	3.216.000.000	100%
TULANG BAWANG BARAT	NON TUNAI	BNI	14	100%	2.800.000	100%	14	100%	2.800.000	100%	14	100%	2.800.000	100%
TULANG BAWANG BARAT	NON TUNAI	BRI	21	100%	4.200.000	100%	21	100%	4.200.000	100%	21	100%	4.200.000	100%
TULANG BAWANG BARAT	TUNAI	POS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
WAY KANAN	NON TUNAI	BMRI	39.217	100%	7.843.400.000	100%	39.217	100%	7.843.400.000	100%	39.217	100%	7.843.400.000	100%
WAY KANAN	NON TUNAI	BNI	6	100%	1.200.000	100%	6	100%	1.200.000	100%	6	100%	1.200.000	100%
WAY KANAN	NON TUNAI	BRI	39	100%	7.800.000	100%	39	100%	7.800.000	100%	39	100%	7.800.000	100%
WAY KANAN	TUNAI	POS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%

Kab/ Kota	Mekanise Penyaluran	Penyalur	PENYERAPAN											
			Tahap April				Tahap Mei				Tahap Juni			
			Jumlah KPM	%	Nominal Rp	%	Jumlah KPM	%	Nominal Rp	%	Jumlah KPM	%	Nominal Rp	%
KOTA BANDAR LAMPUNG	NON TUNAI	BMRI	66	100%	13.200.000	100%	66	100%	13.200.000	100%	66	100%	13.200.000	100%
KOTA BANDAR LAMPUNG	NON TUNAI	BNI	7	100%	1.400.000	100%	7	100%	1.400.000	100%	7	100%	1.400.000	100%
KOTA BANDAR LAMPUNG	NON TUNAI	BRI	46.031	96%	9.206.200.000	96%	46.031	96%	9.206.200.000	96%	46.031	96%	9.206.200.000	96%
KOTA BANDAR LAMPUNG	TUNAI	POS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
KOTA METRO	NON TUNAI	BMRI	29	100%	5.800.000	100%	29	100%	5.800.000	100%	29	100%	5.800.000	100%
KOTA METRO	NON TUNAI	BNI	4	100%	800.000	100%	4	100%	800.000	100%	4	100%	800.000	100%
KOTA METRO	NON TUNAI	BRI	7.807	94%	1.561.400.000	94%	7.807	94%	1.561.400.000	94%	7.807	94%	1.561.400.000	94%
KOTA METRO	TUNAI	POS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
LAMPUNG BARAT	NON TUNAI	BMRI	24.096	96%	4.819.200.000	96%	24.096	96%	4.819.200.000	96%	24.096	96%	4.819.200.000	96%
LAMPUNG BARAT	NON TUNAI	BNI	4	100%	800.000	100%	4	100%	800.000	100%	4	100%	800.000	100%
LAMPUNG BARAT	NON TUNAI	BRI	26	93%	5.200.000	93%	26	93%	5.200.000	93%	26	93%	5.200.000	93%
LAMPUNG BARAT	TUNAI	POS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
LAMPUNG SELATAN	NON TUNAI	BMRI	114	93%	22.800.000	93%	114	93%	22.800.000	93%	114	93%	22.800.000	93%
LAMPUNG SELATAN	NON TUNAI	BNI	25	96%	5.000.000	96%	25	96%	5.000.000	96%	25	96%	5.000.000	96%
LAMPUNG SELATAN	NON TUNAI	BRI	93.826	96%	18.765.200.000	96%	93.826	96%	18.765.200.000	96%	93.826	96%	18.765.200.000	96%
LAMPUNG SELATAN	TUNAI	POS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
LAMPUNG TENGAH	NON TUNAI	BMRI	185	94%	37.000.000	94%	185	94%	37.000.000	94%	185	94%	37.000.000	94%
LAMPUNG TENGAH	NON TUNAI	BNI	25	93%	5.000.000	93%	25	93%	5.000.000	93%	25	93%	5.000.000	93%
LAMPUNG TENGAH	NON TUNAI	BRI	81.458	96%	16.291.600.000	96%	81.458	96%	16.291.600.000	96%	81.458	96%	16.291.600.000	96%
LAMPUNG TENGAH	TUNAI	POS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
LAMPUNG TIMUR	NON TUNAI	BMRI	84.088	95%	16.817.600.000	95%	84.088	95%	16.817.600.000	95%	84.088	95%	16.817.600.000	95%
LAMPUNG TIMUR	NON TUNAI	BNI	25	93%	5.000.000	93%	25	93%	5.000.000	93%	25	93%	5.000.000	93%
LAMPUNG TIMUR	NON TUNAI	BRI	91	91%	18.200.000	91%	91	91%	18.200.000	91%	91	91%	18.200.000	91%
LAMPUNG TIMUR	TUNAI	POS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
LAMPUNG UTARA	NON TUNAI	BMRI	68.633	98%	13.726.600.000	98%	68.633	98%	13.726.600.000	98%	68.633	98%	13.726.600.000	98%
LAMPUNG UTARA	NON TUNAI	BNI	5	63%	1.000.000	63%	5	63%	1.000.000	63%	5	63%	1.000.000	63%
LAMPUNG UTARA	NON TUNAI	BRI	57	86%	11.400.000	86%	57	86%	11.400.000	86%	57	86%	11.400.000	86%
LAMPUNG UTARA	TUNAI	POS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
MESUJI	NON TUNAI	BMRI	12.532	95%	2.506.400.000	95%	12.532	95%	2.506.400.000	95%	12.532	95%	2.506.400.000	95%
MESUJI	NON TUNAI	BNI	5	100%	1.000.000	100%	5	100%	1.000.000	100%	5	100%	1.000.000	100%
MESUJI	NON TUNAI	BRI	22	88%	4.400.000	88%	22	88%	4.400.000	88%	22	88%	4.400.000	88%
MESUJI	TUNAI	POS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
PESAWARAN	NON TUNAI	BMRI	36.799	98%	7.359.800.000	98%	36.799	98%	7.359.800.000	98%	36.799	98%	7.359.800.000	98%
PESAWARAN	NON TUNAI	BNI	4	80%	800.000	80%	4	80%	800.000	80%	4	80%	800.000	80%
PESAWARAN	NON TUNAI	BRI	79	98%	15.800.000	98%	79	98%	15.800.000	98%	79	98%	15.800.000	98%
PESAWARAN	TUNAI	POS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
PESISIR BARAT	NON TUNAI	BMRI	23	92%	4.600.000	92%	23	92%	4.600.000	92%	23	92%	4.600.000	92%
PESISIR BARAT	NON TUNAI	BNI	4	100%	800.000	100%	4	100%	800.000	100%	4	100%	800.000	100%
PESISIR BARAT	NON TUNAI	BRI	11.644	95%	2.328.800.000	95%	11.644	95%	2.328.800.000	95%	11.644	95%	2.328.800.000	95%
PESISIR BARAT	TUNAI	POS	1.691	100%	338.200.000	100%	1.691	100%	338.200.000	100%	1.691	100%	338.200.000	100%
PRINGSEWU	NON TUNAI	BMRI	46	88%	9.200.000	88%	46	88%	9.200.000	88%	46	88%	9.200.000	88%
PRINGSEWU	NON TUNAI	BNI	4	80%	800.000	80%	4	80%	800.000	80%	4	80%	800.000	80%
PRINGSEWU	NON TUNAI	BRI	28.391	96%	5.678.200.000	96%	28.391	96%	5.678.200.000	96%	28.391	96%	5.678.200.000	96%
PRINGSEWU	TUNAI	POS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
TANGGAMUS	NON TUNAI	BMRI	57.923	98%	11.584.600.000	98%	57.923	98%	11.584.600.000	98%	57.923	98%	11.584.600.000	98%
TANGGAMUS	NON TUNAI	BNI	13	93%	2.600.000	93%	13	93%	2.600.000	93%	13	93%	2.600.000	93%
TANGGAMUS	NON TUNAI	BRI	57	93%	11.400.000	93%	57	93%	11.400.000	93%	57	93%	11.400.000	93%
TANGGAMUS	TUNAI	POS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
TULANG BAWANG	NON TUNAI	BMRI	20.446	97%	4.089.200.000	97%	20.446	97%	4.089.200.000	97%	20.446	97%	4.089.200.000	97%
TULANG BAWANG	NON TUNAI	BNI	4	80%	800.000	80%	4	80%	800.000	80%	4	80%	800.000	80%
TULANG BAWANG	NON TUNAI	BRI	32	82%	6.400.000	82%	32	82%	6.400.000	82%	32	82%	6.400.000	82%
TULANG BAWANG	TUNAI	POS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
TULANG BAWANG BARAT	NON TUNAI	BMRI	15.548	97%	3.109.600.000	97%	15.548	97%	3.109.600.000	97%	15.548	97%	3.109.600.000	97%
TULANG BAWANG BARAT	NON TUNAI	BNI	12	86%	2.400.000	86%	12	86%	2.400.000	86%	12	86%	2.400.000	86%
TULANG BAWANG BARAT	NON TUNAI	BRI	20	95%	4.000.000	95%	20	95%	4.000.000	95%	20	95%	4.000.000	95%
TULANG BAWANG BARAT	TUNAI	POS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
WAY KANAN	NON TUNAI	BMRI	38.250	98%	7.650.000.000	98%	38.250	98%	7.650.000.000	98%	38.250	98%	7.650.000.000	98%
WAY KANAN	NON TUNAI	BNI	6	100%	1.200.000	100%	6	100%	1.200.000	100%	6	100%	1.200.000	100%
WAY KANAN	NON TUNAI	BRI	35	90%	7.000.000	90%	35	90%	7.000.000	90%	35	90%	7.000.000	90%
WAY KANAN	TUNAI	POS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%



Prospek Perekonomian Dan Inflasi



Prospek perekonomian dunia pada tahun 2026–2027 kini diperkirakan menghadapi tantangan yang lebih berat di tengah ketidakpastian global yang semakin tinggi. Berdasarkan perkembangan terkini, kondisi dan prospek ekonomi dunia diperkirakan lebih rendah jika dibandingkan dengan prospek awal tahun, dipicu oleh tingginya gejolak geopolitik akibat perang di Timur Tengah. Gejolak ini tidak hanya memengaruhi rantai pasok global tetapi juga memicu volatilitas harga komoditas energi, terutama minyak mentah, serta menunda normalisasi kebijakan moneter global.



Kinerja perekonomian Provinsi Lampung diperkirakan tumbuh dalam kisaran 5,0–5,6% pada tahun 2026, cenderung lebih moderat dari prakiraan sebelumnya seiring eskalasi risiko geopolitik global, namun tetap didukung prospek penguatan permintaan domestik serta kinerja lapangan usaha utama. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga dan investasi diperkirakan tetap menjadi penopang pertumbuhan seiring terjaganya daya beli masyarakat, kenaikan upah minimum, serta berlanjutnya pembangunan infrastruktur dan proyek strategis daerah. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha (LU), sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diperkirakan tetap menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, didukung keberlanjutan program swasembada pangan dan penguatan produktivitas.



Inflasi gabungan empat kabupaten kota di Provinsi Lampung pada tahun 2026 diperkirakan tetap terjaga dalam sasaran 2,5+1%. Laju inflasi gabungan di Provinsi Lampung yang semakin terkendali tersebut sejalan dengan penguatan program TPIP-TPID dan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) dalam kerangka 4K.

6.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Dunia dan Nasional

Prospek perekonomian dunia pada tahun 2026–2027 kini diperkirakan menghadapi tantangan yang lebih berat di tengah ketidakpastian global yang semakin tinggi. Berdasarkan perkembangan terkini, kondisi dan prospek ekonomi dunia diperkirakan lebih rendah jika dibandingkan dengan prospek awal tahun, dipicu oleh tingginya gejolak geopolitik akibat perang di Timur Tengah. Gejolak ini tidak hanya memengaruhi rantai pasok global tetapi juga memicu volatilitas harga komoditas energi, terutama minyak mentah, serta menunda normalisasi kebijakan moneter global.

Pertumbuhan ekonomi negara maju diperkirakan tetap terbatas dengan tekanan inflasi yang cenderung meningkat. Di Amerika Serikat, meskipun pertumbuhan ekonomi masih tercatat solid sebesar 1,5% pada triwulan II 2026, melambat bila dibandingkan pada triwulan sebelumnya. Arah kebijakan moneter diperkirakan tetap ketat (*higher for longer*), seiring inflasi yang masih persisten. Di kawasan Eropa, pertumbuhan ekonomi masih relatif terbatas di tengah meningkatnya tekanan harga energi dan ketidakpastian global. Kenaikan biaya energi turut menekan daya beli dan permintaan domestik dalam jangka pendek, meskipun konsumsi dan investasi diperkirakan membaik secara bertahap seiring berlanjutnya proses pemulihan ekonomi. Sementara itu, perekonomian Jepang tumbuh moderat dengan tekanan inflasi yang masih relatif tinggi, yang salah satunya dipengaruhi oleh kenaikan harga energi.

Di sisi lain, negara berkembang masih menjadi motor utama pertumbuhan global meskipun menghadapi risiko volatilitas nilai tukar. Tiongkok menunjukkan resiliensi dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,3% (yoy) pada triwulan II 2026, ditopang oleh kinerja sektor manufaktur dan ekspor yang tetap kuat serta dukungan kebijakan pemerintah. India dan kawasan ASEAN-5 juga diperkirakan mempertahankan momentum pertumbuhan yang relatif stabil, didukung oleh permintaan domestik dan investasi yang tetap terjaga. Namun, secara keseluruhan, risiko terhadap prospek global tetap condong ke bawah (*downside risk*), terutama terkait fragmentasi perdagangan, potensi berlangsungnya konflik geopolitik yang lebih lama, serta pergeseran aliran modal global ke aset yang lebih aman yang dapat meningkatkan volatilitas pasar keuangan dan nilai tukar.

Sejalan dengan dinamika global tersebut, perekonomian Indonesia masih menunjukkan kinerja

yang kuat. Pada triwulan II 2026, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,29% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,61% (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2026 ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,06% (yoy) seiring momentum libur sekolah dan berbagai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 15,97% (yoy) bersumber dari peningkatan realisasi belanja pegawai

Tabel 6.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia

	2025	2026	2027
World Output	3.5	3.0	3.4
Advanced Economies	1.9	1.7	1.8
United States	2.1	2.3	2.2
Euro Area	1.4	0.9	1.2
Germany	0.2	0.7	1.0
France	0.9	0.6	0.9
Italy	0.5	0.5	0.5
Spain	2.8	2.1	1.8
Japan	1.1	0.6	0.7
United Kingdom	1.4	1.0	1.3
Canada	1.9	1.1	1.7
Other Advanced Economies	3.0	2.8	2.3
Emerging Market and Developing Economies	4.5	3.8	4.5
Emerging and Developing Asia	5.6	5.0	4.8
China	5.0	4.6	4.1
India	7.7	6.4	6.7
Emerging and Developing Europe	2.0	1.9	2.1
Russia	1.0	1.1	1.1
Latin America and the Caribbean	2.4	2.4	2.7
Brazil	2.3	2.4	2.2
Mexico	0.5	1.2	1.9
Middle East and Central Asia	3.7	0.7	6.5
Saudi Arabia	4.6	1.7	5.5
Sub-Saharan Africa	4.5	4.3	4.5
Nigeria	4.0	4.1	4.3
South Africa	1.1	1.1	1.3
Memorandum			
Emerging Market and Middle-Income Economies	4.4	3.7	4.4
Low-Income Developing Countries	4.8	4.8	4.9

Sumber: IMF World Economic Outlook Update, Juli 2026

termasuk pembayaran gaji ke-13, serta belanja barang dan jasa terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) tumbuh tinggi sebesar 6,93% (yoy). Investasi tumbuh sebesar 6,87% (yoy) terutama didorong oleh pertumbuhan subkomponen kendaraan serta investasi pemerintah dan swasta sejalan dengan meningkatnya realisasi penanaman modal. Sementara itu, ekspor tumbuh sebesar 4,13% (yoy) ditopang oleh permintaan mitra dagang utama. Dari sisi lapangan usaha, berbagai LU utama pada triwulan II 2026 tumbuh tetap baik. LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, LU Konstruksi, serta LU Informasi dan Komunikasi sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi tumbuh baik seiring dengan terjaganya permintaan domestik.

Ke depan, kewaspadaan terhadap risiko ketidakpastian geopolitik global dan gejolak pasar keuangan tetap menjadi prioritas. Namun demikian, dengan bauran kebijakan yang konsisten antara otoritas moneter dan fiskal, sebagaimana tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2027, pertumbuhan ekonomi Indonesia diyakini akan tetap terjaga dalam tren yang positif dan resilien.

Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung

Kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh dalam kisaran 5,0–5,6%, ditopang oleh tetap kuatnya permintaan domestik serta terjaganya permintaan eksternal. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan diperkirakan didukung oleh kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan seiring berlanjutnya program peningkatan produktivitas pangan, serta LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan Besar dan Eceran yang ditopang oleh penguatan hilirisasi, permintaan domestik, dan aktivitas perdagangan. Kinerja LU Konstruksi juga diperkirakan tetap positif sejalan dengan berlanjutnya pembangunan proyek pemerintah dan swasta. Ke depan, risiko yang perlu dicermati terutama bersumber dari ketidakpastian global, gangguan cuaca, serta volatilitas harga pangan dan komoditas.

Dari sisi permintaan domestik, kinerja konsumsi dan investasi diperkirakan terus meningkat didukung optimisme penguatan daya beli dan realisasi investasi di Provinsi Lampung. Pada tahun 2026, konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat sejalan dengan terjaganya optimisme perbaikan pendapatan masyarakat, khususnya di sektor-sektor utama daerah. Hal tersebut didukung penetapan kenaikan upah minimum Provinsi Lampung pada tahun 2026 sebesar 5,35% menjadi Rp3.047.734,

Tabel 6.2. Proyeksi Indikator Makroekonomi Provinsi Lampung

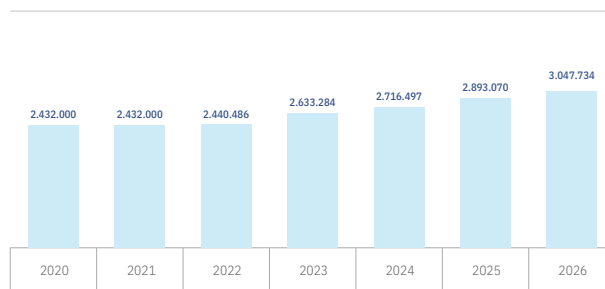
Indikator	2025	2026f	2027f
Pertumbuhan Ekonomi (% C-t-C)	5,28	5,0 – 5,6	5,1 – 5,7
Inflasi (% YoY)	1,25	2,5 ± 1	2,5 ± 1

Sumber: KPwBI Provinsi Lampung

dari upah minimum pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp2.893.070 (Grafik 6.1). Selanjutnya, prakiraan peningkatan kinerja permintaan domestik juga tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Provinsi Lampung yang pada Triwulan II 2026 mencapai 127,80, berada pada level optimis dan meningkat bila dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 6.2). Prakiraan pendapatan yang lebih baik juga kemudian tercermin dari hasil liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung yang menunjukkan peningkatan tingkat upah (Grafik 6.3).

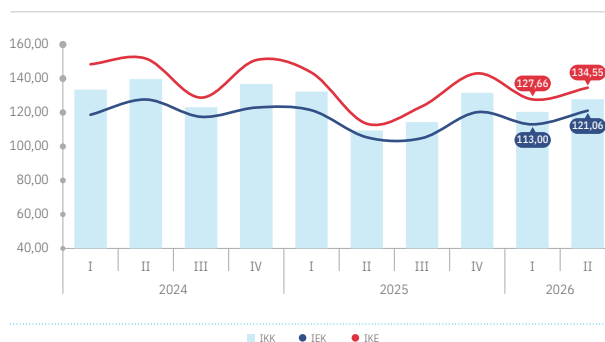
Dari sisi investasi, realisasi investasi di Provinsi Lampung menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun mulai menghadapi tantangan penahanan laju seiring meningkatnya kehati-hatian investor global terhadap volatilitas pasar keuangan. Pada tahun 2025, realisasi investasi tercatat sebesar Rp15,2 triliun atau melampaui target yang ditetapkan, dengan Provinsi Lampung menduduki peringkat ke-7 di wilayah Sumatra.

Grafik 6.1. Perkembangan Upah Minimum Provinsi Lampung 2020 s.d. 2026



Sumber: BPS

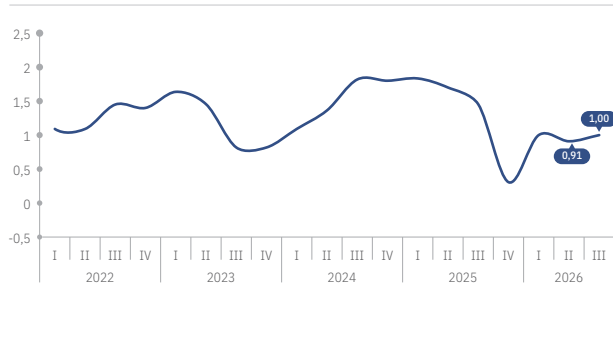
Grafik 6.2. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Provinsi Lampung



Sumber: SK Bank Indonesia, diolah

Capaian tersebut mencerminkan tetap terjaganya minat investor terhadap Lampung, didukung posisi geografis yang strategis sebagai pintu gerbang Sumatra serta penguatan konektivitas infrastruktur. Ke depan, prospek investasi diperkirakan tetap terjaga seiring berlanjutnya pengembangan proyek strategis di sektor infrastruktur, energi baru terbarukan, dan pariwisata, yang berpotensi mendorong peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi daerah.

Grafik 6.3. Perkembangan Hasil Liaison BI Lampung



Konsumsi pemerintah diperkirakan tetap memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2026, didukung oleh pelaksanaan program pembangunan dan belanja layanan publik. Meskipun demikian, ruang fiskal daerah masih relatif terbatas mengingat adanya ketergantungan terhadap pendapatan transfer pemerintah pusat. Struktur APBD TA 2026 Provinsi dan kabupaten/kota se-Lampung menunjukkan total pendapatan sebesar Rp28,88 triliun, dengan porsi pendapatan transfer yang masih dominan sebesar 71,53% dan PAD sebesar 27,83%. Dari sisi belanja, komposisi belanja operasi tercatat sebesar 72,63%, sementara belanja modal sebesar 12,60%. Ke depan, penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa mendorong pemerintah daerah untuk melakukan re-prioritisasi program serta meningkatkan kualitas dan efisiensi belanja. Optimalisasi PAD melalui intensifikasi

dan ekstensifikasi pajak daerah, penguatan insentif fiskal berbasis kinerja, serta penataan porsi belanja pegawai dan infrastruktur secara bertahap menjadi langkah strategis untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah. Dengan penguatan kualitas belanja yang lebih berorientasi pada *output* dan *outcome*, konsumsi pemerintah tetap diperkirakan mampu menopang permintaan domestik, meskipun dengan ruang ekspansi yang lebih terbatas.

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor Provinsi Lampung diperkirakan tetap terjaga, meskipun dengan laju yang lebih moderat dibandingkan periode sebelumnya, sejalan dengan normalisasi harga komoditas global dan perlambatan permintaan dari mitra dagang utama di tengah ketidakpastian perdagangan dunia. Mengingat struktur ekspor Lampung yang masih didominasi oleh komoditas berbasis perkebunan dan pertanian, khususnya minyak kelapa sawit (CPO), kopi robusta, serta komoditas tambang seperti batubara, pergerakan harga komoditas global menjadi faktor utama penentu kinerja ekspor daerah. Merujuk *Commodity Markets Outlook* World Bank, harga CPO diperkirakan berada pada kisaran USD1.089/mt pada 2026 dan meningkat terbatas menjadi sekitar USD1.096/mt pada 2027, masih relatif tinggi secara historis dan didukung permintaan global yang tetap kuat. Sementara itu, harga kopi robusta diperkirakan tetap berada pada level *elevated*, yakni sekitar USD4,00/kg pada 2026 dan USD3,90/kg pada 2027, meskipun mulai menunjukkan kecenderungan normalisasi seiring perbaikan pasokan global. Di sisi lain, harga batubara internasional (*benchmark* Australia) diperkirakan berada pada kisaran USD130/mt pada 2026 dan melambat menjadi sekitar USD115/mt pada 2027.

Dengan dinamika tersebut, normalisasi harga komoditas dan risiko perlambatan ekonomi global perlu terus dicermati. Ke depan, penguatan hilirisasi dan diversifikasi pasar tujuan ekspor menjadi strategi penting dalam menjaga ketahanan sektor eksternal di Provinsi Lampung.

Tabel 6.3. Harga Komoditas Ekspor dan Impor Utama Provinsi Lampung

Komoditas Utama		Satuan	2025	2026f	2027f
Ekspor	Minyak Kelapa Sawit	USD/mt	1007,00	1.089,00	1.096,00
	Kopi Robusta	USD/kg	4,86	4,00	3,90
	Batubara	USD/mt	108,40	130,00	115,00
	Pupuk	Indeks	138,70	181,30	152,10
Impor	Gula	USD/kg	0,37	0,35	0,34
	Energi	Indeks	90,00	111,30	92,10

Sumber: World Bank Commodity Outlook April 2026

Prospek pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung ke depan juga turut tercermin dari perkembangan kinerja lapangan usaha utama. Pada tahun 2026, kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diperkirakan tetap tumbuh positif meskipun lebih moderat dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan *base effect* setelah peningkatan produksi yang tinggi pada tahun-tahun sebelumnya. Prospek produksi tanaman pangan juga tetap terjaga didukung keberlanjutan program ketahanan pangan, optimalisasi

lahan, penggunaan benih unggul, serta dukungan pupuk bersubsidi dan perbaikan jaringan irigasi.

Pada subsektor perkebunan, produksi kelapa sawit dan tebu diperkirakan relatif stabil dengan kecenderungan meningkat terbatas seiring optimalisasi areal tanam dan penguatan hilirisasi, sementara prospek produksi kopi robusta tetap baik meskipun produktivitas berpotensi mengalami normalisasi seiring siklus tanaman.

Sejalan dengan peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur, kinerja LU Konstruksi pada 2026 diperkirakan meningkat dan berlanjut pada 2027. Penguatan tersebut didorong oleh berlanjutnya proyek infrastruktur strategis daerah, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pengembangan kawasan industri, serta pembangunan sarana dan prasarana publik. Akselerasi belanja modal pemerintah daerah dan peningkatan realisasi investasi swasta turut menopang aktivitas konstruksi, sehingga memberikan *multiplier effect* terhadap sektor-sektor terkait.

Kinerja LU Industri Pengolahan juga diperkirakan menguat sejalan dengan peningkatan permintaan domestik dan prospek ketersediaan bahan baku yang lebih terjaga, khususnya pada industri pengolahan kelapa sawit dan industri makanan dan minuman. Implementasi kebijakan hilirisasi serta peningkatan nilai tambah komoditas unggulan daerah berpotensi mendorong optimalisasi utilisasi kapasitas produksi. Meskipun demikian, risiko perlambatan permintaan global tetap perlu dicermati mengingat eksposur industri pengolahan Lampung terhadap pasar ekspor. **Selanjutnya, LU Perdagangan Besar dan Eceran diperkirakan tetap tumbuh kuat sejalan dengan penguatan konsumsi rumah tangga dan perbaikan distribusi barang antarwilayah.** Normalisasi produksi pangan nasional berpotensi mengurangi volatilitas perdagangan komoditas antar daerah, namun peningkatan daya beli masyarakat dan aktivitas industri tetap menjadi penopang utama kinerja sektor ini. **Sejalan dengan itu, LU Transportasi dan Pergudangan diperkirakan tumbuh positif meskipun lebih moderat,** seiring stabilisasi mobilitas masyarakat dan perkembangan volume distribusi barang, termasuk komoditas agroindustri dan pertambangan.

Secara keseluruhan, prospek kinerja lapangan usaha Provinsi Lampung ke depan **menunjukkan penguatan sektor sekunder dan tersier di tengah normalisasi sektor primer,** sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang tetap solid dan berkelanjutan.

6.2. Prospek Inflasi

Inflasi Dunia dan Nasional

Inflasi global pada 2026 diperkirakan meningkat sebelum kembali melandai pada 2027, sejalan dengan masih tingginya tekanan harga energi dan pangan global di tengah berlanjutnya ketidakpastian geopolitik dan gangguan rantai pasok. Berdasarkan *World Economic Outlook* (IMF, Juli 2026), inflasi global diproyeksikan meningkat dari 4,1% pada 2025 menjadi 4,7% pada 2026, sebelum menurun menjadi 3,9% pada 2027. Proyeksi inflasi 2026 tersebut direvisi naik 0,3 poin persentase dibandingkan proyeksi April 2026, terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga energi dan pangan global. IMF memperkirakan harga minyak mentah meningkat 31,8% pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya, sementara kenaikan harga energi, pupuk, dan biaya transportasi turut mendorong harga pangan global.

Perkembangan inflasi global diperkirakan tetap menunjukkan divergensi antarnegara, dipengaruhi oleh perbedaan transmisi nilai tukar, persistensi tekanan harga pada kelompok pengeluaran terkait jasa, kondisi pasar tenaga kerja, serta eksposur masing-masing negara terhadap perkembangan harga energi. Di Amerika Serikat, tekanan inflasi diperkirakan terus mereda secara gradual hingga mendekati sasaran pada akhir 2027. Dampak langsung kenaikan harga energi diperkirakan relatif terbatas sejalan dengan posisi Amerika Serikat sebagai eksportir netto energi serta produktivitas yang tetap kuat. Di Inggris, tekanan inflasi juga diperkirakan menurun secara bertahap seiring memudarnya dampak guncangan energi, terutama pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga serta transportasi, disertai moderasi tekanan harga pada berbagai kelompok pengeluaran terkait jasa. Inflasi diperkirakan kembali mendekati sasaran pada pertengahan 2027. Sementara itu, di Jepang, proses disinflasi diperkirakan berlangsung lebih gradual dan baru mendekati sasaran pada akhir 2027. Perkembangan tersebut sejalan dengan masih tingginya tekanan harga energi, yang terutama ditransmisikan melalui kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga serta transportasi, di tengah normalisasi kebijakan moneter yang berlangsung secara bertahap. Adapun di kawasan Eropa, tekanan harga energi yang relatif tinggi serta masih persistenya kenaikan harga pada kelompok pengeluaran terkait jasa menyebabkan proses konvergensi inflasi menuju sasaran berlangsung lebih lambat. Inflasi diperkirakan baru kembali mendekati target pada 2028. Di Asia, inflasi Tiongkok diperkirakan

meningkat secara bertahap dari level yang relatif rendah, di tengah permintaan domestik yang masih lemah dan berlanjutnya tekanan struktural pada perekonomian.

Ke depan, risiko inflasi global masih perlu dicermati, terutama terkait potensi eskalasi kembali konflik di Timur Tengah, gangguan rantai pasok, fragmentasi perdagangan, serta tekanan nilai tukar. Eskalasi konflik berpotensi kembali meningkatkan harga komoditas, memperpanjang volatilitas, serta menimbulkan gangguan pasokan energi dan pangan. Risiko tersebut dapat semakin besar apabila disrupsi pada pasar energi dan pupuk berlanjut, sementara peningkatan hambatan perdagangan berpotensi menciptakan supply bottleneck dan mendorong kenaikan biaya produksi. Di sisi lain, normalisasi pasar energi yang lebih cepat dari prakiraan serta meredanya tekanan geopolitik berpotensi menahan kenaikan inflasi.

Meskipun ketidakpastian global masih tinggi, inflasi Indonesia pada 2026–2027 diperkirakan tetap terkendali dan berada dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$. Kondisi tersebut didukung oleh konsistensi bauran kebijakan moneter Bank Indonesia, pengelolaan harga oleh Pemerintah, serta penguatan sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan TPIP–TPID. Bank Indonesia memprakirakan inflasi secara tahunan tetap terjaga, didukung oleh ekspektasi inflasi yang terkendali, efektivitas transmisi kebijakan moneter, serta kapasitas perekonomian yang masih memadai dalam merespons peningkatan aktivitas ekonomi. Tekanan harga pada kelompok transportasi serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga diperkirakan tetap terkendali sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan harga energi dan tarif yang diatur. Sementara itu, tekanan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau diperkirakan tetap terjaga melalui penguatan pengamanan pasokan, kelancaran distribusi, dan peningkatan produktivitas pangan domestik, termasuk melalui implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS).

Ke depan, dinamika inflasi Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah risiko yang bersumber dari faktor global maupun domestik. Dari sisi global, risiko terutama berasal dari ketidakpastian pasar keuangan internasional, pergerakan nilai tukar, serta potensi *imported inflation* akibat masih tingginya harga energi dan komoditas global. Sementara itu, dari sisi domestik, transisi menuju El Nino berpotensi meningkatkan risiko gangguan produksi pangan. Tekanan harga juga berpotensi berasal dari

transmisi kenaikan biaya energi terhadap biaya produksi, transportasi, dan distribusi barang, yang selanjutnya dapat berdampak harga konsumen. Meski demikian, dampak risiko tersebut diperkirakan dapat diredam oleh penguatan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah, kecukupan cadangan devisa, serta terjaganya koordinasi kebijakan pengendalian inflasi. Di sisi domestik, terjaganya pasokan pangan, perbaikan distribusi antarwilayah, dan efektivitas komunikasi kebijakan diperkirakan terus memperkuat jangkar ekspektasi inflasi. Dengan bauran kebijakan yang *pre-emptive* dan *forward looking* serta sinergi yang erat antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan TPID, inflasi Indonesia diperkirakan tetap berada dalam kisaran sasaran dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

Inflasi Provinsi Lampung

Inflasi Provinsi Lampung pada 2026–2027 diperkirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$, meskipun dihadapkan pada sejumlah faktor risiko yang perlu dicermati. Tekanan inflasi terutama pada kelompok pendidikan diperkirakan meningkat seiring normalisasi tarif pendidikan pasca kebijakan pembebasan biaya komite sekolah pada 2025. Di sisi lain, tekanan permintaan diperkirakan tetap terjaga sejalan dengan daya beli masyarakat yang kuat, didukung oleh peningkatan pendapatan seiring kenaikan UMP Lampung sebesar 5,35%, berlanjutnya kinerja positif lapangan usaha utama, serta aktivitas ekonomi daerah yang tetap tumbuh solid.

Lebih lanjut, tekanan inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau diperkirakan tetap terkendali sejalan dengan prospek berlanjutnya peningkatan produksi komoditas pangan strategis. Kondisi tersebut didukung oleh penguatan program intensifikasi pertanian dari pemerintah pusat melalui peningkatan alokasi pupuk bersubsidi nasional pada 2026 sebesar 9,8 juta ton, termasuk perluasan cakupannya ke sektor perikanan budidaya. Di tingkat Provinsi Lampung, perluasan dukungan bantuan pupuk organik cair (POC) serta fasilitasi alat pengeringan (*dryer*) untuk penguatan pascapanen diperkirakan dapat mendorong peningkatan produktivitas sisi hulu tanaman pangan dan memperkuat ketahanan pasokan yang lebih berkelanjutan. Di samping itu, potensi cuaca yang relatif lebih kondusif pasca pemulihan bencana hidrometeorologi di sentra produksi luar daerah turut menopang stabilitas produksi dan kelancaran distribusi pangan.

Meski demikian, risiko inflasi ke depan masih perlu diwaspadai. Selain dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas global dan potensi peningkatan tekanan *imported inflation*, prospek inflasi daerah juga menghadapi risiko dari faktor iklim. Berdasarkan prakiraan BMKG, fenomena ENSO sudah menunjukkan indikasi El Nino lemah pada Mei 2026 dan diperkirakan meningkat dengan intensitas yang lebih kuat pada semester II 2026. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, mengurangi ketersediaan air irigasi, serta menekan produktivitas komoditas pangan strategis, khususnya tanaman pangan dan hortikultura.

Ke depan, penguatan sinergi pengendalian inflasi melalui TPID Provinsi Lampung akan terus diperkuat untuk menjaga prospek inflasi tetap dalam sasaran serta memitigasi berbagai risiko yang mengemuka. Strategi 4K dalam memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif akan diperkuat melalui upaya peningkatan produktivitas komoditas pangan utama, penguatan kerja sama antar/intra daerah, optimalisasi distribusi dan pasar murah, serta pemanfaatan digitalisasi data dan sistem peringatan dini harga (*early warning system*). Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan yang akomodatif dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

6.3. Rekomendasi

Berdasarkan asesmen terkini, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang inklusif, mandiri dan inovatif, menjaga stabilitas makroekonomi di tengah risiko perlambatan ekonomi global, serta risiko meningkatnya tekanan inflasi, berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan:

- (1) Perlunya peningkatan produktivitas di sisi hulu sektor pertanian khususnya tanaman padi yang menjadi komoditas unggulan Provinsi Lampung. Peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan penggunaan benih dengan varietas unggul yang tahan hama dan cuaca, perbaikan infrastruktur irigasi teknis dan pembuatan sumur bor, serta penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Peningkatan produktivitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan pasokan gabah, yang pada akhirnya dapat berkontribusi positif pada peningkatan pendapatan petani, pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas inflasi bahan makanan.

- (2) Dalam rangka menopang sektor primer, pertumbuhan sektor industri perlu lebih ditingkatkan melalui peningkatan investasi dengan memanfaatkan kegiatan Foila (Forum Investasi Lampung). Sesuai dengan Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah 2025 - 2029, Pemerintah Provinsi Lampung perlu secara konsisten mengarahkan investasi berdasarkan 3 koridor ekonomi utama yaitu (1) hub ekonomi kreatif, ketahanan pangan, industri berbasis inovasi, riset dan teknologi, (2) super hub agro industri dan *culture tourism*, dan (3) hub ekonomi biru, branding pariwisata pesisir, dan industri berbasis sumber daya alam. Arah pengembangan kewilayahan tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang berkelanjutan, inklusif dan berdayasaing.
- (3) Selanjutnya pemerintah daerah diharapkan dapat mempertahankan permintaan domestik (*aggregate demand*) yang cukup tinggi agar mampu mendukung pertumbuhan sektor tersier/jasa terutama sektor perdagangan, transportasi, dan jasa. Kebijakan fiskal pemerintah yang ekspansif melalui pengeluaran belanja pegawai dan barang dan jasa, infrastruktur dan penyaluran bantuan sosial, serta pengendalian inflasi bahan makanan diharapkan mampu berkontribusi positif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor tersier.
- (4) Pemerintah perlu terus memperkuat program prioritas nasional dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Program tersebut mampu membangkitkan ekonomi nasional dengan menggerakkan perekonomian desa melalui pemanfaatan keunggulan produksi di desa.
- (5) Melanjutkan sinergi pengendalian inflasi pusat dan daerah melalui penguatan program TPIP-TPID dan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) dalam kerangka 4K sebagai berikut:
 - Dari sisi **keterjangkauan harga (K1)**, intervensi stabilisasi harga diarahkan melalui pelaksanaan gerakan pasar murah pada periode *high demand*, dengan tetap memperhatikan efektivitas, efisiensi, serta ketepatan lokasi dan komoditas sasaran. Selain itu proses pengambilan keputusan dalam rapat koordinasi TPID dilakukan melalui optimalisasi data harga yang mutakhir dan pemanfaatan *early warning system* (EWS) dalam mendeteksi potensi tekanan inflasi.

- Pada aspek **ketersediaan pasokan (K2)**, diarahkan pada peningkatan produktivitas dan ketahanan pasokan pangan melalui keberlanjutan program intensifikasi pertanian, penguatan sarana produksi, serta perbaikan tata kelola pascapanen. Sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan input pertanian, penguatan kelembagaan petani, dan pengembangan kemitraan usaha diharapkan mampu menjaga kesinambungan pasokan sekaligus meminimalkan volatilitas harga pangan.
- Pada aspek **kelancaran distribusi (K3)**, penguatan kerja sama antar daerah (KAD) serta optimalisasi infrastruktur dan simpul distribusi pangan perlu terus ditingkatkan guna menekan disparitas harga antarwilayah. Peningkatan efisiensi rantai pasok, termasuk dukungan fasilitasi distribusi pada periode berisiko inflasi tinggi, diharapkan menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di tingkat konsumen.
- pada aspek **komunikasi efektif (K4)**, penguatan transparansi serta diseminasi informasi pasokan dan harga pangan menjadi kunci dalam menjaga ekspektasi inflasi masyarakat tetap terjangkau. Koordinasi kebijakan yang erat melalui TPID, disertai penguatan komunikasi publik yang konsisten dan berbasis data, diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap dinamika pasokan dan harga, sehingga mendukung stabilitas inflasi secara berkelanjutan.



Daftar Istilah

Andil inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah
Faktor Fundamental	Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi permintaan-penawaran atau <i>output gap</i> , eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat
Indeks Ekspektasi Konsumen	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Indeks Kondisi Ekonomi	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1-100.
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
Liaison	Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.
Migas	Minyak dan gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.
MTM	<i>Month to month</i> . Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Bimo Epyanto

Koordinator Penyusun

Achmad P Subarkah

Editor

Fiskara Indawan

Tim Penulis

Fiskara Indawan

Madeleine Hart Filiapuspa

Binar Tyas Aini

Khaira Alfatih

Nurunnadiya Savitri

Arifiandhita Salsabila Istiyanto

Sherline Vicky Aisyiyah

Aulia Fahrunnisa

Risa Aulia

Rara Gusti Rahmawati

Farrel Julio Akbar

Kontributor

Fungsi Perumusan KEKDA Provinsi

Tim Implementasi KEKDA Provinsi

Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Produksi dan Distribusi

Fungsi Perumusan KEKDA Provinsi





**Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Lampung**

Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan
Jl.Hasanuddin No.38
Bandar Lampung – Lampung, 35225
Tel. (0721) 486-355
Fax. (0721) 481-13



e-Book LPP dapat diakses melalui QR